



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/ K.426 / 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR DATA TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Forum Satu Data dalam rangka pembahasan dan penyepakatan daftar data tahun 2025 dengan melibatkan Walidata, Pembina Data dan Produsen Data, serta difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 21 ayat (2), Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Timur menyampaikan daftar data yang telah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Data Tahun 2025 dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 48);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Satu Data Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 000.7.3/2037/Bapp-II/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Data Tahun 2025, dengan daftar data sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri atas :

- a. Daftar Data Portal Satu Data Kalimantan Timur; dan
- b. Daftar Data Statistik Sektorial Daerah Modul E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.

KETIGA : Daftar Data sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat produsen data dan kalender rilis data untuk masing-masing daftar data dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data.

KEEMPAT : Daftar Data Tahun 2025 memuat rincian yang akan diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata bersama dengan Pembina Data.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat hal ikhwal yang mendesak berdasarkan kebutuhan dan/atau kebijakan tertentu, dapat dilakukan pemutakhiran terhadap Daftar Data Tahun 2025 melalui Forum Satu Data.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Timur;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selaku Walidata;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur selaku Pembina Data;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 196905121989032009

DAFTAR DATA PORTAL SATU DATA KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1	PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008		Temuan hasil pemeriksaan BPK	Laporan/LHP	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
2	PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008		Temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Laporan/LHP	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
3	PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008		Tindakan lanjut hasil pemeriksaan BPK	Rekomendasi	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
4	PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008		Tindakan lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Rekomendasi	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
5	Permenpan RB No.90 Tahun 2021		Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM	Perangkat Daerah	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
6	Permenpan 90 Tahun 2021 & Kepmen No 1034 Tahun 2022		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
7	Permenpan 90 Tahun 2021 & Kepmen No 1034 Tahun 2022		Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
8	Perka BPKP No. 15 Tahun 2014		Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	Orang	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
9	PP 12 Tahun 2017 dan PKPT		Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
10	Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014		Skor Rata-rata Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
11	Permenpan RB No.88 Tahun 2021		Skor Rata-rata hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten/Kota	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
12	PKPT dan PP No. 12 Tahun 2017		Cakupan Pengawasan yang akan dicapai		Statistik	Inspektorat	Februari 2026
13	PKPT dan PP No. 12 Tahun 2017		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
14	Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008		Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
15	PKPT dan PP No. 12 Tahun 2017		Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang terbit tepat waktu	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
16			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
17			Jumlah kasus KKN	Kasus	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
18	Permendagri No. 04 Tahun 2008		Jumlah PD yang direviu laporan keuangannya	Perangkat Daerah	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
19			Jumlah Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	Kegiatan	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
20	Permenpan RB		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
21	PP No. 60 Th 2008 dan Peraturan BPKP No. 5 tahun 2021		Nilai Penjamin Kualitas (PK) SPIP Perangkat Daerah	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
22	UU No. 19 ttg perub kedua atas UU no. 30 th 2002		Persentase Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
23			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
24	UU No. 19 ttg perub kedua atas UU no. 30 th 2002		Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
25	PP No. 60 Tahun 2008		Tingkat Maturitas SPIP	Level	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
26	Permenpan 90 Tahun 2021 & Kepmen No 1034 Tahun 2022		Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
27	RPJPD 2025-2045		Indeks Integritas Nasional	indeks	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
28			Indeks Integritas Provinsi dan Kabupaten/Kota	Indeks	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
29			Penilaian hasil evaluasi penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dan Kapabilitas APIP pada Provinsi dan Kabupaten/Kota	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
30	Permenpan RB No.88 Tahun 2021		Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (Perangkat Daerah)	Nilai	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
31	RPJMD 2025-2029		Tindaklanjut Rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	%	Statistik	Inspektorat	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
32	RPJMD 2025-2029		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP)	Level	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
33	RPJMD 2025-2029		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP)	Level	Statistik	Inspektorat	Februari 2026
34			Peta Hasil Kajian Peri-urban IKN		Geospasial	BRIDA	Februari 2026
35			Peta Hasil Kajian Wilayah Penyangga		Geospasial	BRIDA	Februari 2026
36	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan Industri/Badan Usaha pada bidang-bidang prioritas	kerja sama	Statistik	BRIDA	Februari 2026
37	RPJMN 2025-2029 ;	06.03.0008	Jumlah Lokasi/Negara yang Dicakup dalam kemitraan penelitian internasional	negara	Statistik	BRIDA	Februari 2026
38	RPJMN 2025-2029 ;	06.03.0010	Jumlah Penerimaan dari pemanfaatan Iptek dan inovasi di BRIDA	miliar rupiah	Statistik	BRIDA	Februari 2026
39	RPJMN 2025-2029 ;	06.03.0012	Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh Pemerintah dan Masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	Statistik	BRIDA	Februari 2026
40	RPJMN 2025-2029 ;	06.03.0007	Jumlah SDM Iptek (Dosen, Peneliti, dan Perekrayasa)	orang	Statistik	BRIDA	Februari 2026
41	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	06.03.022	Pengeluaran Iptek dan Inovasi	persen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
42	SDGs ;	06.03.028	Proporsi SDM Iptek dengan gelar Doktor (S3)	persen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
43			Jumlah Penerapan Hasil Riset yang bermanfaat Bagi Masyarakat Dan Pembangunan Daerah	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
44			Jumlah Penerapan Hasil Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
45			Jumlah Hasil Riset yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
46			Jumlah Hasil Inovasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
47	RKPD 2025		Persentase Hasil Inovasi yang ditindaklanjuti dalam dokumen	%	Statistik	BRIDA	Februari 2026
48	RKPD 2025		Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen	%	Statistik	BRIDA	Februari 2026
49			Jumlah Penelitian Yang Dihasilkan Untuk IKN	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
50			Jumlah Penelitian Di Sektor Ekonomi	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
51			Jumlah Penelitian di Sektor SDM	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
52			Jumlah Penelitian di Sektor Infrastruktur	dokumen	Statistik	BRIDA	Februari 2026
53	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	Teknologi	Statistik	BRIDA	Februari 2026
54	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	Inovasi	Statistik	BRIDA	Februari 2026
55	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yang ada yang dikembangkan	Kawasan	Statistik	BRIDA	Februari 2026
56	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah peserta program mobilitas talenta riset dan inovasi	Orang	Statistik	BRIDA	Februari 2026
57	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah SDM iptek yang ditingkatkan kualifikasinya	Orang	Statistik	BRIDA	Februari 2026
58	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah talenta muda riset dan inovasi yang dibina	Orang	Statistik	BRIDA	Februari 2026
59	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dikembangkan	Infrastuktur	Statistik	BRIDA	Februari 2026
60	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penerapan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam	Teknologi	Statistik	BRIDA	Februari 2026
61	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Produk Inovasi dan Produk Riset Prioritas	Produk	Statistik	BRIDA	Februari 2026
62	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah hasil riset terapan yang terkait bidang industri	Hasil Riset	Statistik	BRIDA	Februari 2026
63	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Indeks Daya Saing Daerah	nilai	Statistik	BRIDA	Februari 2026
64	RPJPD 2025-2045		Indeks Inovasi Daerah	indeks	Statistik	BRIDA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
65	RPJMD 2025-2029		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	Statistik	BRIDA	Februari 2026
66	RPJMD 2025-2029		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	%	Statistik	BRIDA	Februari 2026
67			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	indeks	Statistik	BRIDA	Februari 2026
68	SDGs ;		Total Pengeluaran Pemerintah dalam APB	rupiah	Statistik	BPKAD	Februari 2026
69	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Jumlah Aset Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
70	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Jumlah Aset Tidak Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
71	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Jumlah Aset Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
72	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
73	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Tidak Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
74	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
75	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Penyusutan Aset Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
76	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
77	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Setda Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
78	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Setda Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
79	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Setda Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
80	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Setda Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
81	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
82	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
83	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
84	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
85	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Inspektorat Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
86	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Inspektorat Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
87	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Inspektorat Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
88	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Inspektorat Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
89	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Bappeda Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
90	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Bappeda Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
91	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Bappeda Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
92	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Bappeda Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
93	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Dinas Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
94	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Dinas Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
95	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Dinas Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
96	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Dinas Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
97	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Lembaga Teknis Daerah Milik Sendiri	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
98	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Lembaga Teknis Daerah Sewa	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
99	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Lembaga Teknis Daerah Pinjam	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026
100	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Kantor Lembaga Teknis Daerah Gabung	UNIT	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
101	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Kantor Setda		Statistik	BPKAD	Februari 2026
102	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Kantor Dinas Daerah		Statistik	BPKAD	Februari 2026
103	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah		Nilai Aset Kantor Lembaga Teknis Daerah		Statistik	BPKAD	Februari 2026
104	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		PENDAPATAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
105	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
106	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Pendapatan Pajak Daerah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
107	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
108	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
109	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
110	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		PENDAPATAN TRANSFER	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
111	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
112	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Bagi Hasil Pajak	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
113	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
114	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
115	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
116	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
117	Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah		Dana Penyesuaian (DID)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
118	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Bantuan Keuangan	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
119	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
120	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
121	UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
122	UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Pendapatan Hibah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
123	UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah		Pendapatan Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
124			BELANJA	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
125	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		BELANJA OPERASI	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
126	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Pegawai	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
127	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Barang dan Jasa	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
128	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Bunga	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
129	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Hibah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
130	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Bantuan Sosial	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
131	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		BELANJA MODAL	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
132	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Modal Tanah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
133	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
134	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
135	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
136	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
137	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		BELANJA TAK TERDUGA	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
138	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Belanja Tak Terduga	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
139	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
140	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
141	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
142	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
143	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
144	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		SURPLUS / (DEFISIT)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
145	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		PEMBIAYAAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
146	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
147	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Penggunaan SiLPA	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
148	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
149	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
150	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		PEMBIAYAAN NETTO	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
151	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp	Statistik	BPKAD	Februari 2026
152			Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	Statistik	BPKAD	Februari 2026
153	RPJMD 2025-2029		Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	indeks	Statistik	BPKAD	Februari 2026
154			Opini BPK atas LKPD		Statistik	BPKAD	Februari 2026
155			Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	%	Statistik	BPKAD	Februari 2026
156	RKPD 2025		Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu		Statistik	BPKAD	Februari 2026
157	RKPD 2025		Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	%	Statistik	BPKAD	Februari 2026
158	Daftar Data Lemhannas		Persentase anggaran APBD yang digunakan untuk bidang pendidikan	%	Statistik	BPKAD	Februari 2026
159	Daftar Data Lemhannas		Persentase anggaran APBD yang digunakan untuk bidang kesehatan	%	Statistik	BPKAD	Februari 2026
160			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
161			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
162			Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
163			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
164			Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
165			Jumlah SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
166	RKPD 2025		Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
167			Jumlah SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
168			Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
169			Jumlah SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
170			Persentase SDM/Aparatur yang Telah Memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
171			Jumlah SDM/Aparatur yang Telah Memperoleh Sertifikasi/STTP Pengembangan Kompetensi	orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
172			Jumlah Akreditasi Pengembangan Kompetensi	unit	Statistik	BPSDM	Februari 2026
173	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Peserta Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Pelatihan Sosial Kultural dan Pelatihan Fungsional	Orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
174	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Alumni Diklat pada Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), Pelatihan Teknis, Sosial Kultural, dan Pelatihan Fungsional	Orang	Statistik	BPSDM	Februari 2026
175	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Lembaga Pelatihan Terakreditasi (PKN TK II, PKA, PKP, Latsar CPNS, Pelatihan Teknis, Pelatihan Fungsional)	Lembaga Pelatihan	Statistik	BPSDM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
176	RPJMD 2025-2029		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan pemerintahan	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
177			Persentase perangkat daerah yang telah menyusun AKPK sesuai kebutuhan organisasi dan kebutuhan individu	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
178	RPJMD 2025-2029		Persentase ASN yang mengikuti sertifikat kompetensi	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
179	RPJMD 2025-2029		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Teknis	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
180	RPJMD 2025-2029		Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	%	Statistik	BPSDM	Februari 2026
181	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0020	Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
182	SDGs ;	09.06.0022	Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE)	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
183	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0025	Jumlah Total Pejabat yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
184	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.009	Indeks Sistem Merit		Statistik	BKD	Februari 2026
185	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0006	Indeks Sistem Merit Aspek Manajemen Kinerja		Statistik	BKD	Februari 2026
186	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0007	Indeks Sistem Merit Aspek Pengadaan		Statistik	BKD	Februari 2026
187	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0008	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Karir		Statistik	BKD	Februari 2026
188	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0009	Indeks Sistem Merit Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin		Statistik	BKD	Februari 2026
189	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0010	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan		Statistik	BKD	Februari 2026
190	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0011	Indeks Sistem Merit Aspek Sistem Informasi		Statistik	BKD	Februari 2026
191			Skor Promosi dan Mutasi		Statistik	BKD	Februari 2026
192			Skor Perlindungan dan Pelayanan		Statistik	BKD	Februari 2026
193	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkan	rekomendasi	Statistik	BKD	Februari 2026
194	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.025	Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	persen	Statistik	BKD	Februari 2026
195	RPJMN 2025-2029 ;		Total Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan	rekomendasi	Statistik	BKD	Februari 2026
196	SDGs ;	09.06.0038	Total Jumlah SDM di bidang IPTEK	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
197			Jumlah PNS	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
198			Jumlah PNS Laki-Laki	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
199			Jumlah PNS Perempuan	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
200			Jumlah PNS Berdasarkan Golongan I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
201			Jumlah PNS Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
202			Jumlah PNS Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
203			Jumlah PNS Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
204			Jumlah Pejabat Struktural Eselon I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
205			Jumlah Pejabat Struktural Eselon II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
206			Jumlah Pejabat Struktural Eselon III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
207			Jumlah Pejabat Struktural Eselon IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
208			Jumlah Staf Berdasarkan Golongan I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
209			Jumlah Staf Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
210			Jumlah Staf Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
211			Jumlah Staf Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
212			Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
213			Jumlah Pensiunan PNS Eselon I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
214			Jumlah Pensiunan PNS Eselon II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
215			Jumlah Pensiunan PNS Eselon III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
216			Jumlah Pensiunan PNS Eselon IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
217			Jumlah Pensiunan PNS Staf	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
218			Jumlah Pegawai Tamat SD atau sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
219			Jumlah Pegawai SMP dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
220			Jumlah Pegawai SMA dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
221			Jumlah Pegawai Diploma	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
222			Jumlah Pegawai Strata 1	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
223			Jumlah Pegawai Strata 2	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
224			Jumlah Pegawai Strata 3	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
225			Jumlah Pegawai Biro Tamat SD atau sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
226			Jumlah Pegawai Biro SMP dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
227			Jumlah Pegawai Biro SMA dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
228			Jumlah Pegawai Biro Diploma	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
229			Jumlah Pegawai Biro Strata 1	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
230			Jumlah Pegawai Biro Strata 2	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
231			Jumlah Pegawai Biro Strata 3	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
232			Jumlah PNS Biro Berdasarkan	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
233			Jumlah PNS Biro Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
234			Jumlah PNS Biro Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
235			Jumlah PNS Biro Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
236			Jumlah Pejabat Biro Struktural Eselon	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
237			Jumlah Pejabat Biro Struktural Eselon	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
238			Jumlah Pejabat Biro Struktural Eselon	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
239			Jumlah Pejabat Biro Fungsional	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
240			Jumlah Pensiunan Biro	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
241			Jumlah Pegawai Badan Tamat SD atau sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
242			Jumlah Pegawai Badan SMP dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
243			Jumlah Pegawai Badan SMA dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
244			Jumlah Pegawai Badan Diploma	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
245			Jumlah Pegawai Badan Strata 1	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
246			Jumlah Pegawai Badan Strata 2	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
247			Jumlah Pegawai Badan Strata 3	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
248			Jumlah PNS Badan Berdasarkan Golongan I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
249			Jumlah PNS Badan Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
250			Jumlah PNS Badan Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
251			Jumlah PNS Badan Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
252			Jumlah Pejabat Badan Struktural Eselon II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
253			Jumlah Pejabat Badan Struktural Eselon III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
254			Jumlah Pejabat Badan Struktural Eselon IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
255			Jumlah Pejabat Badan Fungsional	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
256			Jumlah Pensiunan Badan	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
257			Jumlah Pegawai Dinas Tamat SD atau sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
258			Jumlah Pegawai Dinas SMP dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
259			Jumlah Pegawai Dinas SMA dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
260			Jumlah Pegawai Dinas Diploma	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
261			Jumlah Pegawai Dinas Strata 1	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
262			Jumlah Pegawai Dinas Strata 2	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
263			Jumlah Pegawai Dinas Strata 3	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
264			Jumlah PNS Dinas Berdasarkan Golongan I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
265			Jumlah PNS Dinas Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
266			Jumlah PNS Dinas Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
267			Jumlah PNS Dinas Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
268			Jumlah Pejabat Dinas Struktural Eselon II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
269			Jumlah Pejabat Dinas Struktural Eselon III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
270			Jumlah Pejabat Dinas Struktural Eselon IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
271			Jumlah Pejabat Dinas Fungsional	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
272			Jumlah Pensiunan Dinas	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
273			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga Tamat SD atau sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
274			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga SMP dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
275			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga SMA dan sederajat	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
276			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga Diploma	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
277			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga Strata 1	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
278			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga Strata 2	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
279			Jumlah Pegawai Rumah Sakit/Lembaga Strata 3	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
280			Jumlah PNS Rumah Sakit/Lembaga Berdasarkan Golongan I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
281			Jumlah PNS Rumah Sakit/Lembaga Berdasarkan Golongan II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
282			Jumlah PNS Rumah Sakit/Lembaga Berdasarkan Golongan III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
283			Jumlah PNS Rumah Sakit/Lembaga Berdasarkan Golongan IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
284			Jumlah Pejabat Rumah Sakit/Lembaga Struktural Eselon II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
285			Jumlah Pejabat Rumah Sakit/Lembaga Struktural Eselon III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
286			Jumlah Pejabat Rumah Sakit/Lembaga Struktural Eselon IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
287			Jumlah Pejabat Rumah Sakit/Lembaga Fungsional	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
288			Jumlah Pensiunan Rumah Sakit/Lembaga	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
289			Jumlah Diklatpim Tingkat IV	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
290			Jumlah Diklatpim Tingkat III	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
291			Jumlah Diklatpim Tingkat II	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
292			Jumlah Diklatpim Tingkat I	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
293			Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya Aparatur	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
294	RKPD 2025		Indeks NSPK Manajemen ASN	indeks	Statistik	BKD	Februari 2026
295	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
296	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut kelompok umur dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
297	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut masa kerja dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
298	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Data Statistik Aparatur Sipil Negara Indonesia (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
299	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis jabatan dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
300	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut jenis Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
301	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
302	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
303	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut lokasi kerja dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
304	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinci menurut jenis kelamin dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
305	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut golongan ruang dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
306	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Aparatur Sipil Negara dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
307	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Prediksi Pegawai Negeri Sipil yang Akan Pensiun dirinci menurut instansi	Orang	Statistik	BKD	Februari 2026
308	Daftar Data Lemhannas	7.9.6.1	Jumlah perempuan bekerja dalam posisi kepemimpinan dan	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
309	Daftar Data Lemhannas	7.9.6.2	Jumlah yang bekerja dalam posisi kepemimpinan dan ketatalaksanaan	orang	Statistik	BKD	Februari 2026
310	RPJMD 2025-2029		Persentase perencanaan Kebutuhan Yang sesuai dengan formasi	%	Statistik	BKD	Februari 2026
311	RPJMD 2025-2029		Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	Statistik	BKD	Februari 2026
312	RPJMD 2025-2029		Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	Statistik	BKD	Februari 2026
313	RPJMD 2025-2029		Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	%	Statistik	BKD	Februari 2026
314	Data Informasi BPBD Kabupaten/Kota		Peta Sebaran Desa Tangguh Bencana		Geospasial	BPBD	Februari 2026
315	Pusdalops		Peta Sebaran Sarana Prasarana Pusdalops PB		Geospasial	BPBD	Februari 2026
316	Bidang KL		Peta Sebaran Tim Reaksi Cepat		Geospasial	BPBD	Februari 2026
317	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0128	Peta Risiko Bencana Banjir skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
318	UU 25/2004 ;	07.05.0140	Peta Risiko Bencana Tsunami skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
319	UU 25/2004 ;	07.05.0139	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
320	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0135	Peta Risiko Bencana Kekeringan skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
321	UU 25/2004 ;	07.05.0136	Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
322	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0132	Peta Risiko Bencana Gempabumi skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
323	UU 25/2004 ;	07.05.0131	Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
324	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0130	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
325	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0127	Peta Risiko Bencana Banjir Bandang skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
326	UU 25/2004 SK KaBIG 16/2023 ;	07.05.0133	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
327	UU 25/2004 ;	07.05.0137	Peta Risiko Bencana Likuefaksi skala 1:250.000		Geospasial	BPBD	Februari 2026
328			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Longsor	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026
329			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Banjir	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026
330			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Angin Topan	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
331			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gempa Bumi	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026
332			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gelombang Pasang	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Statistik	BPBD	Februari 2026
333			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Gagal Teknologi	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	Statistik	BPBD	Februari 2026
334			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Tenggelam	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026
335			Jumlah wilayah Desa/Kelurahan yang ber potensi terjadi bencana Tsunami	Katalog Daerah Rawan Bencana Provinsi kalimantan Timur	Statistik	BPBD	Februari 2026
336			Penurunan atau hilangnya kualitas dan fungsi suatu area akibat kejadian Tanah Longsor		Statistik	BPBD	Februari 2026
337			Penurunan atau hilangnya kualitas dan fungsi suatu area akibat kejadian Banjir		Statistik	BPBD	Februari 2026
338	Dokumen KRB/Katalog DRB		Jumlah Kawasan Rawan Karhutla	Desa/Kelurahan	Statistik	BPBD	Februari 2026
339			Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Kebakaran	Unit	Statistik	BPBD	Februari 2026
340			Kerusakan Kawasan Akibat Bencana Gempa Bumi	Unit	Statistik	BPBD	Februari 2026
341			Frekuensi Terjadinya Bencana Longsor	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
342			Frekuensi Terjadinya Bencana Banjir	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
343			Frekuensi Terjadinya Bencana Angin Topan/Putting Beliung	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
344			Frekuensi Terjadinya Bencana Kebakaran	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
345			Frekuensi Terjadinya Bencana Gempa Bumi	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
346			Frekuensi Terjadinya Bencana Gelombang Pasang	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
347			Frekuensi Terjadinya Bencana Gagal Teknologi	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
348			Frekuensi Terjadinya Bencana Konflik	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
349			Frekuensi Terjadinya Bencana Tenggelam	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
350			Frekuensi Terjadinya Bencana Kebakaran Hutan & Lahan	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
351			Frekuensi Terjadinya Bencana Lain-Lain	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
352			Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
353			Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
354			Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
355			Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
356			Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Konflik	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
357			Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana	Kabupaten	Statistik	BPBD	Februari 2026
358			Jumlah Kota Lokasi Bencana	Kota	Statistik	BPBD	Februari 2026
359			Jumlah Pengungsi Yang Telah Kembali	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
360			Jumlah Korban bencana Alam	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
361			Jumlah Korban bencana Alam	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
362			Jumlah Korban bencana Alam Luka-	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
363			Jumlah Lokasi Bencana	Kab/Kota	Statistik	BPBD	Februari 2026
364			Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	Kecamatan	Statistik	BPBD	Februari 2026
365			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
366			Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
367	SK JITUPASNA/R3P		Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
368			Cakupan Pelayanan Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
369			Jumlah kejadian bencana kebakaran yang terjadi di wilayah Prov. Kaltim	Kali	Statistik	BPBD	Februari 2026
370	Dokumen Renstra BPBD		Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah	Kabupaten / Kota	Statistik	BPBD	Februari 2026
371	Dokumen JITUPASNA /R3P		Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana	Rp.	Statistik	BPBD	Februari 2026
372	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang memuat Strategis, arah kebijakan dan program penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik Prov.Kaltim	Dokumen	Statistik	BPBD	Februari 2026
373			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)		Statistik	BPBD	Februari 2026
374	Pusdalops		Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Iklim serta Kebencanaan	Data Informasi	Statistik	BPBD	Februari 2026
375	Dokumen Renstra BPBD, Dokumen KRB, RPB, Renkon		Proporsi Pemerintah Kota Yang Memiliki Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana	Dokumen	Statistik	BPBD	Februari 2026
376	Dokumen Renstra BPBD, Provinsi, Kabupaten/Kota		Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana Nasional	Dokumen Renstra BPBD	Statistik	BPBD	Februari 2026
377	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi, Kabupaten/Kota		Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi Nasional penanggulangan bencana	Dokumen Rencana Penanggulan gan Bencana (RPB)	Statistik	BPBD	Februari 2026
378	Dokumen JITUPASNA /R3P		Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
379	Dokumen JITUPASNA /R3P		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	Rp.	Statistik	BPBD	Februari 2026
380	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)		Jumlah daerah rawan Risiko Bencana	Dokumen	Statistik	BPBD	Februari 2026
381	Dokumen Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	Unit	Statistik	BPBD	Februari 2026
382	Dokumen Desa tangguh Bencana (DESTANA)		Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Dokumen	Statistik	BPBD	Februari 2026
383	Dokumen JITUPASNA /R3P		Jumlah orang yang terfasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
384			Jumlah peserta tim reaksi cepat (TRC) yang mendapat pembekalan	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
385			Respon cepat penanggulangan bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
386	Dokumen / Laporan		Jumlah korban bencana penerima logistik penanggulangan bencana	orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
387	RKPD 2025		Persentase Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
388			Pengembangan aplikasi informasi kebencanaan		Statistik	BPBD	Februari 2026
389			Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
390	RKPD 2025/Dokumen JITUPASNA /R3P		Persentase Pemulihan Pasca Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
391	RKPD 2025		Persentase Penanganan Pra Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
392	RPJMD 2025-2029		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
393	RPJMD 2025-2029		Indeks Ketahanan Daerah	Poin	Statistik	BPBD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
394	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.b.2*	Persentase pemerintah daerah atau kabupaten/kota yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
395	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
396	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.b.2*	Jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menerapkan strategi bencana nasional	Dokumen Renstra BPBD	Statistik	BPBD	Februari 2026
397	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
398	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat bencana	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
399	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.5.1*	Jumlah korban mengungsi akibat bencana	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
400	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung pada kota terdampak bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
401	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.1*	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
402	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.06-01.01	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan	Persen	Statistik	BPBD	Februari 2026
403	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.03-01.02	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	Persen	Statistik	BPBD	Februari 2026
404	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.01-01.01	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat	Layanan	Statistik	BPBD	Februari 2026
405	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.02-01.02	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	Sistem	Statistik	BPBD	Februari 2026
406	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.07-01.02	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	Kelompok	Statistik	BPBD	Februari 2026
407	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.03-01.01	Jumlah kab/kota yang memiliki standar minimal peralatan dan logistik kebencanaan	Kab/Kota	Statistik	BPBD	Februari 2026
408		06.02.01.04-01.02	Jumlah dokumen kajian risiko di kawasan rawan bencana dan pascabencana	Dokumen	Statistik	BPBD	Februari 2026
409	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.00-01.03	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Skor	Statistik	BPBD	Februari 2026
410	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Indeks Ketahanan Daerah	Skor	Statistik	BPBD	Februari 2026
411	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.06-01.02	Indeks Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana	Skor	Statistik	BPBD	Februari 2026
412	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.07-01.03	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiantaman bencana	Lokasi	Statistik	BPBD	Februari 2026
413	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.01-01.02	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan	Kegiatan	Statistik	BPBD	Februari 2026
414	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.02.01.01-01.03	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	Kegiatan	Statistik	BPBD	Februari 2026
415	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomis langsung diakibatkan rusak dan hancurnya infrastruktur vital akibat bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
416	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.2*	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	Statistik	BPBD	Februari 2026
417	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024/Dokumen RENSTRA/Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur	1.5.3*	Jumlah rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030		Statistik	BPBD	Februari 2026
418	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.2*	Jumlah kerugian langsung bidang pertanian akibat bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
419	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.1*	Jumlah korban meninggal dan hilang akibat bencana per 100.000 orang	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026
420	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.1*	Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang	Orang	Statistik	BPBD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
421	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	1.5.1*	Jumlah korban hilang akibat bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
422	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024/ Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana		Statistik	BPBD	Februari 2026
423	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kerugian nominal akibat bencana alam	Miliar Rupiah	Statistik	BPBD	Februari 2026
424	RPJPD 2025-2045		Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	Statistik	BPBD	Februari 2026
425	RPJPD 2025-2045		Indeks Risiko Bencana Kumulatif	indeks	Statistik	BPBD	Februari 2026
426	RPJPD 2025-2045		Indeks Risiko Bencana Tahunan	indeks	Statistik	BPBD	Februari 2026
427	Daftar Data Lemhannas	1.6.3.1	Jumlah curah hujan dalam satu tahun	mm/tahun	Statistik	BPBD	Februari 2026
428	Daftar Data Lemhannas	1.7.3.1	Jumlah kabupaten/kota kejadian gempa > 5 SR per periode waktu	kab/kota	Statistik	BPBD	Februari 2026
429	Daftar Data Lemhannas	1.7.4.1	Jumlah kecamatan yang mengalami bencana kebakaran (hutan)	buah	Statistik	BPBD	Februari 2026
430	Daftar Data Lemhannas	1.7.5.1	Jumlah kecamatan yang mengalami bencana banjir	buah	Statistik	BPBD	Februari 2026
431	Daftar Data Lemhannas	4.6.5.1	Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai lembaga tanggap darurat (kebencanaan) dalam pemerintahan	unit	Statistik	BPBD	Februari 2026
432	RPJMD 2025-2029		Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
433	RPJMD 2025-2029		cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Statistik	BPBD	Februari 2026
434	RPJMN 2025-2029 ;	06.01.0034	Jumlah daerah (kabupaten/kota)	kab/kota	Statistik	Bappeda	Februari 2026
435			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		Statistik	Bappeda	Februari 2026
436	RKPD 2025		Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
437	RKPD 2025		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
438	RKPD 2025		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
439	RKPD 2025		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
440	RKPD 2025		Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
441	Daftar Data Lemhannas	5.2.3.2	Jumlah usulan dalam Musrenbang dari daerah	usulan	Statistik	Bappeda	Februari 2026
442	Daftar Data Lemhannas	5.2.3.3	Jumlah anggaran yang diusulkan daerah dalam Musrenbang yang ditampung oleh pusat	Rp	Statistik	Bappeda	Februari 2026
443	Daftar Data Lemhannas	5.2.3.4	Jumlah anggaran yang diusulkan daerah dalam Musrenbang	Rp	Statistik	Bappeda	Februari 2026
444	Daftar Data Lemhannas	5.2.3.1	Jumlah usulan dalam Musrenbang dari daerah yang ditampung oleh pusat	usulan	Statistik	Bappeda	Februari 2026
445	Daftar Data Lemhannas	5.2.3.5	Persentase anggaran yang diusulkan daerah dalam Musrenbang yang ditampung oleh Pusat	%	Statistik	Bappeda	Februari 2026
446	Daftar Data Lemhannas	7.3.12.1	Jumlah pengeluaran anggaran kesehatan perkapita	Rp	Statistik	Bappeda	Februari 2026
447			Peta Sebaran UPTD PPRD dan SAMSAT		Geospasial	Bapenda	Februari 2026
448			Pendapatan Daerah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
449			Pendapatan asli daerah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
450			Pajak Daerah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
451			Retribusi Daerah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
452			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
453			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
454			Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
455			Persentase Pertumbuhan PAD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
456			Pelampauan Penerimaan PAD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
457			Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
458			Dana perimbangan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
459			Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
460			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
461			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
462			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
463			Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
464			Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
465			Rasio Dana Perimbangan bn Terhadap Total Belanja APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
466			Dana Alokasi Umum	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
467			Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
468			Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
469			Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
470			Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
471			Dana Alokasi Khusus	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
472			Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
473			Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
474			Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
475			Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
476			Dana Penyesuaian (DID)	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
477			Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
478			Hibah	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
479			Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
480			Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
481			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain- Lain Pendapat	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
482			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
483			Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
484			Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
485			Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
486			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
487			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
488			Lain - Lain Pendapatan Daerah yang syah dari Pihak Ketiga	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
489			Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total Belanja APBD	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
490			Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
491			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
492			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
493			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
494			Pajak Air Permukaan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
495			Pajak Rokok	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
496			Jumlah Pajak yang dikeluarkan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
497			Retribusi Jasa Umum	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
498			Retribusi Jasa Usaha	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
499			Retribusi Perizinan Tertentu	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
500			Jumlah Pagu Dana Alokasi Khusus	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
501			Jumlah Realisasi Dana Alokasi Khusus	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
502			Jumlah Pagu Dana Alokasi Umum	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
503			Jumlah Realisasi Dana Alokasi Umum	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
504			Jumlah Pagu Dana Bagi Hasil Pajak	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
505			Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
506			Jumlah Pagu Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
507			Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
508			Jumlah Pagu Dana Perimbangan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
509			Jumlah Realisasi Dana Perimbangan	Rp Juta	Statistik	Bapenda	Februari 2026
510			Jumlah SAMSAT dan Lokasinya	Lokasi	Statistik	Bapenda	Februari 2026
511			Jumlah Mitra Kerja Kesamsatan	unit	Statistik	Bapenda	Februari 2026
512	RKPD 2025		Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
513	RKPD 2025		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
514	RKPD 2025		Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
515	RKPD 2025		Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
516			Rasio Efektifitas PAD		Statistik	Bapenda	Februari 2026
517	Daftar Data Prioritas Tahun 2024	31	Rasio Pajak terhadap PDRB	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
518	Daftar Data Lemhannas	6.16.7.1	Persentase pemasukan pajak terhadap PDRB/PDB (Tax Ratio)	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
519	Daftar Data Lemhannas	6.16.8.1	Pertumbuhan penerimaan pajak pertahun	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
520	RPJPD 2025-2045		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Statistik	Bapenda	Februari 2026
521	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	09.07.001	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	nilai	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
522			Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas	Kegiatan	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
523			Jumlah Ormas Berdasarkan Profesi	Ormas	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
524			Jumlah Ormas Berdasarkan Agama	Ormas	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
525			Jumlah Ormas	Ormas	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
526			Jumlah LSM Daerah	LSM	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
527			Jumlah LSM Asing/Internasional yang Beroperasi di Daerah	LSM	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
528			Jumlah LSM Aktif	LSM	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
529			Jumlah LSM Tidak Aktif	LSM	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
530			Jumlah LSM Terdaftar	LSM	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
531			Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
532			Jumlah Pemilih	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
533			Jumlah Pemilih Laki-Laki	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
534			Jumlah Pemilih Perempuan	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
535			Jumlah Anggota DPRD	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
536			Jumlah Anggota DPRD Pria	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
537			Jumlah Anggota DPRD Perempuan	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
538			Jumlah Fraksi DPRD	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
539			Partai Politik	partai	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
540			Jumlah Parpol Peserta Pemilu	partai	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
541	RPJMD 2025-2029		Indeks Aspek Kesetaraan dalam Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
542			Indeks Aspek Kebebasan dalam Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
543			Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia		Statistik		Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
544			Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
545			Jumlah kader bela negara	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
546			Jumlah pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	SK	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
547			Jumlah pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	SK	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
548			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkoba	Kegiatan	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
549			Jumlah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	SK	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
550			Jumlah pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	SK	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
551			Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Potensi Konflik	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
552	RKPD 2025		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
553	Daftar Data Lemhannas	4.2.3.1	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki forum kerukunan antar umat beragama	kab/kota	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
554	Daftar Data Lemhannas	4.2.6.1	Frekuensi konflik fisik antar umat beragama pada tahun terakhir (sekarang)	kali	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
555	Daftar Data Lemhannas	4.2.4.1	Frekuensi dialog antar umat beragama pada tahun terakhir (sekarang)	kali	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
556	Daftar Data Lemhannas	4.2.7.1	Frekuensi konflik fisik intra umat beragama pada tahun terakhir (sekarang)	kali	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
557	Daftar Data Lemhannas	5.4.8.1	Jumlah anggota DPRD I yang menjadi tersangka kasus pidana	orang	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
558	Daftar Data Lemhannas	5.7.4.1	Persentase anggota DPRD provinsi dari partai yang mendukung eksekutif	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
559	Daftar Data Lemhannas	5.10.3.1	Persentase dukungan masyarakat terhadap partai politik pada saat pemilu	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
560	Daftar Data Lemhannas	5.11.3.1	Persentase caleg dari pengurus/fungsionaris partai politik terhadap keseluruhan caleg	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
561	Daftar Data Lemhannas	5.15.3.1	Persentase ormas pemuda yang underbouw partai	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
562	Daftar Data Lemhannas	5.18.3.2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih di Pemilu Presiden/Wakil Presiden	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
563	Daftar Data Lemhannas	5.18.3.1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih di Pemilu Legislatif Pusat	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
564	Daftar Data Lemhannas	5.18.4.1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih di Pemilu Legislatif daerah	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
565	Daftar Data Lemhannas	5.18.4.2	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
566	Daftar Data Lemhannas	7.5.3.1	Jumlah konflik fisik masal (antar desa/kampung, suku, ormas dan kelompok masyarakat lain) yang terjadi dalam setahun terakhir	kasus	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
567	Daftar Data Lemhannas	7.5.5.1	Jumlah konflik antara pemerintah dengan masyarakat	kasus	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
568	RPJPD 2025-2045		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
569	RPJMD 2025-2029		Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
570	RPJMD 2025-2029		Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
571	RPJMD 2025-2029		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
572	RPJMD 2025-2029		Persentase kebijakan di bidang katahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Statistik	Bakesbangpol	Februari 2026
573			Peta Sebaran Menara Pemancar Telekomunikasi		Geospasial	Diskominfo	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
574			Peta Jaringan Serat Optik		Geospasial	Diskominfo	Februari 2026
575			Peta Sebaran Internet Desa		Geospasial	Diskominfo	Februari 2026
576	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.024	Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	sistem	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
577	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.062	Jumlah Peralatan Siber yang Dibutuhkan	unit	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
578	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.062	Jumlah Peralatan Siber yang Tersedia	unit	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
579	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Kategorisasi SE Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
580	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
581	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Pengelolaan Aset Informasi Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
582	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
583	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Suplemen Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
584	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
585	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Aspek Teknologi dan Keamanan Informasi Tingkat Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
586	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.031	Nilai Kematangan Penyelenggara Persandian	nilai	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
587	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.078	Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM Siber dan Sandi	persen	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
588	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.078	Total Kesenjangan Kompetensi seluruh SDM Siber dan Sandi yang Mengikuti Asesmen Kompetensi	persentase	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
589	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.078	Total SDM Siber dan Sandi yang mengikuti Asesment Kompetensi (Orang)	orang	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
590	RPJMD 2025-2029		Jumlah desa yang memiliki jaringan internet	desa	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
591			Jumlah Provider	Provider	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
592			Jumlah Pameran/EXPO	Pameran	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
593			Ibukota Kecamatan yang terlayani Jaringan Telekomunikasi	Kecamatan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
594			Jumlah Jaringan Telepon Genggam	Jaringan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
595			Jaringan Telepon (operator telp kabel)	Jaringan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
596			Desa yang Terlayaninya Jaringan Telekomunikasi	Desa	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
597			Jumlah Desa/Kelurahan blankspot	Desa/Kelurahan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
598	RPJPD 2025-2045		Indeks Literasi digital provinsi dan kabupaten/kota	indeks	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
599	RPJMD 2025-2029		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
600			Stasiun Radio	Stasiun	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
601			Website Daerah	website	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
602			Jenis Surat Kabar Lokal	Jenis	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
603			Jenis Surat Kabar Nasional	Jenis	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
604			Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk TV Lokal	Penyiaran	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
605			Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk TV Nasional	Penyiaran	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
606			Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk Radio Lokal	Penyiaran	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
607			Jumlah Penyiaran Media Elektronik Yang Masuk Radio Nasional	Penyiaran	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
608			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
609			Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
610			Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Badan Publik	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
611	RKPD 2025		Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
612	RKPD 2025		Persentase Data Yang Berkualitas Pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
613	RKPD 2025		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	tingkat	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
614	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.01.01-01.01	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G	Desa	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
615	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.01.03-01.01	Persentase K/L yang menggunakan/terhubung Jaringan Intra Pemerintah (JIP/Government Network)	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
616	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.02.00-01.02	Persentase K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
617	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.03.02-01.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Masyarakat	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
618	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.00.00.00-01.02	Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	tingkat	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
619	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.03.00-01.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	Peserta	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
620	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.03.02.01-01.01	Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar	Rumah Tangga	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
621	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.03.02.01-01.02	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan masterplan smart city	Kab/Kota	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
622	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	05.05.01.00-01.01	Jumlah total luas pemukiman yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (LPMB)	Pemukiman	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
623	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	02.07.04.10-02.05	Jumlah desa dalam satu provinsi yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	Desa	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
624	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	02.07.04.10-02.05	Persentase desa yang menerima sinyal internet telepon seluler 4G	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
625	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	17.6.1.(a)	Jumlah total pelanggan jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband)	Pelanggan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
626	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	17.6.1.(b)	Jumlah Kecamatan yang tersambung Optical Distribution Point (ODP)	Kecamatan	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
627	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.01.03.05-01.01	Indeks Kemerdekaan Pers	Skor	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
628	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.01.03.00-01.03	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional	Orang	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
629	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.01.00.00-01.04	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	Dokumen	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
630	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.01.03.00-01.01	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	Persen	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
631	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	07.01.03.01-01.01	Jumlah tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik	Dokumen	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
632	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Ketersediaan Base Transceiver Station Tower dan Akses Internet di Daerah Tertinggal	Unit	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
633	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah frekuensi radio yang belum digunakan	Frekuensi	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
634	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah lembaga penyiaran publik lokal	Lembaga	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
635	Daftar Data Lemhannas	4.7.8.3	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
636			Jumlah menara telekomunikasi BTS Kabupaten/Kota	Menara	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
637			Jumlah menara telekomunikasi BTS Kabupaten/Kota yang tidak berfungsi	Menara	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
638	RPJMD 2025-2029		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintahan daerah (survei)	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026
639	RPJMD 2025-2029		Tingkat Keamanan Informasi	%	Statistik	Diskominfo	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
640	SDGs ;		Jumlah Murid SD/Sederajat Kelas 1 dan 2 (J MSD12)	murid	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
641	SDGs ;		Jumlah Murid SD/Sederajat Kelas 1 dan 2 yang Menerima PMT (J PMTSD12)	murid	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
642	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	802,002	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
643	RPJMN 2025-2029 ;	802,012	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
644	RPJMN 2025-2029 ;	802,012	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Terverval	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
645	RPJMN 2025-2029 ;	802,004	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	kegiatan	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
646	RPJMN 2025-2029 ;	802,004	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan internasional	festival dan pameran seni budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
647	RPJMN 2025-2029 ;	802,004	Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
648	RPJMN 2025-2029 ;	802,005	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Film	karya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
649	RPJMN 2025-2029 ;	802,005	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Karya Seni Budaya Bidang Bahasa dan Sastra	karya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
650	RPJMN 2025-2029 ;	802,005	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Karya Seni Budaya Bidang Musik	karya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
651	RPJMN 2025-2029 ;	802,005	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Seni Pertunjukan dan Teater	karya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
652	RPJMN 2025-2029 ;	802,005	Jumlah Karya Seni Budaya yang Memperoleh Rekognisi bidang Seni Rupa dan Kriya	karya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
653	RPJMN 2025-2029 ;	802,008	Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
654	RPJMN 2025-2029 ;	802,013	Jumlah Usulan yang Diakomodasi	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
655	RPJMN 2025-2029 ;	802,013	Jumlah Usulan yang Diverifikasi	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
656	RPJMN 2025-2029 ;	802,009	Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
657	RPJMN 2025-2029 ;	802,010	Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan	wilayah	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
658	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	802,002	Nilai Dimensi Warisan Budaya pada Pembangunan Kebudayaan	persentase	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
659	RPJMN 2025-2029 ;	802,012	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
660	RPJMN 2025-2029 ;	802,013	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
661	RPJMN 2025-2029 ;	802,018	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
662	RPJMN 2025-2029 ;	402,054	Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
663	RPJMN 2025-2029 ;	802,020	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
664	RPJMD 2025-2029		Jumlah siswa penerima manfaat gratispol SMA/SMK/SLB	siswa	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
665	RPJMD 2025-2029		Jumlah peserta didik SMA/SMK/MA dan SLB yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	siswa	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
666			Rasio Guru dengan Murid	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
667			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
668			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
669			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
670			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
671			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
672			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
673			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
674			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
675			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
676			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
677			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
678			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
679			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
680			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
681			Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SLB Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
682			Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
683			Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar per kelas rata-rata	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
684			Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
685			Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah per kelas rata-rata	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
686			Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
687			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
688			Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
689			Jumlah TK Negeri	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
690			Jumlah TK Swasta	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
691			Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
692			Jumlah SLB Negeri (SLBN)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
693			Jumlah SLB Swasta (SLBS)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
694			Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
695			Jumlah SD Negeri (SDN)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
696			Jumlah SD Swasta	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
697			Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
698			Jumlah SMP Negeri (SMPN)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
699			Jumlah SMP Swasta	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
700			Jumlah Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
701			Jumlah SMA Negeri (SMA)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
702			Jumlah SMA Swasta	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
703			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
704			Jumlah SMK Negeri	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
705			Jumlah SMK Swasta	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
706			Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
707			Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
708			Rasio Ketersediaan SD Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
709			Rasio Ketersediaan SMP Terhadap Pendidikan Usia Sekolah Pendidikan Dasar	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
710			Rasio Murid Terhadap Sekolah SD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
711			Rasio Murid Terhadap Sekolah SD Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
712			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMP Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
713			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMP Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
714			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMA Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
715			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMA Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
716			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMK Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
717			Rasio Murid Terhadap Sekolah SMK Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
718			Rasio Murid Terhadap Sekolah SLB Negeri	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
719			Rasio Murid Terhadap Sekolah SLB Swasta	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
720			Jumlah Ruang Kelas TK dan Sejenisnya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
721			Jumlah Ruang Kelas SD dan Sejenisnya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
722			Jumlah Ruang Kelas SMP dan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
723			Jumlah Ruang Kelas SMA dan Sejenisnya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
724			Jumlah Ruang Kelas SMK dan Sejenisnya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
725			Jumlah Ruang Kelas SLB dan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
726			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
727			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Ringan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
728			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Sedang	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
729			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rusak Berat	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
730			Jumlah Ruang Laboratorium	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
731			Jumlah Ruang Laboratorium Rusak Ringan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
732			Jumlah Ruang Laboratorium Rusak Sedang	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
733			Jumlah Ruang Laboratorium Rusak	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
734			Jumlah Ruang Praktik Siswa	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
735			Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Ringan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
736			Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Sedang	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
737			Jumlah Ruang Praktik Siswa Rusak Berat	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
738			Jumlah Siswa PAUD	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
739			Jumlah Siswa Taman Kanak- Kanak	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
740			Jumlah Siswa TK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
741			Jumlah Siswa TK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
742			Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
743			Jumlah Siswa SLB Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
744			Jumlah Siswa SLB Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
745			Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
746			Jumlah Siswa SD Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
747			Jumlah Siswa SD Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
748			Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
749			Jumlah Siswa SMP Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
750			Jumlah Siswa SMP Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
751			Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
752			Jumlah Siswa SMA Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
753			Jumlah Siswa SMA Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
754			Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
755			Jumlah Siswa SMK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
756			Jumlah Siswa SMK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
757			Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
758			Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
759			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
760			Jumlah Siswa SD/MI Yang Mengikuti Ujian	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
761			Persentase Angka Kelulusan SMP/MTS	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
762			Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
763			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
764			Jumlah Siswa SMP/MTs Yang Mengikuti Ujian	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
765			Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
766			Jumlah lulusan pada jenjang SMA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
767			Jumlah lulusan pada jenjang SMK	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
768			Jumlah lulusan pada jenjang SLB	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
769			Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
770			Jumlah Siswa SMA/SMK/MA Yang Mengikuti Ujian	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
771			Jumlah Guru Taman Kanak- Kanak (TK)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
772			Jumlah Guru TK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
773			Jumlah Guru TK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
774			Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
775			Jumlah Guru SLB Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
776			Jumlah Guru SLB Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
777			Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
778			Jumlah Guru SDN Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
779			Jumlah Guru SDN Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
780			Persentase Pemenuhan Jumlah guru SD yang diperlukan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
781			Persentase Kualifikasi guru SD yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
782			Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
783			Jumlah Guru SMP Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
784			Jumlah Guru SMP Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
785			Pemenuhan Jumlah guru SMP yang diperlukan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
786			Prosentase Kualifikasi guru SMP yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
787			Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
788			Jumlah Guru SMA Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
789			Jumlah Guru SMA Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
790			Pemenuhan Jumlah guru SMA yang diperlukan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
791			Prosentase Kualifikasi guru SMA yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
792			Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
793			Jumlah Guru SMK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
794			Jumlah Guru SMK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
795			Pemenuhan Jumlah guru SMK yang diperlukan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
796			Prosentase Kualifikasi guru SMK yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
797			Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
798			Jumlah Guru SLB Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
799			Jumlah Guru SLB Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
800			Pemenuhan Jumlah guru SLB yang diperlukan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
801			Prosentase Kualifikasi guru SLB yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
802			Jumlah Guru P3K SMA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
803			Jumlah Guru P3K SMK	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
804			Jumlah Guru P3K SLB	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
805			Jumlah Guru Sekolah Pendidikan Dasar Per Kelas	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
806			Jumlah Guru Sekolah Pendidikan Menengah Per Kelas	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
807			Jumlah Kepala Sekolah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
808			Jumlah Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
809			Jumlah Kepala Sekolah TK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
810			Jumlah Kepala Sekolah TK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
811			Jumlah Kepala Sekolah SLB (Sekolah Luar Biasa)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
812			Jumlah Kepala Sekolah SLB Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
813			Jumlah Kepala Sekolah SLB Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
814			Jumlah Kepala Sekolah SD (Sekolah Dasar)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
815			Jumlah Kepala Sekolah SD Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
816			Jumlah Kepala Sekolah SD Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
817			Jumlah Kepala Sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
818			Jumlah Kepala Sekolah SMP Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
819			Jumlah Kepala Sekolah SMP Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
820			Jumlah Kepala Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
821			Jumlah Kepala Sekolah SMA Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
822			Jumlah Kepala Sekolah SMA Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
823			Jumlah Kepala Sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
824			Jumlah Kepala Sekolah SMK Negeri	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
825			Jumlah Kepala Sekolah SMK Swasta	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
826			Angka Melek Huruf	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
827			Angka melanjutkan Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
828			Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
829			Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
830			Angka melanjutkan Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
831			Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
832			Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
833			Angka Melanjutkan Jenjang SMA/SMK/(MA*) ke Perguruan Tinggi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
834			Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
835			Angka Melanjutkan Jenjang SMK ke Perguruan Tinggi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
836			Jumlah lulusan pada jenjang SMK	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
837			Jumlah lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi di Kaltim	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
838			Jumlah Siswa Miskin Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
839			Jumlah Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
840			Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
841			Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
842			Jumlah Guru SMA/MA yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
843			Jumlah Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
844			Jumlah Guru SLB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
845			Rasio Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
846			Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/MI	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
847			Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket A	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
848			Peserta paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MTs	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
849			Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket B	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
850			Peserta paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMK	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
851			Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan Program Paket C	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
852			Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program TK/RA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
853			TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
854			Jumlah anak 0 - 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
855			Jumlah Anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAU	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
856			Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SD/MI	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
857			Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMP/MTs/Sederajat	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
858			Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMA/MA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
859			Jumlah Lulusan Yang Melanjutkan Ke SMK	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
860			Jumlah Siswa Kelas VI pada SD/MI	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
861			Jumlah Siswa Kelas IX pada SMP/MTs	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
862			Jumlah Siswa Kelas XII pada SMA/MA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
863			Jumlah Siswa Kelas XII pada SMK	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
864			Jumlah Lulusan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
865			Rasio Angka Kelulusan SD/MI	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
866			Rasio Angka Kelulusan SMP/MTS	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
867			Rasio Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
868			Jumlah Group kesenian	Sanggar	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
869			Rasio Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
870			Jumlah Gedung kesenian	Gedung	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
871			Rasio Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
872			Museum dan Pusat Kebudayaan	Museum	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
873			Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
874			Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
875			Benda cagar budaya yang dilestarikan	Benda Cagar Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
876			Situs cagar budaya yang dilestarikan	Situs	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
877			Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan Cagar Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
878			Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	Cagar Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
879			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
880			Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
881			Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim	Seni dan Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
882			Jumlah Monumen Sejarah	Monumen Cagar Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
883			Upacara Adat	Upacara Adat	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
884			Upacara Tradisi	Upacara Tradisi atau Ritus	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
885			Jenis Busana Tradisional	Busana	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
886			Lembaga Budaya	Lembaga	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
887			Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
888			Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
889			Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
890			Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
891			Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
892			Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
893			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Listrik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
894			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Internet untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
895			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Komputer untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
896			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
897			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Air minum layak	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
898			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
899			Proporsi Sekolah yang memiliki Akses Fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
900			Persentase SD berakreditasi minimal B.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
901			Jumlah SD berakreditasi minimal B	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
902			Persentase SMP berakreditasi minimal B.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
903			Jumlah SMP berakreditasi minimal B	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
904			Persentase SMA berakreditasi minimal B.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
905			Jumlah SMA berakreditasi minimal B	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
906			Rasio APM SD/MI/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
907			Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
908			Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
909			Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
910			Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
911			Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
912			Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
913			Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
914			Proporsi anak-anak dan remaja di (a) kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
915			Proporsi anak-anak dan remaja di (b) kelas 8, yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
916			Proporsi anak-anak dan remaja di (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
917			Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
918			Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
919			Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
920			Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
921			Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
922			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Umum/Sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
923			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
924			Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
925			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1a) SD/MI/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
926			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (1b)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
927			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (1d4)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
928			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2a) SMP/MTs/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
929			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (2b)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
930			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (2d)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
931			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3a) SMA/SMK/MA/ sederajat	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
932			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat Pedesaan dan Perkotaan (3b)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
933			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat antara Disabilitas dan Tanpa Disabilitas (3d)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
934			Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
935			Proporsi sekolah SD/MI/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
936			Proporsi sekolah SMP/MTS/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
937			Proporsi sekolah SMA/SMK/MA/Sederajat dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
938			Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SD atau sederajat)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
939			Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMP atau sederajat)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
940			Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir (di tingkat SMA/SMK atau sederajat)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
941			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (1. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
942			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional menurut jenjang pendidikan (2. Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
943			Jumlah Desa Budaya	Desa	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
944			Lulusan SMK tersertifikasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
945			P1 (elemen dasar uji kompetensi siswa sebelum lulus)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
946			P2 (sertifikasi uji kompetensi)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
947			P3 (konsentrasi profesi)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
948			Guru yang sudah memiliki sertifikat penguji	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
949			Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
950			Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
951			Jumlah peserta didik jenjangsekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapandasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
952			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
953			Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
954			Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
955			Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
956			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
957			Jumlah Sekolah yang mengembangkan Ekstrakurikuler Berbasis Agama	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
958			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
959			Jumlah SMK yang memiliki jurusan sesuai kebutuhan pasar/Jumlah SMK yang bekerja sama dengan dunia usaha dan industri	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
960			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
961			Harapan Lama Sekolah	Tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
962			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
963			Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
964			Meningkatnya kualitas pendidikan melalui sistem pendidikan jarak jauh berbasis internet	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
965			Persentase pelayanan pendidikan luar biasa	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
966			Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
967			Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
968			Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
969			Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
970			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
971			Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
972			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
973			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
974			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
975			Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
976			Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
977			Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
978			Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
979			Persentase Lembaga Sejarah yang	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
980			Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
981			Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
982			Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
983			Persentase Pengelolaan Permuseuman	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
984			Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga Olimpik yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
985			Persentase olahragawan andalan nasional pada cabang olahraga PON yang merupakan alumni PPLP dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
986			Persentase olahragawan Olimpik dan Paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
987			Persentase olahragawan PON dan PEPARNAS di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
988			Sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA)		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
989			Sebaran cagar budaya		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
990			Unit sekolah baru	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
991			Sebaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
992			Sebaran Sekolah Luar Biasa (SLB)		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
993			Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
994			Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
995			Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum yang berlaku	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
996			Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
997			Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
998			Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
999			Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1000			Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1001			Jumlah penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1002			Jumlah benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1003			Jumlah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan	Warisan Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1004			Jumlah registrasi warisan budaya takbenda	Warisan Budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1005			Jumlah registrasi benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1006			Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin yang masih bersekolah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1007			Angka Kesiapan Sekolah	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1008			Jumlah anak tidak sekolah pada SMA/ sederajat dikarenakan putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1009			Nilai Dimensi Warisan Budaya		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1010			Nilai Dimensi Ekspresi Budaya		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1011			Nilai Dimensi Ekonomi Budaya		Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1012			Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1013			Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1014			Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1015			Jumlah pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1016			Jumlah pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1017			Jumlah pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1018			Jumlah pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1019			Jumlah pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1020			Jumlah pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1021			Jumlah pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1022			Jumlah pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1023			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1024			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1025			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1026			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1027			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1028			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1029			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas listrik	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1030			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas listrik	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1031			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas listrik	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1032			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas listrik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1033			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas listrik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1034			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas listrik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1035			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1036			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1037			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1038			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1039			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1040			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas komputer untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1041			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1042			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1043			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1044			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1045			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1046			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas internet untuk tujuan pengajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1047			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1048			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1049			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1050			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1051			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1052			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1053			Jumlah SMA yang memiliki fasilitas air minum layak	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1054			Jumlah SMK yang memiliki fasilitas air minum layak	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1055			Jumlah SLB yang memiliki fasilitas air minum layak	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1056			Proporsi SMA yang memiliki fasilitas air minum layak	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1057			Proporsi SMK yang memiliki fasilitas air minum layak	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1058			Proporsi SLB yang memiliki fasilitas air minum layak	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1059			Persentase pendidik TK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1060			Persentase pendidik SMA dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1061			Persentase pendidik SMK dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1062			Persentase pendidik SLB dengan kualifikasi pendidikan minimal D4/S1	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1063			Persentase pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1064			Persentase pendidik SMA yang memiliki sertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1065			Persentase pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1066			Persentase pendidik SLB yang memiliki sertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1067			Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek numerasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1068			Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek literasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1069			Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek numerasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1070			Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek literasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1071			Jumlah kab/kota yang difasilitasi dana transfer daerah bidang pendidikan	Kab/Kota	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1072			Proporsi anak-anak dan remaja di: (a) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1073			Nilai Budaya Literasi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1074			Jumlah wilayah adat yang dikembangkan menjadi ruang interaksi pemajuan kebudayaan	Wilayah	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1075			Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan PAUD-HI	Kab/Kota	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1076			Jumlah provinsi memenuhi SPM pendidikan	Provinsi	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1077			Jumlah produksi film, musik, dan media baru	Produksi	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1078			Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1079			Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1080			Rata-Rata Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1081			Jumlah partisipasi pada misi dan karavan budaya tingkat dunia	Partisipasi	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1082			Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarannya	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1083			Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Kosakata	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1084			Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1085			Jumlah guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang mendapatkan tunjangan atau insentif tepat waktu	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1086			Jumlah event prioritas bidang kebudayaan yang dilaksanakan	Event	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1087			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1088			Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1089			Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan Asesmen Nasional	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1090			Persentase satuan pendidikan terlayani internet untuk tujuan menunjang pembelajaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1091			Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mengimplementasikan materi untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada satuan Pendidikan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1092			Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1093			Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1094			Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1095			Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan	Kab/Kota	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1096			Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh peningkatan kapasitas dan sertifikasi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1097			Jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1098			Indeks Pemerataan Guru	indeks	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1099			Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1100			Jumlah kesepakatan kerja sama antara industri/swasta dengan satuan pendidikan vokasi	Kerjasama	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1101			Jumlah SMK yang mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1102			Jumlah pendidik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi Vokasi, dan kursus/pelatihan yang mendapatkan pelatihan bidang pendidikan	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1103			Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1104			Jumlah guru di sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan status kepegawaian	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1105			Jumlah penyandang kebutuhan khusus yang masih sekolah	Orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1106			Jumlah satuan pendidikan formal/ non formal yang sudah menerapkan materi ajar kewirausahaan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1107			Jumlah sekolah luar biasa (SLB) berdasarkan layanan pendidikan	Unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1108			Frekuensi menyanyikan lagu-lagu nasional terutama lagu kebangsaan Indonesia Raya di lingkungan sekolah dalam tahun terakhir	kali	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1109			Persentase kecamatan yang memiliki SLTP	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1110			Persentase anak putus sekolah usia 7-12 tahun untuk SD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1111			Persentase anak putus sekolah usia 13-15 tahun untuk SLTP	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1112			Persentase anak putus sekolah usia 16-18 tahun untuk SLTA	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1113			Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh oleh penduduk	tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1114			Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1115			Persentase pengeluaran anggaran pendidikan terhadap pengeluaran Rumah Tangga	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1116			Jumlah SD yang terakreditasi C	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1117			Jumlah SD yang terakreditasi A	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1118			Jumlah SD yang terakreditasi B	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1119			Jumlah SLTP yang terakreditasi C	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1120			Jumlah SLTP yang terakreditasi A	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1121			Jumlah SLTP yang terakreditasi B	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1122			Jumlah SLTA yang terakreditasi B	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1123			Jumlah SLTA yang terakreditasi C	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1124			Jumlah SLTA yang terakreditasi A	unit	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1125			Jumlah budaya lokal yang sudah diinventarisasi	budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1126			Jumlah budaya lokal yang ada	budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1127			Jumlah budaya lokal yang ada	budaya	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1128			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1129			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1130			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1131			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1132			Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1133			Harapan Lama Sekolah	tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1134			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	indeks	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1135			Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1136			Persentase satuan pendidik yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1137			Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1138			Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1139			Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1140			Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan budaya	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1141			Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1142			Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1143			Persentase kunjungan wisatawan ke museum	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1144			Persentase pelaku industri perfilman yang tervalidasi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1145			Angka Numerasi	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1146			Kemampuan literasi SMA	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1147			Kemampuan numerasi SMA	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1148			Indeks iklim keamanan SMA	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1149			Indeks iklim kebinekaan SMA	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1150			Indeks iklim inklusivitas SMA	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1151			Kemampuan literasi SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1152			Kemampuan numerasi SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1153			Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1154			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1155			Indeks iklim keamanan SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1156			Indeks iklim kebinekaan SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1157			Indeks iklim inklusivitas SMK	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1158			Kemampuan literasi SDLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1159			Kemampuan numerasi SDLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1160			Indeks iklim keamanan SDLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1161			Indeks iklim kebinekaan SDLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1162			Indeks iklim inklusivitas SDLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1163			Kemampuan literasi SMPLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1164			Kemampuan numerasi SMPLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1165			Indeks iklim keamanan SMPLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1166			Indeks iklim kebinekaan SMPLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1167			Indeks iklim inklusivitas SMPLB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1168			Kemampuan literasi SMALB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1169			Kemampuan numerasi SMALB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1170			Indeks iklim keamanan SMALB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1171			Indeks iklim kebinekaan SMALB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1172			Indeks iklim inklusivitas SMALB	Nilai	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1173			Angka Anak Tidak Sekolah	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1174			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1175			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1176			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1177			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ sederajat	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1178			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1179			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1180			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Disabilitas dan non-Disabilitas	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1181			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1182			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perempuan dan Laki-laki	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1183			Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Sederajat antara Penduduk Perdesaan dan Perkotaan	persen	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1184			Indeks Pemerataan Guru	indeks	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1185			Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1186			Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD	%	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1187			Angka Anak Tidak Sekolah	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1188			Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1189			Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1190			Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1191			Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1192			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	orang	Statistik	Disdikbud	Februari 2026
1193	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	06.02.0057	Total Angkatan Kerja	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1194	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1195	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1196	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Angkatan Kerja Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1197	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Fesyen dan Kriya	ribu orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1198	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Kuliner	ribu orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1199	SDGs ;		Adanya strategi nasional terkait ketenagakerjaan pemuda yang sudah dikembangkan dan operasional sebagai strategi khusus atau sebagai bagian dari strategi ketenagakerjaan nasional	dokumen	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1200	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1201	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.006	Jumlah Kebijakan yang Spesifik Mendukung Pekerjaan Hijau/Green Jobs	kebijakan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1202	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kerja Sama yang Melibatkan Asosiasi dan DUDIKA dalam Pengembangan Pekerjaan Hijau/Green Jobs	kerja sama	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1203	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun Anggaran	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1204	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1205	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Struktur Skala Upah	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1206	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1207	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.016	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan	perusahaan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1208	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1209	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1210	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Pekerjaan Hijau/Green Jobs yang Ditetapkan	dokumen	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1211	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Tenaga Kerja yang Dikembangkan Kompetensi Hijaunya	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1212	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1213	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	06.02.023	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	Terbuka	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1214	SDGs ;	06.02.024	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan pembagian kelompok umur berdasarkan International Conference of Labour Statisticians	Terbuka	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1215	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	06.02.0046	Jumlah Total Individu di Posisi Manajerial (JTMP)	Terbuka	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1216			Pencari Kerja yang mendaftar	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1217			Pencari Kerja yang mendaftar Laki-Laki	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1218			Pencari Kerja yang mendaftar Perempuan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1219			Pencari Kerja Ditempatkan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1220			Pencari Kerja Ditempatkan Laki-Laki	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1221			Pencari Kerja Ditempatkan Perempuan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1222	RKPD 2025		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1223			Persentase Pencari Kerja Ditempatkan Laki-Laki	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1224			Persentase Pencari Kerja Ditempatkan Perempuan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1225			Pencari Kerja yang Belum ditempatkan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1226			Pencari Kerja yang Belum ditempatkan Laki – Laki	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1227			Pencari Kerja yang Belum ditempatkan Perempuan	orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1228			Jumlah Perusahaan Terdaftar		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1229			Upah Minimum Provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1230			Upah Minimum (UMK) per Kabupaten/Kota		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1231			Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1232			Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1233			Jumlah Tenaga Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1234			Jumlah Tenaga Kerja Laki-Laki		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1235			Jumlah Tenaga Kerja Perempuan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1236			Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1237			Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Laki-Laki		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1238			Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Perempuan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1239			Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1240			Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1241			Produktivitas Tenaga Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1242			Jumlah Peserta Pelatihan BLK		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1243			Jumlah Peserta Pelatihan BLK Laki – Laki		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1244			Jumlah Peserta Pelatihan BLK Perempuan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1245			Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1246			Jumlah Peserta Laki – Laki Pelatihan BLK Yang Ditempatkan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1247			Jumlah Peserta Perempuan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1248			Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1249			Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan Laki – Laki		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1250			Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan Perempuan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1251			Jumlah transmigrasi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1252			Jumlah Kawasan Transmigrasi	Kawasan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1253			Luas Wilayah Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Hektar	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1254			Pengantar Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1255			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1256			Jumlah Kasus Hubungan Industrial		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1257			Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1258			Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1259			Pengawasan Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1260			Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1261			Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1262			Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1263			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1264			Proporsi peserta Laki – Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1265			Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1266			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1267			Proporsi peserta Laki-Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1268			Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1269			Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1270			Data Tenaga Kerja Tersertifikasi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1271			Data Tenaga Kerja Laki – Laki Tersertifikasi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1272			Data Tenaga Kerja Perempuan Tersertifikasi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1273			Data Lembaga Pelatihan Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1274			Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1275			Data Peserta Laki – Laki Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1276			Data Peserta Perempuan Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1277			Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1278			Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1279			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1280			Persentase Tenaga Kerja Laki – Laki Bersertifikat Kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1281			Persentase Tenaga Kerja Perempuan Bersertifikat Kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1282			Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1283			Persentase instruktur Laki – Laki bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1284			Persentase instruktur Perempuan bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1285			Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1286			Persentase lulusan bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1287			Persentase lulusan Laki – Laki bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1288			Persentase lulusan Perempuan bersertifikat kompetensi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1289			Persentase penyerapan lulusan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1290			Persentase LPK yang terakreditasi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1291			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1292			Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1293			Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1294			Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1295			Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1296			Jumlah pejabat Laki – Laki fungsional pengantar kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1297			Jumlah pejabat Perempuan fungsional pengantar kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1298			Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1299			Data Lembaga K3		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1300			Data Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1301			Data Perusahaan yang Disidik		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1302			Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1303			Jumlah perusahaan yang mendapatkan uji K3		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1304			Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1305			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1306			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1307			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1308			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1309			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1310			Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1311			Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1312			Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1313	RPJMD 2025-2029		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1314			Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1315			Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1316			Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1317			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1318			Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1319			Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1320			Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1321			Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1322			Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1323			Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1324			Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1325			Jumlah perselisihan kepentingan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1326			Jumlah perselisihan hak		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1327			Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1328			Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1329			Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1330			Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1331			Jumlah Pekerja Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1332			Jumlah Pekerja Laki – Laki Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1333			Jumlah Pekerja Perempuan Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1334			Persentase Pekerja Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1335			Persentase Pekerja Laki – Laki Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1336			Persentase Pekerja Perempuan Rentan Di Kaltim		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1337			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1338			Persentase Kabupaten/Kota Yang Telah Dibina Untuk Penyusunan Rencana Tenaga Kerja(RTK)	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1339			Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1340			Peningkatan Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja dan Norma K3		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1341			Jumlah Kawasan Transmigrasi Baru Yang Difasilitasi Penetapannya		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1342			Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembinaannya		Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1343	RKPD 2025		Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1344	RKPD 2025		Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1345	RKPD 2025		Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1346	RKPD 2025		Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1347	RKPD 2025		Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah provinsi	Kawasan Transmigrasi	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1348	RKPD 2025		Jumlah rencana kawasan transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Kawasan Transmigrasi	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1349	RKPD 2025		Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1350	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pekerja yang mendapatkan pemahaman tata cara penyusunan PP/PKB	Pekerja	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1351	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Perusahaan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1352	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Perusahaan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1353	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Perusahaan yang Terdaftar di Aplikasi Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Online	Perusahaan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1354	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1355	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1356	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1357	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1358	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja	Kasus	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1359	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Klaim Kecelakaan Kerja	Rupiah	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1360	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi	KK	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1361	Daftar Data Lemhannas		Jumlah perusahaan besar	unit	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1362	Daftar Data Lemhannas		Jumlah pekerja pertanian	jiwa	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1363	Daftar Data Lemhannas		Jumlah pekerja pertambangan	jiwa	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1364	RPJPD 2025-2045		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1365	RPJPD 2025-2045		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1366	RPJPD 2025-2045		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1367	RPJPD 2025-2045		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1368	RPJPD 2025-2045		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1369	RPJPD 2025-2045		Rasio Kewirausahaan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1370	RPJMD 2025-2029		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1371	RPJMD 2025-2029		Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1372	RPJMD 2025-2029		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1373	RPJMD 2025-2029		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1374	RPJMD 2025-2029		Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1375	RPJMD 2025-2029		Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1376	RPJMD 2025-2029		Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1377	RPJMD 2025-2029		Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	%	Statistik	Disnakertrans	Februari 2026
1378			Peta Pembinaan terhadap Warga Transmigrasi yang telah di tempatkan		Geospasial	Disnakertrans	Februari 2026
1379			Peta Sebaran Lokasi Balai Latihan Kerja		Geospasial	Disnakertrans	Februari 2026
1380			Jumlah Klub Olahraga	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1381			Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1382			Jumlah kegiatan olahraga		Statistik	Dispora	Februari 2026
1383			Jumlah organisasi pemuda		Statistik	Dispora	Februari 2026
1384			Jumlah Organisasi Olahraga		Statistik	Dispora	Februari 2026
1385			Jumlah kegiatan kepemudaan		Statistik	Dispora	Februari 2026
1386			Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)		Statistik	Dispora	Februari 2026
1387			Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi		Statistik	Dispora	Februari 2026
1388			Jumlah Pemuda Yang Berorganisasi	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1389			Jumlah Pemuda Yang Dibina (Pembinaan Kepemudaan)	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1390			Jumlah Lembaga Bela Diri	lembaga	Statistik	Dispora	Februari 2026
1391			Jenis Olahraga Unggulan Bela Diri		Statistik	Dispora	Februari 2026
1392			Jumlah Atlet Bela Diri	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1393			Sarana Prasarana Olahraga Bela Diri	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1394			Jumlah Lembaga Terukur		Statistik	Dispora	Februari 2026
1395			Jenis Olahraga Unggulan Terukur		Statistik	Dispora	Februari 2026
1396			Jumlah Atlet Terukur	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1397			Sarana Prasarana Olahraga Terukur	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1398			Jumlah Lembaga Permainan		Statistik	Dispora	Februari 2026
1399			Jenis Olahraga Unggulan Permainan		Statistik	Dispora	Februari 2026
1400			Jumlah Atlet Permainan	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1401			Sarana Prasarana Olahraga Permainan	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1402			Jumlah Lembaga Akurasi		Statistik	Dispora	Februari 2026
1403			Jenis Olahraga Unggulan Akurasi		Statistik	Dispora	Februari 2026
1404			Jumlah Atlet Akurasi	orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1405			Sarana Prasarana Olahraga Akurasi	unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1406			Jumlah pramuka		Statistik	Dispora	Februari 2026
1407			Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan penegak		Statistik	Dispora	Februari 2026
1408			Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan pandega		Statistik	Dispora	Februari 2026
1409			Jumlah pramuka berdasarkan tingkatan pembina		Statistik	Dispora	Februari 2026
1410			Jumlah Pramuka Berdasarkan Satuan Karya		Statistik	Dispora	Februari 2026
1411			Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1412	RKPD 2025		Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1413	RKPD 2025		Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1414	RKPD 2025		Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	keping	Statistik	Dispora	Februari 2026
1415	RKPD 2025		Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1416	Renstra Kemenpora		Peningkatan Prestasi Olahraga	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1417			Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Organisasi	Statistik	Dispora	Februari 2026
1418	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.01-01.01	Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1419	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.00.00.00-04.03	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	Statistik	Dispora	Februari 2026
1420	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.01-01.01	Jumlah kebijakan turunan UU Keolahragaan, Desain Besar Olahraga Nasional dan terkait Manajemen Talenta Nasional yang disusun dan dimanfaatkan		Statistik	Dispora	Februari 2026
1421	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.03-01.05	Persentase PPLPD di tingkat kabupaten/kota yang telah terstandarisasi dan fokus membina cabang olahraga prioritas sesuai Desain Besar Olahraga Nasional	Persen	Statistik	Dispora	Februari 2026
1422	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.03-01.11	Jumlah talenta muda	Orang	Statistik	Dispora	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1423	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.03-01.10	Jumlah atlet elit junior nasional	Orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1424	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.05-01.03	Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat internasional dan nasional	Orang	Statistik	Dispora	Februari 2026
1425	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.07.04.03-01.08	Jumlah sentra pembinaan yang telah beroperasi di daerah sesuai Desain Besar Olahraga	Unit	Statistik	Dispora	Februari 2026
1426	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		Statistik	Dispora	Februari 2026
1427	RPJMD 2025-2029		Rasio Wirausaha Pemuda		Statistik	Dispora	Februari 2026
1428	RPJMD 2025-2029		Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1429	RPJMD 2025-2029		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	Statistik	Dispora	Februari 2026
1430	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	Statistik	DPKD	Februari 2026
1431	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Jumlah Anggota Perpustakaan	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1432	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Jumlah Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan (SNP)	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1433	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.025	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)	Indeks	Statistik	DPKD	Februari 2026
1434	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Tingkat Ketercukupan Koleksi perpustakaan	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1435	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1436	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1437	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1438	RPJMN 2025-2029 ;	08.02.003	Tingkat Pemerataan Layanan Perpustakaan	persen	Statistik	DPKD	Februari 2026
1439	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0021	Jumlah SDM kearsipan yang lulus sertifikasi	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1440	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0032	Nilai hasil pengawasan kearsipan pada seluruh K/L/D	skor	Statistik	DPKD	Februari 2026
1441	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0034	Persentase Hasil Akreditasi Kearsipan sekurang-kurangnya bernilai A	persentase	Statistik	DPKD	Februari 2026
1442	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0036	Tingkat Digitalisasi Arsip	persentase	Statistik	DPKD	Februari 2026
1443			Jumlah Perpustakaan	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1444			Jumlah perpustakaan umum tingkat Pemprov Kalimantan Timur	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1445			Jumlah perpustakaan umum tingkat kabupaten/kota	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1446			Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Kecamatan	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1447			Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Desa/Kelurahan	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1448			Jumlah Perpustakaan di Rumah Ibadah	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1449			Jumlah Perpustakaan di Rutan/LP	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1450			Jumlah Perpustakaan di Puskesmas	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1451			Jumlah Perpustakaan di Instansi/OPD (Milik Pemda)	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1452			Jumlah Perpustakaan di SD/Sederajat	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1453			Jumlah Perpustakaan di SMP/Sederajat	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1454			Jumlah Perpustakaan di SMA/Sederajat	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1455			Jumlah Perpustakaan di PT Negeri	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1456			Jumlah Perpustakaan di PT Swasta	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1457			Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1458			Jumlah pengunjung perpustakaan Profesi Umum	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1459			Jumlah pengunjung perpustakaan Profesi Pegawai/Karyawan	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1460			Jumlah pengunjung perpustakaan Profesi Dosen/Guru	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1461			Jumlah pengunjung perpustakaan Mahasiswa	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1462			Jumlah pengunjung perpustakaan Murid SLTA	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1463			Jumlah pengunjung perpustakaan Murid SLTP	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1464			Jumlah pengunjung perpustakaan Murid TK/SD	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1465			Jumlah Peminjam Buku	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1466			Jumlah Buku Yang di Pinjam	buku	Statistik	DPKD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1467			Jumlah Orang Dalam Populasi Yang Harus Dilayani	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1468			Koleksi buku judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	buku	Statistik	DPKD	Februari 2026
1469			Jumlah Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	Statistik	DPKD	Februari 2026
1470			Rasio Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		Statistik	DPKD	Februari 2026
1471			Jumlah Koleksi Judul Buku Elektronik Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	buku	Statistik	DPKD	Februari 2026
1472			Jumlah Buku Elektronik Yang Yang Tersedia	buku	Statistik	DPKD	Februari 2026
1473			Jumlah Pustakawan di Provinsi	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1474			Pengelolaan arsip secara baku	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1475			Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1476			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1477			Jumlah Arsiparis	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1478			Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1479	RKPD 2025		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	Statistik	DPKD	Februari 2026
1480	RKPD 2025		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	skor	Statistik	DPKD	Februari 2026
1481	RKPD 2025		Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik	OPD	Statistik	DPKD	Februari 2026
1482	RKPD 2025		Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1483	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.01.00-01.03	Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar	Persen	Statistik	DPKD	Februari 2026
1484	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.01.00-01.02	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1485	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.01.00-01.01	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	Statistik	DPKD	Februari 2026
1486	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.00.00-01.01	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Statistik	DPKD	Februari 2026
1487	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.04.02-01.01	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	Unit	Statistik	DPKD	Februari 2026
1488	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.01.01-01.01	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Orang	Statistik	DPKD	Februari 2026
1489	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.04.01.03-01.01	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaa n	Statistik	DPKD	Februari 2026
1490	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.02.01.03-01.01	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	Persen	Statistik	DPKD	Februari 2026
1491	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno	Indeks	Statistik	DPKD	Februari 2026
1492	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	11.4.1.(a)	Jumlah anggaran untuk pelestarian arsip		Statistik	DPKD	Februari 2026
1493	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi SPBE, SRIKANDI)	Instansi	Statistik	DPKD	Februari 2026
1494	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01	Jumlah Naskah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Aplikasi SPBE, SRIKANDI)	Naskah	Statistik	DPKD	Februari 2026
1495	RPJMD 2025-2029		Angka Literasi	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1496	RPJMD 2025-2029		Persentase Koleksi Nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1497	RPJMD 2025-2029		persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang perpustakaan	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1498	RPJMD 2025-2029		tingkat ketersediaan arsip	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1499	RPJMD 2025-2029		Persentase Cakupan perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1500	RPJMD 2025-2029		persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1501	RPJMD 2025-2029		persentase SDM bidang kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	%	Statistik	DPKD	Februari 2026
1502	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.019	Persentase Anggaran Responsif Gender	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1503	RPJMN 2025-2029 SDG	03.07.001	Angka Fertilitas Spesifik Umur /Age-specific Fertilty Rate (ASFR)	kelahiran perseribu perempuan	Statistik	DP3A	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1504	RPJMN 2025-2029 SDGs	03.07.002	Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)	kelahiran	Statistik	DP3A	Februari 2026
1505	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.009	Indeks Kebahagiaan Pembangunan Keluarga	persentase keluarga yang merasakan hal tersebut	Statistik	DP3A	Februari 2026
1506	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.009	Indeks Kemandirian Pembangunan Keluarga	persentase keluarga yang memenuhi kriteria tersebut	Statistik	DP3A	Februari 2026
1507	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.009	Indeks Ketenteraman Pembangunan Keluarga	persentase keluarga yang melaksanakan aktivitas tersebut	Statistik	DP3A	Februari 2026
1508	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.009	Indeks Pembangunan Keluarga		Statistik	DP3A	Februari 2026
1509	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.014	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		Statistik	DP3A	Februari 2026
1510	RPJMN 2025-2029 ;	04.02.038	Jumlah keluarga sasaran Pemberdayaan Kelompok Bina Keluarga	keluarga	Statistik	DP3A	Februari 2026
1511	RPJMN 2025-2029 ;	04.02.038	Jumlah keluarga yg menjadi anggota BKL (Bina Keluarga Lansia)	keluarga	Statistik	DP3A	Februari 2026
1512	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.026	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) yang ada	unit	Statistik	DP3A	Februari 2026
1513	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.026	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) yang melaporkan minimal 6x setahun	unit	Statistik	DP3A	Februari 2026
1514	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.026	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1515	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0023	Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1516	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0024	Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1517	SDGs ;		Jumlah rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis	rumah tangga	Statistik	DP3A	Februari 2026
1518	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.016	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1519	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.018	Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1520	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.019	Persentase Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang Tidak Terpenuhi/ Unmet Need Keluarga Berencana	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1521	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.021	Persentase Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1522	SDGs ;	04.03.022	Persentase Keterwakilan Perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1523	SDGs ;	04.03.023	Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif		Statistik	DP3A	Februari 2026
1524	SDGs ;	04.03.024	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1525	RPJMN 2025-2029 SDGs	04.03.025	Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1526	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.026	Persentase Perempuan di Jabatan Tinggi Pratama dan Madya	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1527	RPJMN 2025-2029 ;	#NAME?	Persentase Perempuan Kepala Desa	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1528	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.028	Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1529	RPJMN 2025-2029 SDGs	04.03.029	Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1530	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.025	Persentase peserta Keluarga Berencana (KB) aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1531	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.028	Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1532	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.032	Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1533	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.033	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1534	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.033	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1535	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.035	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1536	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.036	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1537	SDGs ;	04.03.037	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1538	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.038	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1539	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.039	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1540	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.040	Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1541	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.042	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1542	RPJMN 2025-2029 SDGs	04.03.044	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1543	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1544	SDGs ;		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1545	RPJMN 2025-2029 ;		Presentase Anak Korban Eksploitasi	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1546	RPJMN 2025-2029 ;		Prosentase Anak Korban Kekerasan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1547	RPJMN 2025-2029 ;		Prosentase Anak Korban Napza	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1548	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.050	Rasio Kewirausahaan Perempuan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1549	RPJMN 2025-2029 ;		Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda perempuan terhadap laki-laki	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1550	RPJPN 2025-2045 RPJM	06.02.060	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1551	RPJMN 2025-2029 ;		Total anak usia 13-17 tahun	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1552	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.0058	Total Angkatan Kerja Perempuan	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1553	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.0062	TPAK Pemuda Perempuan	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1554	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.003	Angka Prevalensi Kontraseptif Modern pada Kelompok Perempuan Usia Reproduksi	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1555	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.003	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1556	RPJMN 2025-2029 ;	03.07.013	Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1557	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.004	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1558	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.005	Indeks Perlindungan Khusus Anak		Statistik	DP3A	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1559	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0003	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas		Statistik	DP3A	Februari 2026
1560	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0004	Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA		Statistik	DP3A	Februari 2026
1561	SDGs ;	04.03.0005	Jumlah anak laki-laki umur 13–17 tahun yang mengalami kekerasan (GATS)	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1562	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0006	Jumlah anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1563	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.03.044	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir		Statistik	DP3A	Februari 2026
1564	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.03.025	Persentase Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan Berumur 15—64 Tahun yang Mengalami Kekerasan Seksual oleh Orang Lain Selain Pasangan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1565	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.03.029	Persentase Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial		Statistik	DP3A	Februari 2026
1566	RPJMN 2025-2029 ;	04.03.009	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA		Statistik	DP3A	Februari 2026
1567			Kekerasan Dalam Rumah Tangga		Statistik	DP3A	Februari 2026
1568			Rasio KDRT		Statistik	DP3A	Februari 2026
1569			Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak		Statistik	DP3A	Februari 2026
1570			Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak		Statistik	DP3A	Februari 2026
1571			Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1572			Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1573			Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir		Statistik	DP3A	Februari 2026
1574			Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Statistik	DP3A	Februari 2026
1575			Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Statistik	DP3A	Februari 2026
1576			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		Statistik	DP3A	Februari 2026
1577	KPU/BPS		Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat.	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1578	KPU/BPS		Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1579	KPU/BPS		Persentase keterwakilan perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Persentase Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.	Orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1580	KPU/BPS		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat	Orang	Statistik	DP3A	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1581			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di pemerintah daerah		Statistik	DP3A	Februari 2026
1582			Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial/ Kepemimpinan di Pemerintahan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1583			Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.		Statistik	DP3A	Februari 2026
1584			Prevalensi kekerasan terhadap anak laki laki dan anak perempuan.		Statistik	DP3A	Februari 2026
1585			Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Statistik	DP3A	Februari 2026
1586			Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi		Statistik	DP3A	Februari 2026
1587			Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Statistik	DP3A	Februari 2026
1588			Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		Statistik	DP3A	Februari 2026
1589			Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1590			Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1591			Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Statistik	DP3A	Februari 2026
1592			Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani		Statistik	DP3A	Februari 2026
1593			Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1594	RPJMD 2025-2029		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	angka	Statistik	DP3A	Februari 2026
1595	RPJMD 2025-2029		Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	Statistik	DP3A	Februari 2026
1596			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir		Statistik	DP3A	Februari 2026
1597			Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021		Statistik	DP3A	Februari 2026
1598			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan yang dialami tahun 2021		Statistik	DP3A	Februari 2026
1599			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1600			Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Kelembagaan, sumber daya, layanan dan program, pemantauan evaluasi dan pelaporan)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1601			Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Perempuan (PEKKA)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1602			Ratio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1603			Persentase Peningkatan ketersediaan data gender dan anak		Statistik	DP3A	Februari 2026
1604			Persentase Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak pada Perangkat Daerah		Statistik	DP3A	Februari 2026
1605	RKPD 2025		Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR) per WUS usia 15-49	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1606	RKPD 2025		Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	Statistik	DP3A	Februari 2026
1607	RKPD 2025		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	Statistik	DP3A	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1608	RKPD 2025		Predikat Kab/Kota Layak Anak (KLA)	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1609	RKPD 2025		Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1610	RKPD 2025		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1611	RKPD 2025		Indeks pembangunan keluarga	Indeks	Statistik	DP3A	Februari 2026
1612	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.05.00.00-01.02	Prevalensi anak laki-laki/perempuan umur 13-17 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1613	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	5.1.1*	Persentase ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin menurut bidang (dasar hukum umum, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi, perkawinan dan keluarga)	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1614	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1615	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1616	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1617	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.05.01.01-01.02	Jumlah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kabupaten/Kota	Statistik	DP3A	Februari 2026
1618	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.05.00.00-01.05	Persentase perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik dan/atau seksual) yang dilakukan oleh pasangan dan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1619	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.05.02.02-01.01	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	Persen	Statistik	DP3A	Februari 2026
1620	RPJPD 2025-2045		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	Statistik	DP3A	Februari 2026
1621	RPJPD 2025-2045		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	Statistik	DP3A	Februari 2026
1622	RPJMD 2025-2029		Persentase anggaran responsif gender (ARG)	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1623	RPJMD 2025-2029		Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1624	RPJMD 2025-2029		Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar		Statistik	DP3A	Februari 2026
1625	RPJMD 2025-2029		Tingkat pemafaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1626	RPJMD 2025-2029		Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)		Statistik	DP3A	Februari 2026
1627	RPJMD 2025-2029		Anak dalam perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	Statistik	DP3A	Februari 2026
1628			Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Statistik	DP3A	Februari 2026
1629	RPJMN 2025-2029 ;	03.05.015	Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya Menjadi Daerah Berkembang dan/atau Maju	persen	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1630	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	03.05.0004	Jumlah desa dengan status Mandiri	Jumlah desa	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1631	RPJMN 2025-2029 ;	03.05.0012	Jumlah total kabupaten dengan status tertinggal dan sangat tertinggal		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1632	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	03.05.019	Persentase Desa Mandiri	persen	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1633	RPJMN 2025-2029 ;	09.03.042	Persentase Desa yang menerapkan layan	persen	Statistik	DPMPD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1634	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;	03.05.0017	Total desa yang dinilai		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1635	RPJMN 2025-2029 ;	09.01.0023	Jumlah Total Kepala Desa (JPDTotal)	orang	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1636			Jumlah LPM		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1637			Jumlah PKK		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1638			Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1639			Jumlah Posyandu Aktif		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1640			Jumlah Total Posyandu		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1641			Persentase Posyandu Aktif		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1642			Jumlah Desa/Kelurahan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1643			Jumlah Desa		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1644			Jumlah Kelurahan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1645			Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Desa		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1646			Jumlah Kecamatan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1647			Jumlah Desa Maju		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1648			Jumlah Desa Berkembang		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1649			Jumlah Desa Tertinggal		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1650			Jumlah Desa Sangat Tertinggal		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1651			Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1652			Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Yang Dibina		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1653			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1654			Jumlah Bumdes Yang Aktif		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1655			Jumlah Bumdes Yang Dibina		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1656			Jumlah Profil Desa/Kelurahan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1657			Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1658			Presentase Profil Desa/Kelurahan Yang Dibina		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1659			Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1660			Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1661			Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1662			Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1663			Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1664			Persentase pengentasan desa tertinggal		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1665			Persentase peningkatan status desa mandiri		Statistik	DPMPD	Februari 2026
1666	RKPD 2025		Persentase desa yang difasilitasi penataan desanya	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1667	RKPD 2025		Persentase status desa yang menjadi maju	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1668	RKPD 2025		Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1669	RKPD 2025		Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1670	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah daerah tertinggal	Kabupaten/Kota	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1671	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peringkat BUMDes	Nilai	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1672	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang Berbadan Hukum	Unit	Statistik	DPMPD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1673	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Masyarakat Desa yang Diberi Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2024	Orang	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1674	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Indeks Desa Membangun	Nilai	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1675	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kebutuhan Daerah Tertinggal	Kegiatan	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1676	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama Berdasarkan Kategori Jenis Usaha	Unit	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1677	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Orang	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1678	RPJPD 2025-2045		Persentase Fasilitasi Kerjasama desa	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1679	RPJPD 2025-2045		Persentase aparaturnya desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1680	RPJPD 2025-2045		Persentase Fasilitasi tata kelola desa	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1681	RPJPD 2025-2045		Persentase Fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1682	RPJPD 2025-2045		Persentase Pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	%	Statistik	DPMPD	Februari 2026
1683	SDGs ;		Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1684	SDGs ;		Jumlah Penduduk di Daerah Tertinggal (JPDT)	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1685	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Penduduk pada Periode Waktu yang Sama (JP)	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1686	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Status Perkawinan	kategori (menikah, belum menikah, pernah menikah)	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1687	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total penduduk kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1688	RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;	04.03.0028	Jumlah total perempuan usia 15-64 tahun	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1689	RPJMN 2025-2029 SDGs ; RPJMN 2025-2029 SDGs ; RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)		STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1690	SDGs ;	09.01.017	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	persen	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1691	RPJMN 2025-2029 ;	09.01.019	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1692	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1693	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah penduduk berusia 19–23 tahun (JP(19-23))	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1694	SDGs ;		Jumlah penduduk umur ≥15 tahun		STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1695	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Penduduk Umur 25 Tahun ke Atas (b)	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1696	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0130	Jumlah Total Anak Balita	orang	STATISTIK	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1697			Jumlah penduduk yang memiliki E-KTP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1698			Jumlah penduduk Laki-Laki yang memiliki E-KTP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1699			Jumlah penduduk Perempuan yang memiliki E-KTP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1700			Jumlah Penduduk >17 yang memiliki KTP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1701			Jumlah penduduk >17 atau telah menikah	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1702			Jumlah penduduk yang telah menikah	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1703			Jumlah pasangan yang telah memiliki Akta Nikah	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1704			Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1705			Jumlah Penduduk yang berKartu Keluarga	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1706			Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1707			Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1708			Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1709			Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1710			Rasio Kepemilikan KTP	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1711			Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1712			Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	kali	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1713			Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1714			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	OPD	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1715			Jumlah Penduduk	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1716			Jumlah Penduduk Laki-Laki	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1717			Jumlah Penduduk Perempuan	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1718			Sex Ratio	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1719			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 0-4	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1720			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 5-9	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1721			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 10-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1722			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 15-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1723			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 20-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1724			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 25-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1725			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 30-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1726			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 35-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1727			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 40-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1728			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 45-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1729			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 50-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1730			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 55-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1731			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 60-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1732			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 65-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1733			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 70-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1734			Jumlah Penduduk Laki - Laki Usia 75+	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1735			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 0-4	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1736			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 5-9	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1737			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 10-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1738			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1739			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 20-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1740			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 25-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1741			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 30-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1742			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 35-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1743			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 40-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1744			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 45-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1745			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 50-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1746			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 55-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1747			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 60-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1748			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 65-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1749			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 70-	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1750			Jumlah Penduduk Perempuan Usia 75+	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1751			Jumlah Penduduk Usia 0-4	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1752			Jumlah Penduduk Usia 5-9	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1753			Jumlah Penduduk Usia 10-14	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1754			Jumlah Penduduk Usia 15-19	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1755			Jumlah Penduduk Usia 20-24	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1756			Jumlah Penduduk Usia 25-29	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1757			Jumlah Penduduk Usia 30-34	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1758			Jumlah Penduduk Usia 35-39	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1759			Jumlah Penduduk Usia 40-44	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1760			Jumlah Penduduk Usia 45-49	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1761			Jumlah Penduduk Usia 50-54	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1762			Jumlah Penduduk Usia 55-59	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1763			Jumlah Penduduk Usia 60-64	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1764			Jumlah Penduduk Usia 65-69	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1765			Jumlah Penduduk Usia 70-74	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1766			Jumlah Penduduk Usia 75+	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1767			Jumlah Penduduk Tidak Sekolah	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1768			Jumlah Penduduk Belum Tamat SD	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1769			Jumlah Penduduk SD	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1770			Jumlah Penduduk SMP	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1771			Jumlah Penduduk SMA	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1772			Jumlah Penduduk Perguruan Tinggi	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1773			Jumlah Penyandang Disabilitas	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1774			Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1775			Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1776			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1777			Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	kali	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1778			Pemanfaatan data kependudukan	OPD	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1779	RPJMD 2025-2029		Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1780			Persentase Kepemilikan KTP-el se Kaltim	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1781			Persentase Kepemilikan KIA se Kaltim	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1782			Persentase Kepemilikan Akta Kel Anak se Kaltim	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1783			Persentase Penyajian Data Kependudukan 2 kali dalam 1 tahun	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1784	RKPD 2025		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1785	RKPD 2025		Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1786	RKPD 2025		Publikasi data kependudukan skala provinsi	kali	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1787			Profil Kependudukan	kali	Geospasial	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1788	Daftar Data Lemhannas	2.6.2.9	Jumlah kabupaten/Kota seluruhnya (berdasarkan data ADMINDUK)	kab/kota	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1789	Daftar Data Lemhannas	2.6.6.3	Persentase penduduk perkotaan (urban)	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1790	Daftar Data Lemhannas	3.3.8.2	Jumlah rumah tangga yang ada di wilayah	KK	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1791	Daftar Data Lemhannas	7.1.6.1	Jumlah penduduk penderita cacat	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1792	Daftar Data Lemhannas	7.4.3.2	Akumulasi jumlah pasangan suami istri sampai dengan tahun data	pasangan	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1793	Daftar Data Lemhannas	7.4.3.1	Jumlah perceraian dalam satu tahun	kasus	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1794	Daftar Data Lemhannas	7.4.7.2	Jumlah penduduk perempuan pada usia < 16 tahun	jiwa	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1795	RPJMD 2025-2029		Rasio penduduk	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1796	RPJMD 2025-2029		Kepadatan penduduk	Orang/m2	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1797	RPJMD 2025-2029		Angka ketergantungan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1798	RPJMD 2025-2029		Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1799	RPJMD 2025-2029		Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1800	RPJMD 2025-2029		Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1801	RPJMD 2025-2029		Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1802	RPJMD 2025-2029		Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1803	RPJMD 2025-2029		Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1804	RPJMD 2025-2029		Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1805	RPJMD 2025-2029		Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	Statistik	DISDUKCAPIL	Februari 2026
1806			Peta Sebaran Rumah sakit (swasta kelas B dan pemerintah)		Geospasial	Dinkes	Februari 2026
1807	Daftar Data Prioritas Tahun 2025		Peta Sebaran Lokasi Puskesmas dan Rumah Sakit		Geospasial	Dinkes	Februari 2026
1808	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.001	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1809	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.020	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (Notifikasi Kasus TBC)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1810	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Kasus TB Baru dan Kambuh	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1811	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0058	Jumlah Kasus TBC yang Ditemukan dan Dilaporkan	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1812	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total kasus TB yang diobati dan dilaporkan	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1813	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0060	Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan TBC (TPT) yang dilaporkan	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1814	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total kontak serumah yang memenuhi syarat (eligible)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1815	RPJMN 2025-2029 ;		Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1816	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.122	Persentase Pasien TBC yang memulai Pengobatan (Enrollment TBC)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1817	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1818	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah pasien TB yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1819			Estimasi Jumlah Temuan Kasus TBC Per Tahun	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1820			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1821	Data Lemhannas		Jumlah penduduk yang menderita TBC	jiwa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1822			Jumlah Kasus Baru TB BTA+	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1823			Kasus TB Anak 0-14 Tahun	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1824			Jumlah Penderita BTA+ yang mendapatkan pengobatan	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1825			Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1826	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.044	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Kusta	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1827	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0057	Jumlah Kasus Kusta Baru Tanpa Disabilitas (Disabilitas Tingkat 0)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1828	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kasus Kusta Baru yang Ditemukan dalam Periode yang Sama	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1829	SDGs ;		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1830	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0066	Jumlah Penderita Kusta Baru yang Menyelesaikan Pengobatan Tepat Waktu	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1831	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.184	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1832	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1833	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1834	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1835	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1836	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Infeksi Baru HIV (JInfbaruHIV)	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1837			Jumlah Kematian Karena AIDS	jiwa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1838	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.027	Jumlah infeksi baru HIV per 1.000 penduduk tidak terinfeksi	rseratus ribu p	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1839	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah ODHIV baru yang memulai ART	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1840	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah ODHIV baru yang ditemukan	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1841	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.064	ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1842	Data Lemhannas		Jumlah Kasus HIV	jiwa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1843	Data Lemhannas		Jumlah Kasus AIDS	jiwa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1844			Persentase Orang Dengan HIV (ODHIV) Baru ditemukan Mendapatkan Pengobatan Anti ReTroviral (ART)	persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1845	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Insidensi HIV	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1846	SDGs ;		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Filariasis	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1847	SDGs ;		Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota dengan Mikrofilaria Rate (MF-Rate) 1% yang Mendapat POPM Filariasis	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1848			Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	ah Kabupaten	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1849	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1850	SDGs ;		Jumlah Seluruh Penduduk di Kabupaten/Kota Dengan (MF-Rate) 1% dan Dinyatakan dalam Satuan Persen (%)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1851	SDGs ;		Angka Kesakitan Malaria		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1852	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.045	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1853	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah kabupaten/kota yang Mencapai Positivity Rate (PR) Malaria	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1854	SDGs ;		Jumlah Kasus Malaria Positif	individu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1855			Tingkat Kematian Akibat Malaria		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1856	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1857	SDGs ;		Jumlah Kasus Baru Hepatitis B	100.000 pendu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1858	SDGs ;		Tingkat Insiden Hepatitis B		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1859	SDGs ; SDGs ;		Jumlah Penduduk Berisiko	individu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1860			Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	0.000 pendud	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1861			Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1862			Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	ah Kabupaten	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1863	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.046	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Rabies	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1864			Persentase Diare Ditemukan dan Ditangani	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1865	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.012	Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1866	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0029	Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1867	SDGs ;	04.01.190	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1868			Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1869			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1870	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1871	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 2 dosis vaksin campak (Cakupan Imunisasi Campak-2)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1872	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima 3 dosis vaksin DPT (Cakupan Imunisasi DPT-3)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1873	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima vaksinasi PCV dosis kedua (Cakupan Imunisasi PCV-2)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1874	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0016	Jumlah anak perempuan usia kelas 5 SD atau sederajat yang sudah mendapat imunisasi HPV	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1875	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0049	Jumlah kabupaten/kota dengan cakupan imunisasi HPV 90%	kab/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1876	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi DPT dosis ketiga	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1877	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah anak usia 12-23 bulan yang pernah mendapat vaksinasi PCV dosis kedua	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1878	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0023	Jumlah bayi usia 0–28 hari yang menerima pelayanan neonatal esensial lengkap sesuai standar	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1879	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.013	Cakupan imunisasi HPV	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1880	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.015	Cakupan Kunjungan Nifas (KF) lengkap sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1881	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0044	Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Lengkap Sesuai	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1882	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0039	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal minimal 6 kali sesuai standar dalam satu tahun	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1883	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0043	Jumlah Ibu Nifas Sasaran	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1884	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah kabupaten/kota dengan CFR obstetri langsung (eklampsia dan perdarahan postpartum) < 1% (KKK_CFR)		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1885	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0110	Jumlah sasaran ibu hamil	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1886	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.095	Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1887	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0133	Jumlah total ibu hamil yang diperiksa		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1888	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.096	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1889	Laporan Rutin		Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1890	Laporan Rutin		Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1891			Kunjungan Ibu Hamil (K1)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1892			Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1893			Kunjungan Ibu Hamil (K6)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1894			Ibu Hamil Dengan Imunisasi TT2+	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1895			Cakupan Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah 180 Tablet	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1896			Peserta KB Aktif	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1897			Jumlah pelayanan kepada Ibu nifas	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1898			Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1899			Persentase cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1900			Jumlah ibu hamil	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1901	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1902	RPJPD 2025-2045		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1903	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0014	Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskruining Hb	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1904	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0015	Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1905	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah ART berusia ≥15 tahun yang mengalami depresi saat ini	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1906	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0025	Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir	individu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1907	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0111	jumlah sasaran remaja putri SMP & SMA sederajat diwaktu yang sama	(jumlah remaja)	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1908	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0094	Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu	(jumlah remaja)	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1909	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.158	Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1910	RPJMN 2025-2029 ;		Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1911	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.177	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Berumur 18 Tahun ke Atas	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1912	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0024	Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang di-	individu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1913	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.0059	Jumlah kematian bayi usia kurang dari 28 hari (JK)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1914	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0115	Jumlah seluruh bayi usia 0–28 hari	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1915	Laporan Rutin		Cakupan Kunjungan Bayi Baru Lahir	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1916			Jumlah Kunjungan Bayi Baru Lahir Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1917	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.075	Persentase bayi lahir premature (<37 minggu)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1918			Jumlah Lahir Hidup	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1919			Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1920			Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1921			Persentase Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1922			Jumlah Kematian Bayi	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1923			Jumlah Kematian Bayi	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1924			Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang direcall	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1925			Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1926			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1927	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1928	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase Bayi usia 6 bulan diberi ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1929	RPJPD 2025-2045		Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1930	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.028	Jumlah kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar 4 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM)	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1931	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.032	Jumlah kabupaten/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1932	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Lansia dengan Ketergantungan Sedang, Berat, atau Total yang Mendapatkan PJP	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1933	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka Panjang (PJP)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1934	RPJMN 2025-2029 ;	04.02.037	Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1935	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0075	Jumlah perempuan usia 30-69 tahun yang terdeteksi DNA HPV positif	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1936	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.139	Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1937			Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1938	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0165	Prevalensi Stunting	persentase (%)	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1939	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.0114	Jumlah seluruh anak balita	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1940	RPJMN 2025-2029 ;	09.02.0012	Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun	anak	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1941	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total anak usia 5-18 tahun yang diukur	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1942	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.073	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1943			Balita Ditimbang (D/S)	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1944			Jumlah Balita dengan Pneumonia yang ditemukan dan ditangani	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1945	Data Lemhannas		Jumlah kasus pneumonia pada balita	jiwa		Dinkes	Februari 2026
1946			Jumlah Baduta (0-23 bulan)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1947	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0069	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis minimal skrining DM dan hipertensi pada kelompok usia dewasa usia 15-59 tahun	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1948	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0065	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1949			Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1950	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0032	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1951			Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1952	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.140	Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1953	RPJMN 2025-2029 ;	09.07.0001	Jumlah kabupaten/kota dengan pengobatan lesi pra kanker 90%	kab/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1954	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0076	Jumlah perempuan yang ditemukan dengan lesi pra kanker leher rahim	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1955	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.048	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1956	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0045	Jumlah individu dengan diabetes yang diperiksa kadar gula darahnya	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1957	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0046	Jumlah individu dengan diabetes yang mencapai kontrol glikemik sesuai target	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1958	SDGs ;		Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1959			Jumlah Penderita Diabetes Melitus usia > 15 Tahun	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1960			Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1961			Persentase penderita Diabetes Mellitus/DM yang terkontrol	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1962	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.050	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1963	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Persentase Penduduk yang Merokok	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1964	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1965	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1966	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1967	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Prevalensi tekanan darah tinggi	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1968			Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1969			Jumlah ibu hamil yang menderita anemia.	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1970			Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1971	RPJMN 2025-2029 ;		Cakupan Skrining Kesehatan Jiwa	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1972	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0055	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memenuhi 4 dari 5 Kriteria Pengendalian KLB/Wabah	abupaten/kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1973	Data Lemhannas		Jumlah kasus penyakit DBD	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1974	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.042	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan skrining DM > 60%	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1975			AFP Rate (Non Polio)< 15 th	/100.000	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1976	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.021	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1977	SDGs ;		Jumlah fasilitas kesehatan dengan obat esensial yang tersedia dan terjangkau		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1978	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kabupaten/Kota dengan ketersediaan 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL	abupaten/kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1979	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0036	Jumlah FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	abupaten/kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1980	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0081	Jumlah Puskesmas dan RS Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1981	Laporan Rutin		Jumlah Industri Farmasi	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1982	Laporan Rutin		Jumlah industri farmasi produksi obat tradisional	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1983	Laporan Rutin		Jumlah gudang farmasi	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1984	Laporan Rutin		Jumlah PBF (Pedagang Besar Farmasi)	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1985	Laporan Rutin		Jumlah Toko Obat	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1986			Jumlah Apotek	apotek	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1987	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.101	Persentase kabupaten/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1988	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.149	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1989	RKPD 2025		Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1990	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1991	RPJMD 2025-2029		Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1992	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1993	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah fasilitas yang memenuhi	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1994	SDGs ;		Jumlah total fasilitas kesehatan yang disurvei		Statistik	Dinkes	Februari 2026
1995	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total fasilitas kesehatan		Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
1996	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0035	Jumlah Fasyankes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1997	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0168	Total Fasyankes Pemerintah	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1998	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0048	Jumlah Kab/Kota yang memiliki 75% Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	kabupaten/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
1999	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.028	Jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kabupaten/ kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2000	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0050	Jumlah Kabupaten/Kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada cakupan >80% target	kabupaten/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2001	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 1 RS PONEK Sesuai Standar PONEK	kabupaten/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2002	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0053	Jumlah kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif (JKK_75%Aktif):		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2003	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah kabupaten/kota dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kabupaten/ kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2004	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.041	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan UBM	kabupaten/ kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2005	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0054	Jumlah kabupaten/kota dengan skrining HPV dengan kenaikan 15% dibandingkan tahun sebelumnya	kab/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2006	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.034	Jumlah kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan Puskesmas sesuai standar	kabupaten/ kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2007	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0082	Jumlah Puskesmas dengan kelengkapan SPA minimal 70%	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2008	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0083	Jumlah Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL Sesuai Standar	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2009	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0087	jumlah puskesmas yang ada diwilayah layanan santun lansia	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2010	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0086	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna yang Sertifikatnya Masih Berlaku	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2011	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0088	Jumlah puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2012	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0090	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai klasifikasi wilayah dan layanan	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2013	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0091	Jumlah Puskesmas yang Mencapai Seluruh Target INM	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2014	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0092	Jumlah Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2015	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0117	Jumlah seluruh Puskesmas dan RS Pemerintah	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2016	RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0140	Jumlah Total Puskesmas	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2017	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0141	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi dan Operasional hingga Tahun 2028	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2018	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0142	Jumlah Total Puskesmas Teregistrasi yang Beroperasi hingga Tahun 2026	jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2019	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0143	Jumlah total puskesmas yang memiliki layanan UBM	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2020			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	kabupaten/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2021	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0052	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 20% Puskesmas PONEK yang Mampu Menjalankan Minimal 10 Sinyal Fungsi	kabupaten/kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2022			Jumlah Puskesmas Induk	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2023			Jumlah Puskesmas Rawat Inap	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2024			Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2025			Jumlah Puskesmas Pembantu	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2026			Jumlah Puskesmas Keliling	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2027			Rasio Jumlah Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk	35.000 pendu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2028			Jumlah Puskesmas Terakreditasi	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2029			Jumlah Puskesmas Akreditasi	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2030			Jumlah Puskesmas Akreditasi Utama	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2031			Jumlah Puskesmas Akreditasi Madya	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2032			Jumlah Puskesmas Akreditasi Dasar	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2033			Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan jaringan internet	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2034	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0169	Total jumlah Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional pada tahun yang sama	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2035			Rasio Jumlah Puskesmas Pembantu Terhadap Jumlah Penduduk	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2036			Jumlah Puskesmas Tidak Terakreditasi	puskesmas	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2037	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase puskesmas tanpa dokter	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2038			Sebaran puskesmas		Geospasial	Dinkes	Februari 2026
2039	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah RS yang memberikan pelayanan geriatri terpadu	unit (jumlah rs	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2040	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0096	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar SPA	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2041	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0097	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Sertifikat Akreditasi Paripurna yang Masih Berlaku (2025-2029)	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2042	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0118	Jumlah seluruh RS Pemerintah	unit (jumlah rs	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2043			Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2044			Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2045			Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas B	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2046			Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2047			Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2048			Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas A	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2049			Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas B	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2050			Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas C	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2051			Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Kelas D	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2052			Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2053			Jumlah RS Ibu dan Anak	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2054			Jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2055			Jumlah RS Ketergantungan Obat	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2056			Jumlah RS Kusta	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2057			Rumah Sakit Mata	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2058			Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2059			Jumlah Rumah Sakit Umum AD/AU/AL/Polri	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2060			Jumlah Seluruh Rumah Sakit	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2061	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi	Rumah Sakit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2062			Rasio Rumah Sakit / satuan Penduduk	1000 Pendud	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2063	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0174	Total Rumah Sakit	unit (jumlah rs	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2064	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0175	Total Rumah Sakit Pemerintah Daerah	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2065	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0176	Total Rumah Sakit Pemerintah yang Teregistrasi dan Laik Operasional	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2066	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Individu yang Tergdaftar dan Membayar Iuran Secara Aktif	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2067	SDGs ;		Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)	lah individu (j	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2068	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berusia 0-17 tahun berbasis NIK	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2069	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Cakupan peserta PBI JKN	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2070	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.151	Persentase Puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2071	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.156	Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2072	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.155	Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2073	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.157	Persentase Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2074	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.103	Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2075	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.150	Persentase Puskesmas mampu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2076	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.154	Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2077	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2078	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2079	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase kabupaten/kota dengan Rumah Sakit PONEK sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2080	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase kabupaten/kota dengan Rumah Sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2081			Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	Persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2082	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase Provinsi dengan Rumah Sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2083	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase rumah sakit terakreditasi	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2084			Sebaran rumah sakit (swasta dan pemerintah)		Geospasial	Dinkes	Februari 2026
2085	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0171	Total Populasi Rumah Sakit Pemerintah yang Memiliki Izin Operasional hingga Tahun 2027	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2086			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Provinsi	bat tidur per pa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2087	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0070	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis per kelompok usia sekolah dan remaja usia 7 sampai	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2088	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0071	Jumlah penerima paket pemeriksaan kesehatan gratis untuk skrining prioritas kelompok lanjut usia >=60 tahun	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2089	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.130	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2090	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.132	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2091	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.133	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2092	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.134	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2093	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.131	Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra skeolah	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2094	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0077	Jumlah perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kesja sesuai standar	nlah tempat ke	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2095	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0078	Jumlah perusahaan perusahaan menengah atau besar, kantor pemerintahan, rumah sakit dan Puskesmas	jumlah tempat kerja	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2096	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.087	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2097	SDGs ;		Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Paket Obat Esensial yang Tersedia dan Terjangkau Secara Berkelanjutan	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2098	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.109	Persentase kabupaten/kotadengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2099	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0131	Jumlah total FKTP		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2100			Jumlah Posyandu	posyandu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2101			Jumlah kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif			Dinkes	Februari 2026
2102			Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif			Dinkes	Februari 2026
2103	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kabupaten/kota dengan minimal 75% Posyandu siklus hidup yang aktif	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2104			Jumlah Posyandu Siklus Hidup	posyandu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2105	RPJMN 2025-2029 ;		Tingkat kepuasan publik atas layanan Jaminan Kesehatan Nasional	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2106	Laporan Rutin		Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2107	Laporan Rutin		Jumlah Sarana Distribusi Alat Kesehatan Cabang	Sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2108	RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;		Total Jumlah Pintu Masuk	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2109	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.144	Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2110	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.030	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2111	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.039	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2112	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0137	Jumlah Total Labkesmas Tingkat 2-5 yang Direncanakan (JTLDR)	unit	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2113	RPJMN 2025-2029 ;		Total jumlah Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan	unit pelayanan kesehatan	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2114	RPJMN 2025-2029 ;		Total Liabilitas Dana Jaminan Sosial Kesehatan	rupiah (rp)	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2115	RPJMN 2025-2029 ;		Total sistem informasi data kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2116			Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d Kelas 9)	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2117			Jumlah Klinik	klinik	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2118			Praktek Dokter Mandiri	praktek	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2119			Jumlah Posbindu	posbindu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2120						Dinkes	Februari 2026
2121			Data Faskes yang melaksanakan Telemedicine	Faskes	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2122	RPJMD 2025-2029		Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2123	Daftar Data Lemhannas		Persentase kecamatan yang memiliki sarana puskesmas	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2124	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.029	Jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada Rumah Sakit sesuai standar	kabupaten/ kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2125	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.193	Rasio dokter spesialis		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2126	RPJMD 2025-2029		Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2127	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2128			Kepadatan dan Distribusi Ahli Teknologi Laboratorium Medik	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2129			Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kefarmasian	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2130			Jumlah Dokter Spesialis	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2131	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.030	Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2132	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2133	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.0109	Jumlah Sarana Air Minum yang Diperiksa Kualitas Air Minumnya	sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2134	RPJMN 2025-2029 ;		Total Sarana Air Minum yang Ada	sarana	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2135			Penyelenggara Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2136	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.106	Persentase kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2137	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2138			Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	desa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2139			Persentase rumah tangga yang Untuk praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (C)	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2140	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.049	Jumlah kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2141			Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	desa	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2142			Persentase Desa yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2143	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.031	Jumlah kabupaten/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2144	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.038	Jumlah kabupaten/kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2145	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.039	Jumlah kabupaten/kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2146	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.040	Jumlah kabupaten/kota sehat	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2147	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kabupaten/kota sehat	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2148	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2149			Jumlah KK Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak	Kepala Keluarg	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2150			Jumlah KK yang memiliki Akses Sanitasi Aman (Jamban Sehat)	Kepala Keluarga	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2151	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.035	Jumlah kabupaten/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2152			Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat	tempat	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2153	RPJMN 2025-2029 ;		Estimasi Kasus Tahun Berjalan pada sensitif iklim		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2154	SDGs ;		Angka kematian akibat keracunan yang tidak disengaja	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2155	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kasus Tahun Berjalan pada sensitif iklim		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2156	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.052	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan	kejadian	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2157	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.051	Jumlah kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR	abupaten/ kot	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2158	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2159	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Pintu Masuk yang Memiliki Kapasitas Penanggulangan	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2160			Desa/Kelurahan Terkena KLB Ditangani < 24 Jam	Desa/Kelurahan	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2161			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2162			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2163			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah (DHF)	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2164			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Hepatitis	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2165			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Kolera	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2166			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2167			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Suspect Meningitis/Encephalitis	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2168			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2169			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2170			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Tetanus	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2171			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2172			Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Lainnya	kasus	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2173			Persentase penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2174			Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana &/atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2175			Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2176			Kabupaten/Kota Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2177	SDGs ;	04.01.0128	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2178	SDGs ;	04.01.062	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2179	RPJMN 2025-2029 ;		Total SDMK Terdaftar	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2180	RPJMD 2025-2029		Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2181	Laporan Rutin		Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2182	Laporan Rutin		Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2183	Laporan Rutin		Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2184	Laporan Rutin		Persentase Kelahiran ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2185			Rasio Jumlah Dokter Umum per 100.000 Penduduk	100.000 pendu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2186			Rasio Dokter Gigi per 100.000		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2187			Rasio Bidan per 100.000 penduduk	100.000 pendu	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2188			Kepadatan dan distribusi dokter gigi	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2189			Kepadatan dan distribusi perawat	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2190			Kepadatan dan distribusi perawat gigi	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2191			Kepadatan dan distribusi bidan	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2192			Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2193			Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2194			Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2195			Jumlah Dokter	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2196			Jumlah Dokter Umum	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2197			Jumlah Dokter Gigi	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2198			Jumlah Dokter Gigi Spesialis	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2199			Jumlah Perawat	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2200			Jumlah Bidan	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2201			Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2202			Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2203			Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2204			Jumlah Apoteker	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2205			Jumlah Tenaga Gizi	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2206			Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2207			Jumlah Terapis Gigi dan Mulut	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2208			Jumlah Radiografer	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2209			Jumlah Perekam Medis	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2210			Jumlah Teknisi Elektromedis	rasio	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2211	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.068	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2212	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2213	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2214	RPJPD 2025-2045		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2215	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.01.180	Prevalensi Tengkes/ Stunting pada Balita	persen	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2216	RPJMN 2025-2029 ;	10.04.010	Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi		Statistik	Dinkes	Februari 2026
2217			Jumlah kasus gizi Buruk Balita yang ditemukan dan mendapat perawatan	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2218			Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Tata Laksana	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2219			Cakupan Balita Gizi Kurang mendapat makanan tambahan	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2220			Jumlah Balita stunting (pendek dan sangat pendek)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2221			Jumlah anak di bawah dua tahun/baduta stunting (pendek dan sangat pendek)	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2222			Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2223			Jumlah anak pada usia kurang dari 5 tahun malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) , berdasarkan tipe	Orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2224			Persentase Balita Underweight	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2225			Persentase Balita Wasting	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2226	Daftar Data Lemhannas		Persentase Balita dengan gizi baik	%	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2227			Jumlah Balita dengan gizi baik	orang		Dinkes	Februari 2026
2228	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah masyarakat yang menerapkan hidup sehat	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2229	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2230	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kabupaten/kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2231	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.055	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2232	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.030	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2233	RPJMN 2025-2029 ;	06.02.039	Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	Persentase	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2234	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.092□	Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	Jumlah	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2235	RPJMN 2025-2029 ;	04.01.186	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Proporsi	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2236	RPJMD 2025-2029		Jumlah Penerima Manfaat gratis jaminan kesehatan nasional (JKN)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2237	RPJMD 2025-2029		Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi diluar cakupan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN)	orang	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2238	RPJMD 2025-2029		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan Kader Risiko Stunting	Kab/Kota	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2239	RPJMD 2025-2029		Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko Stunting yang ditingkatkan kapasitasnya	Kader	Statistik	Dinkes	Februari 2026
2240	RPJMN 2025-2029 ;		Prosentase Anak Penyandang Disabilitas	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2241	RPJMN 2025-2029 ;		Prosentase Anak Terlantar	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2242	RPJMN 2025-2029 ;		Prosentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2243	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2244	SDGs ;		Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2245	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.02.051	Persentase Penduduk Miskin	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2246	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.02.068	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2247	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	keluarga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2248	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Sosial Non-Tunai	keluarga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2249	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2250	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Penduduk dengan Pengeluaran per Kapita di Bawah \$2,15 PPP per Hari	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2251	SDGs ;		Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal (JPMDT)	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2252	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah penduduk miskin pada BPS, TNP2K, DTKS-Kemensos dan data lain	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2253	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	04.02.0007	Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (JPM)	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2254	SDGs ;	04.02.0011	Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rentan (40% Terbawah) (JRT40)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2255	SDGs ;	04.02.0012	Jumlah rumah tangga miskin dan rentan (JRT)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2256	SDGs ;		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Memenuhi Syarat PKH (JRTMiskin-PKH)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2257	SDGs ;		Jumlah Rumah Tangga Penerima PKH (J RTPKH)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2258	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Total Keluarga Miskin dan Rentan yang Teridentifikasi	keluarga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2259	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI)	juta jiwa	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2260	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Sosial (JKBB	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2261	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah LKS yang Terakreditas	lembaga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2262	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tidak Mengalami Kesulitan Mobilitas	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2263	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping tersertifikasi	jumlah individu	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2264	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Total Penyandang Disabilitas Sedang-Berat	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2265	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2266	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase Tenaga SDM Kesejahteraan Sosial/Pendamping Perawatan yang tersertifikasi	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2267	RPJMN 2025-2029 ;		Total Jumlah LKS	lembaga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2268	RPJMN 2025-2029 ;		Total tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping	jumlah individu	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2269			Jumlah Anak Balita Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2270			Jumlah Anak Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2271			Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2272			Jumlah Anak Jalanan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2273			Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2274			Jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2275			Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2276			Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2277			Jumlah Penyandang Disabilitas	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2278			Jumlah Gelandangan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2279			Jumlah Pengemis	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2280			Jumlah Pemulung	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2281			Jumlah Kelompok Minoritas	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2282			Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2283			Jumlah Korban Trafficking	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2284			Jumlah Korban Tindak Kekerasan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2285			Jumlah Korban Bencana Alam	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2286			Jumlah Korban Bencana Sosial	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2287			Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2288			Jumlah Fakir Miskin	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2289			Jumlah Taruna Siaga Bencana (Tagana)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2290			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2291			Jumlah Karang Taruna	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2292			Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2293			Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Wahana	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2294			Jumlah Penyuluh Sosial	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2295			Penyuluh Sosial Fungsional	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2296			Penyuluh Sosial Masyarakat	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2297			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2298			Jumlah Dunia Usaha	Perusahaan	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2299			Jumlah PMKS	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2300			Jumlah PMKS Yang Tertangani	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2301			Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2302			Jumlah PMKS Yang Diberikan Bantuan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2303			Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2304			Persentase Keluarga Miskin dan PMKS (WRSE) yang memiliki usaha ekonomi produktif	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2305			Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2306			Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2307			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	KK	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2308			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Paket	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2309			Pendampingan psikososial korban bencana sosial		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2310			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2311			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2312			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2313			Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) disabilitas	Unit	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2314			Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti disabilitas terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2315			Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti disabilitas terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2316			Jumlah tenaga perawat/pengasuh yang disediakan di dalam panti disabilitas terlantar		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2317			Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti disabilitas terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2318			Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2319			Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2320			Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2321			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2322			Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2323			Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2324			Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2325			Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2326			Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2327			Jumlah Anak Terlantar terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2328			Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) Anak Terlantar	Unit	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2329			Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti Anak Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2330			Jumlah tenaga perawat/pengasuh yang disediakan di dalam panti Anak Terlantar		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2331			Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2332			Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2333			Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2334			Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2335			Jumlah Anak Terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2336			Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2337			Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2338			Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2339			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2340			Jumlah lanjut usia Terlantar yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2341			Jumlah lanjut usia Terlantar terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2342			Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti) lanjut usia	Unit	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2343			Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti lanjut usia Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2344			Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti lanjut usia Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2345			Jumlah tenaga perawat/pengasuh yang disediakan di dalam panti lanjut usia Terlantar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2346			Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti lanjut usia Terlantar	Alat	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2347			Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2348			Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2349			Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2350			Jumlah lanjut usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2351			Jumlah lanjut usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2352			Jumlah lanjut usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2353			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2354			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanaan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2355			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2356			Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	Unit	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2357			Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2358			Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2359			Jumlah tenaga perawat/pengasuh yang disediakan di dalam panti		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2360			Jumlah perbekalan kesehatan (peralatankesehatan) yang disediakan di dalam panti	Alat	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2361			Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2362			Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Paket	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2363			Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2364			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2365			Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2366			Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga (pemulangan)		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2367			Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2368			Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2369			Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2370			Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2371			Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2372			Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2373			Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2374			Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2375			Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2376			Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2377			Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2378			Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2379			Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2380			Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2381			Jumlah Keluarga Miskin yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	KK	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2382			Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2383			Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Taman Makam	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2384	RPJMD 2025-2029		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitas sosial	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2385	RPJMD 2025-2029		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitas sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2386	RPJMD 2025-2029		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2387	RPJMD 2025-2029		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2388	RPJMD 2025-2029		Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2389	RPJMD 2025-2029		Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	orang	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2390	RPJMD 2025-2029		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2391	RPJMD 2025-2029		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2392	RPJMD 2025-2029		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2393	RPJMD 2025-2029		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2394	RPJMD 2025-2029		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2395	RPJMD 2025-2029		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2396	RPJMD 2025-2029		Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2397	RPJMD 2025-2029		Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2398	RPJMD 2025-2029		Indeks peranan sosial		Statistik	Dinsos	Februari 2026
2399	RPJMD 2025-2029		Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2400	RPJMD 2025-2029		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2401	RPJMD 2025-2029		Persentasi daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2402	RPJMD 2025-2029		Peningkatan indeks kebutuhan dasar	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2403	RPJMD 2025-2029		Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2404	RPJMD 2025-2029		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2405	RPJMD 2025-2029		Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2406	RPJMD 2025-2029		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2407	RPJMD 2025-2029		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2408	RPJMD 2025-2029		Persentase taman makam pahlawan nasional yang dikelola dengan baik	%	Statistik	Dinsos	Februari 2026
2409	SDGs ;	07.05.021	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	million tonnes of carbon dioxide equivalent	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2410	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.001	Berat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	kilogram	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2411	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0003	Capaian Emisi Limbah	million tonnes of carbon dioxide equivalent	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2412	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0004	Capaian Pengelolaan Sampah	tonase sampah yang dikelola dan persentase pengurangan sampah	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2413	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0006	Emisi Baseline Limbah	million tonnes of carbon dioxide equivalent	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2414	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0007	Emisi Baseline Total	million tonnes of carbon dioxide equivalent	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2415	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.0009	Emisi GRK Baseline pada Tahun berjalan	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2416	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.005	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2417	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;		Indeks Kualitas Air (IKA)	nilai indeks tanpa satuan	STATISTIK	DLH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2418	RPJMN 2025-2029 ; RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	07.05.007	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2419	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.009	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2420	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	07.05.010	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2421	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;		Indeks Kualitas Udara (IKU)	nilai indeks tanpa satuan	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2422	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.024	Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2423	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.026	Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)	industri	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2424	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.027	Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	industri	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2425	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0021	Jumlah Instrumen Lingkungan Hidup Terintegrasi	layanan	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2426	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0025	Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah	skor penilaian kualitatif berdasarkan keberadaan dan efektivitas kebijakan	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2427	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang menerapkan perlindungan Lingkungan Hidup	unit	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2428	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah KLHS Terintegrasi	layanan	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2429	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.035	Jumlah Limbah B3 dan Non B3 yang dikelola	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2430	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0027	Jumlah Limbah B3 yang Dikelola	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2431	SDGs ;	07.05.0028	Jumlah Limbah Cair Industri yang dikelola secara aman	1000 m³/hari	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2432	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0029	Jumlah Limbah Non B3 yang Dikelola	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2433	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Perizinan yang Diterbitkan		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2434	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Permohonan Perizinan yang Diajukan		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2435	SDGs ;	07.05.038	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	unit	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2436	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0036	Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah	jumlah program atau kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakat	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2437	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.042	Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) sektor air laut	provinsi	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2438	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah sampah yang didaur ulang	ton atau kilogram	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2439	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.045	Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	lokasi	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2440	SDGs ;	07.05.0047	Jumlah timbulan limbah B3	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2441	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.047	Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2442	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.050	Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/ kegiatan/ izin	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2443	SDGs ;		Konsentrasi PM10 Tahunan	mikrogram	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2444	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.053	Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	layanan	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2445	SDGs ;		Luas kawasan bernilai konservasi tinggi		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2446	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.0052	Penurunan Emisi GRK pada Tahun berjalan	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2447	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2448	SDGs ;	07.05.068	Persentase Limbah Cair yang Diolah Secara Aman		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2449	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0054	Persentase Penanganan Sampah	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2450	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.069	Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2451	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.0055	Persentase Pengurangan Sampah	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2452	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.080	Persentase Sampah yang Terkelola	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2453	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.082	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2454	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.0168	Proporsi Limbah B3 yang Terkelola	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2455	SDGs ;		Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya	persen	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2456	SDGs ;	07.05.085	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri pengolahan		STATISTIK	DLH	Februari 2026
2457	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.092	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah	million tonnes of carbon dioxide equivalent	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2458	SDGs ;	07.05.0174	Tingkat Emisi CO ₂ / Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	ton co ₂ ekuivalen (ton co ₂ e) per tahun	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2459	SDGs ;	07.05.0175	Tingkat Emisi Sektor Industri (TE SI CO ₂)	ton co ₂ per tahun	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2460	SDGs ;	07.05.0177	Total Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Tahun Berjalan	ton	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2461	RPJMN 2025-2029 ;		Total Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)	unit	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2462	SDGs ;	07.05.0178	Total Limbah Cair Industri yang dihasilkan	1000 m ³ /hari	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2463	RPJMN 2025-2029 ;		Total Rekomendasi Kebijakan yang Diberikan	jumlah	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2464	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.05.0179	Total sampah jenis sampah	ton atau kilogram	STATISTIK	DLH	Februari 2026
2465			Plasma Nutfah Hewan dilindungi	jenis	Statistik	DLH	Februari 2026
2466			Plasma Nutfah Tumbuhan dilindungi	jenis	Statistik	DLH	Februari 2026
2467			Jumlah Pengaduan lingkungan yang diselesaikan pemda	kasus	Statistik	DLH	Februari 2026
2468			Jumlah penerapan sanksi administratif kewenangan provinsi	sanksi	Statistik	DLH	Februari 2026
2469			Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan Milik Pemda	unit	Statistik	DLH	Februari 2026
2470			Jumlah Laboratorium Penguji Lingkungan Milik Swasta	unit	Statistik	DLH	Februari 2026
2471			Sarana Monitoring Polusi Udara	unit	Statistik	DLH	Februari 2026
2472			Pemantauan Kualitas Air Sungai BOD	mg/L	Statistik	DLH	Februari 2026
2473			Pemantauan Kualitas Air Sungai COD	mg/L	Statistik	DLH	Februari 2026
2474			Industri yang memiliki IPAL	perusahaan	Statistik	DLH	Februari 2026
2475			Industri Yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara	perusahaan	Statistik	DLH	Februari 2026
2476			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura	Kabupaten/ Kota	Statistik	DLH	Februari 2026
2477			Sekolah yang mendapat Adiwiyata	sekolah	Statistik	DLH	Februari 2026
2478			Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	orang	Statistik	DLH	Februari 2026
2479			Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	perda	Statistik	DLH	Februari 2026
2480			Pencemaran Status Mutu Air	Tercemar Ringan	Statistik	DLH	Februari 2026
2481			Jumlah TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) / TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle)	unit	Statistik	DLH	Februari 2026
2482			Jumlah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	unit	Statistik	DLH	Februari 2026
2483			Jumlah sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	ton	Statistik	DLH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2484			Jumlah Perusahaan yang dinilai dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	perusahaan	Statistik	DLH	Februari 2026
2485			Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2486			Persentase sampah perkotaan (Samarinda, Bontang, Balikpapan) yang tertangani	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2487			Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	orang	Statistik	DLH	Februari 2026
2488			Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	ton	Statistik	DLH	Februari 2026
2489			List Kabupaten yang memiliki dokumen DDDTLH kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Statistik	DLH	Februari 2026
2490			List Kabupaten yang memiliki dokumen RPPLH kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Statistik	DLH	Februari 2026
2491			Surat Layak Operasional yang diterbitkan Pemerintah Provinsi	Dokumen	Statistik	DLH	Februari 2026
2492			Jumlah penanggung jawab usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan atau izin PPLH yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	penanggung jawab usaha dan kegiatan	Statistik	DLH	Februari 2026
2493			Data Pencemaran Pesisir dan Laut	kejadian	Statistik	DLH	Februari 2026
2494	RKPD 2025		Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2495			Indeks Pencemaran	poin	Statistik	DLH	Februari 2026
2496			Indeks Standar Pencemar Udara	poin	Statistik	DLH	Februari 2026
2497	RKPD 2025		Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	Ha	Statistik	DLH	Februari 2026
2498	RKPD 2025		Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2499			Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	Kelompok/Le mbaga	Statistik	DLH	Februari 2026
2500			Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan (%)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2501	RKPD 2025		Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2502	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah persetujuan terkait usaha SDA-LH	Dokumen	Statistik	DLH	Februari 2026
2503	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah persetujuan teknis terkait Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	Statistik	DLH	Februari 2026
2504	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)	Dokumen	Statistik	DLH	Februari 2026
2505	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Dokumen	Statistik	DLH	Februari 2026
2506	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya	badan usaha	Statistik	DLH	Februari 2026
2507	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup		Statistik	DLH	Februari 2026
2508	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	lokasi	Statistik	DLH	Februari 2026
2509	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan	lokasi	Statistik	DLH	Februari 2026
2510	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual	lokasi	Statistik	DLH	Februari 2026
2511	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Total suspended solid (TSS) atau zat padat tersuspensi	mg/L	Statistik	DLH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2512	RPJPD 2025-2045		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2513	RPJPD 2025-2045		Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% RT	Statistik	DLH	Februari 2026
2514	RPJPD 2025-2045		Penurunan Intensitas emisi GRK (kumulatif)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2515	RPJPD 2025-2045		Penurunan Intensitas emisi GRK (tahunan)	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2516	RPJMD 2025-2029		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindak	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2517	RPJMD 2025-2029		Persentase Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2518	RPJMD 2025-2029		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2519	RPJMD 2025-2029		Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	Statistik	DLH	Februari 2026
2520			Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Geospasial	Dishut	Februari 2026
2521	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.0003	Jumlah Kasus Pengamanan Kawasan Hutan	unit kasus	Statistik	Dishut	Februari 2026
2522	RPJMN 2025-2029 ;	07.05.033	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat	Statistik	Dishut	Februari 2026
2523	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.006	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Buah-buahan, Umbi-umbian, Jagung, Sagu, Tebu, Singkong)	ton	Statistik	Dishut	Februari 2026
2524	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	perkara	Statistik	Dishut	Februari 2026
2525	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.008	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	Statistik	Dishut	Februari 2026
2526	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.009	Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan (kelompok)	kelompok masyarakat	Statistik	Dishut	Februari 2026
2527	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.012	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2528	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.0006	Luas Kawasan Hutan Konservasi	juta hektare (juta ha)	Statistik	Dishut	Februari 2026
2529	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.013	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2530	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.014	Luas kawasan hutan yang diamankan	hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2531	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.016	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2532	SDGs ;		Luas Tutupan Hutan (LTH)	hektar (ha)	Statistik	Dishut	Februari 2026
2533	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.017	Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan	juta hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2534	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.021	Nilai PNBPD Fungsional Kehutanan	triliun rupiah	Statistik	Dishut	Februari 2026
2535	RPJMN 2025-2029 ;	07.03.0008	Penanganan Hasil Hutan Ilegal	olume kayu dalam meter kubik (m³)	Statistik	Dishut	Februari 2026
2536	RPJMN 2025-2029 ;		Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	unit	Statistik	Dishut	Februari 2026
2537	RPJMN 2025-2029 ;		Penurunan Laju Deforestasi	juta hektare per tahun	Statistik	Dishut	Februari 2026
2538	SDGs ;	07.03.028	Persentase Kawasan Hutan	persen	Statistik	Dishut	Februari 2026
2539	RPJMN 2025-2029 ;		Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Hutan	tonnes of carbon dioxide equivalent	Statistik	Dishut	Februari 2026
2540			Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan	izin	Statistik	Dishut	Februari 2026
2541			Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan Hutan Alam	izin	Statistik	Dishut	Februari 2026
2542			Jumlah Izin Untuk Hak Pengusahaan Kehutanan Hutan Tanam Industri	izin	Statistik	Dishut	Februari 2026
2543			Jumlah Produksi Kayu Bulat	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2544			Produksi Kayu IUPHHK HA	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2545			Produksi Kayu IUPHHK HTI, HTR, HKm	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2546			Produksi Kayu IPK, IPPKH, HGU dan Perseorangan	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2547			Jumlah Produksi Kayu Olahan	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2548			Jumlah Produksi Kayu Lapis dan/atau Laminated Veneer Lumber	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2549			Jumlah Produksi Kayu Veneer	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2550			Jumlah Produksi Kayu Gergajian	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2551			Jumlah Produksi Kayu Serpih Kayu	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2552			Jumlah Produksi Kayu Bare	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2553			Jumlah Produksi Kayu Block Board	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2554			Jumlah Produksi Kayu Moulding	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2555			Jumlah Produksi Kayu Secondary Process Plywood (Kayu Lapis)	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2556			Industri Primer Hasil Hutan	unit	Statistik	Dishut	Februari 2026
2557			Kawasan Hutan (luasan)	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2558			Kebakaran Hutan	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2559			Luas Areal Hutan yang Terbakar	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2560			Jumlah Korban Jiwa	Orang	Statistik	Dishut	Februari 2026
2561			Jumlah Titik Hotspot Kebakaran	titik	Statistik	Dishut	Februari 2026
2562			Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan		Statistik	Dishut	Februari 2026
2563			Luasan Inventarisasi Kawasan	kasus	Statistik	Dishut	Februari 2026
2564			Luas Penanaman Mangrove	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2565			Luas Kerusakan Kawasan Hutan	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2566			Jumlah HCV (High Conservation Value) dikawasan hutan	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2567			Rasio Kerusakan Kawasan Hutan		Statistik	Dishut	Februari 2026
2568			Jumlah Desa yang mendapatkan ijin perhutanan sosial	desa	Statistik	Dishut	Februari 2026
2569			Jumlah Polisi Hutan	Orang	Statistik	Dishut	Februari 2026
2570			Jumlah KPH	unit	Statistik	Dishut	Februari 2026
2571			Volume Kayu yang Dicuri	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2572			Jumlah Kasus Pencurian dan Penyeludupan Kayu	kasus	Statistik	Dishut	Februari 2026
2573			Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup	lokasi	Statistik	Dishut	Februari 2026
2574			Luas Lahan Hutan Lindung	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2575			Luas Lahan Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2576			Luas Lahan Hutan Produksi Tetap	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2577			Luas Lahan Hutan Produksi Terbatas	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2578			Luas Lahan Tubuh Air	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2579			Luas Lahan Hutan Produksi yang dapat di Konservasi (HPK)	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2580			Luas Lahan Areal Penggunaan Lain	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2581			Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2582			Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2583			Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2584			Luas Lahan Hutan Rakyat	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2585			Jumlah Pembinaan dan Perlindungan Hutan	kali	Statistik	Dishut	Februari 2026
2586			Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2587			Jumlah Kawasan Lindung Taman Nasional	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2588			Jumlah Kawasan Lindung Cagar Alam	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2589			Jumlah Kawasan Lindung Hutan Suaka Alam	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2590			Jumlah Kawasan Lindung Hutan	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2591			Jumlah Kawasan Lindung Taman Hutan Raya	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2592			Jumlah Kawasan Lindung Kebun Raya	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2593			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	kawasan	Statistik	Dishut	Februari 2026
2594			jumlah konflik tenurial dan hutan adat	kasus	Statistik	Dishut	Februari 2026
2595			Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	unit	Statistik	Dishut	Februari 2026
2596			Luas KBEP yang dikelola	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2597			Luas Kawasan Hutan yang dikelola masyarakat	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2598			Produksi Hasil Hutan Kayu	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2599			Produksi Hasil Hutan Non Kayu	m3	Statistik	Dishut	Februari 2026
2600			Laju Pertumbuhan Ekonomi sub Sektor Kehutanan	%	Statistik	Dishut	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2601			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Statistik	Dishut	Februari 2026
2602			penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)		Statistik	Dishut	Februari 2026
2603	RKPD 2025		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	ton	Statistik	Dishut	Februari 2026
2604	RKPD 2025		Produksi Hasil Hutan Kayu	m3/tahun	Statistik	Dishut	Februari 2026
2605	RKPD 2025		Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2606	RKPD 2025		Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2607			Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi Yang Dikelola		Statistik	Dishut	Februari 2026
2608	RKPD 2025		Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kelompok	Statistik	Dishut	Februari 2026
2609	RKPD 2025		Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2610	RKPD 2025		Luas DAS dan Sub DAS Yang Dikelola	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2611			Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan		Statistik	Dishut	Februari 2026
2612			Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju		Statistik	Dishut	Februari 2026
2613	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.01.01.00-01.04	Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2614	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.01.04.00-01.03	Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Hektar	Statistik	Dishut	Februari 2026
2615	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	06.03.02.02-01.01	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2616	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.02.05.01-01.01	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional		Statistik	Dishut	Februari 2026
2617	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	15.1.2.(a)	Luas kawasan hutan	Hektare	Statistik	Dishut	Februari 2026
2618	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	15.2.1(a)	Jumlah KPH Efektif		Statistik	Dishut	Februari 2026
2619	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	03.06.04.01-01.01	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (ha)		Statistik	Dishut	Februari 2026
2620	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.02.02.02-01.01	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya		Statistik	Dishut	Februari 2026
2621	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.02.02.01-01.02	Jumlah produksi kayu dari hutan produksi		Statistik	Dishut	Februari 2026
2622	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.02.01.00-01.01	Luas kawasan Hutan Lindung		Statistik	Dishut	Februari 2026
2623	Daftar Data Lemhannas	1.4.5.1	Luas wilayah hutan tutupan	km2	Statistik	Dishut	Februari 2026
2624	Daftar Data Lemhannas	3.6.4.1	Luas hutan produksi yang sudah didata potensi kayunya	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2625	Daftar Data Lemhannas	3.8.6.1	Luas areal hutan primer	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2626	Daftar Data Lemhannas	3.8.6.2	Total luas areal hutan lindung dan hutan konservasi	ha	Statistik	Dishut	Februari 2026
2627	RPJMD 2025-2029		Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2628	RPJMD 2025-2029		Indeks keragaman hayati		Statistik	Dishut	Februari 2026
2629	RPJMD 2025-2029		persentase peningkatan kelompok tani hutan (KTH)	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2630	RPJMD 2025-2029		Persentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2631	RPJMD 2025-2029		Persentase tutupan lahan pada sempadan sungai	%	Statistik	Dishut	Februari 2026
2632			Peta Persetujuan Penggunaan Kayu Kegiatan Non Kehutanan		Geospasial	Dishut	Februari 2026
2633			Peta Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor		Geospasial	Dishut	Februari 2026
2634			Peta Masterplan Kawasan Pertanian 2018-2023		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2635			Peta Roadmap Pembangunan Pertanian Tahap 1 Tahun 2025-2026		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2636			Peta Roadmap Pembangunan Pertanian Tahap 2 Tahun 2027-2029		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2637			Peta Roadmap Pembangunan Pertanian Tahap 3 Tahun 2030-2035		Geospasial	DPTPH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2638			Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2639			Peta Lahan Pertanian Hortikultura		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2640	Data Prioritas Nasional Tahun 2025	02.03.0039	Peta Kesesuaian Lahan Pertanian		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2641	Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2642			Peta Lahan Gambut skala 1:50.000		Geospasial	DPTPH	Februari 2026
2643			Peta Tanah Semi-Detail skala 1:50.000		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2644	RPJMN 2025-2029 ;	02.03.016	Jumlah Produksi Florikultura	ribu tangkai	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2645	RPJMN 2025-2029 ;	02.03.022	Jumlah Produksi Tanaman Obat	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2646	RPJMN 2025-2029 ;	02.03.0032	Luas Layanan Irigasi di Wilayah	hektar	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2647			Luas Lahan Sawah Irigasi	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2648			Luas Lahan Sawah Irigasi Ditanami padi	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2649			Luas Lahan Sawah Irigasi Ditanami tanaman lain	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2650			Luas Lahan Sawah Irigasi Sementara tidak diusahakan	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2651			Luas Lahan Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2652			Luas Lahan Sawah Pasang Surut	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2653			Luas Lahan Sawah Lainnya	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2654			Luas Lahan Tegal/Kebun	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2655			Luas Lahan/Huma	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2656			Luas Lahan yang sementara tidak diusahakan	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2657			Luas Lahan Sawah Potensial	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2658			Luas Lahan Sawah Difungsikan	ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2659			Jumlah Konsumsi Kelompok Padi - Padian	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2660			Jumlah Konsumsi Kelompok Umbi - Umbian	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2661			Jumlah Konsumsi Kelompok Pangan Hewani	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2662			Jumlah Konsumsi Kelompok Minyak dan Lemak	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2663			Jumlah Konsumsi Kelompok Buah/Biji Berminyak	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2664			Jumlah Konsumsi Kelompok Kacang - Kacangan	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2665			Jumlah Konsumsi Kelompok Gula	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2666			Jumlah Konsumsi Kelompok Sayur dan Buah	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2667			Jumlah Konsumsi Kelompok Lain - Lain	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2668			Total Jumlah Konsumsi	Gram/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2669			Penyuluh PNS Pertanian	orang	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2670			Penyuluh Kontrak	orang	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2671			Penyuluh Swadaya	orang	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2672			Jumlah BPP	unit	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2673			Kelompok Tani	poktan	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2674			Kontak Tani Nelayan Andalan	kelompok	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2675			Luas Panen Padi	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2676			Produksi Gabah	Ton GKP	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2677			Produksi Beras	Ton Beras	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2678			Produksi Padi	Ton GKG	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2679			Produktivitas Padi	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2680			Luas Panen Jagung	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2681			Produksi Jagung	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2682			Produktivitas Jagung	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2683			Luas Panen Kacang Kedelai	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2684			Produksi Kacang Kedelai	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2685			Produktivitas Kacang Kedelai	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2686			Luas Panen Kacang Hijau	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2687			Produksi Kacang Hijau	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2688			Produktivitas Kacang Hijau	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2689			Luas Panen Kacang Tanah	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2690			Produksi Kacang Tanah	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2691			Produktivitas Kacang Tanah	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2692			Luas Panen Ubi Kayu	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2693			Produksi Ubi Kayu	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2694			Produktivitas Ubi Kayu	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2695			Luas Panen Ubi Jalar	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2696			Produksi Ubi Jalar	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2697			Produktivitas Ubi Jalar	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2698			Produksi Padi dan Palawija	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2699			Stok Beras sbg Bahan Makanan	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2700			Rasio Pemenuhan Beras	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2701			Jumlah Produksi Mangga	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2702			Total Jumlah Pohon Mangga	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2703			Produktivitas pepohonanan Mangga	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2704			Jumlah Produksi Jeruk	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2705			Total Jumlah Pohon Jeruk	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2706			Produktivitas pepohonanan Jeruk	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2707			Jumlah Produksi Pepaya	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2708			Total Jumlah Pohon Pepaya	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2709			Produktivitas pepohonanan Pepaya	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2710			Jumlah Produksi Pisang	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2711			Total Jumlah Pohon Pisang	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2712			Produktivitas pepohonanan Pisang	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2713			Jumlah Produksi Nanas	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2714			Total Jumlah Pohon Nanas	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2715			Produktivitas pepohonanan Nanas	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2716			Jumlah Produksi Durian	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2717			Total Jumlah Pohon Durian	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2718			Produktivitas pepohonanan Durian	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2719			Jumlah Produksi Manggis	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2720			Total Jumlah Pohon Manggis	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2721			Produktivitas pepohonanan Manggis	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2722			Jumlah Produksi Melon	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2723			Total Luas Panen Melon	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2724			Produktivitas pepohonanan Melon	Kw/Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2725			Jumlah Produksi Alpukat	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2726			Total Jumlah Pohon Alpukat	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2727			Produktivitas pepohonanan Alpukat	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2728			Jumlah Produksi Buah Naga	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2729			Total Jumlah Pohon Buah Naga	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2730			Produktivitas pepohonanan Buah Naga	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2731			Jumlah Produksi Belimbing	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2732			Total Jumlah Pohon Belimbing	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2733			Produktivitas pepohonanan Belimbing	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2734			Jumlah Produksi Duku/Langsar	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2735			Total Jumlah Pohon Duku/Langsar	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2736			Produktivitas pepohonanan Duku/Langsar	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2737			Jumlah Produksi Jambu Biji	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2738			Total Jumlah Pohon Jambu Biji	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2739			Produktivitas pepohonanan Jambu Biji	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2740			Jumlah Produksi Jambu Air	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2741			Total Jumlah Pohon Jambu Air	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2742			Produktivitas pepohonanan Jambu Air	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2743			Jumlah Produksi Nangka/Cempedak	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2744			Total Jumlah Pohon Nangka/Cempedak	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2745			Produktivitas pepohonanan Nangka/Cempedak	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2746			Jumlah Produksi Salak	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2747			Total Jumlah Pohon Salak	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2748			Produktivitas pepohonanan Salak	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2749			Jumlah Produksi Rambutan	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2750			Total Jumlah Pohon Rambutan	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2751			Produktivitas pepohonanan Rambutan	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2752			Jumlah Produksi Sawo	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2753			Total Jumlah Pohon Sawo	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2754			Produktivitas pepohonanan Sawo	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2755			Jumlah Produksi Sirsak	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2756			Total Jumlah Pohon Sirsak	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2757			Produktivitas pepohonanan Sirsak	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2758			Jumlah Produksi Lengkeng	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2759			Total Jumlah Pohon Lengkeng	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2760			Produktivitas pepohonanan Lengkeng	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2761			Jumlah Produksi Sukun	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2762			Total Jumlah Pohon Sukun	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2763			Produktivitas pepohonanan Sukun	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2764			Jumlah Produksi Melinjo	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2765			Total Jumlah Pohon Melinjo	Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2766			Produktivitas pepohonanan Melinjo	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2767			Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2768			Produktivitas Perluasan Bawang Merah	Kw/Pohon	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2769			Jumlah Produksi Kubis	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2770			Jumlah Produksi Cabai	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2771			Jumlah Produksi Petsai/Sawi	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2772			Jumlah Produksi Daun Bawang	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2773			Jumlah Produksi Kembang Kol	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2774			Jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan Pemda	poktan	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2775			Ketersediaan pangan per kapita	Kg/Kapita/Tahun	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2776			Persentase Ketersediaan Pangan Daerah	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2777			Tingkat Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2778			Tingkat Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2779			Tingkat Konsumsi Energi	Kkal/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2780			Tingkat Konsumsi Protein	Gr/Kap/Hari	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2781	RPJMD 2025-2029		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2782			Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2783			Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2784			Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2785			Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2786			Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2787			Indikator anomali harga pangan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2788			Luas Pengembangan Kawasan Hortikultura		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2789			Kondisi Sawah Eksisting Prov Kaltim (Realisasi Tanam)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2790			Luas lahan baku sawah		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2791	RPJMD 2025-2029		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2792			Angka Kecukupan Energi (AKE)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2793			Angka Kecukupan Protein (AKP)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2794			Monitoring Stok Pangan Strategis		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2795			Data Cadangan Pangan Pemerintah		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2796			Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2797			Database Kemananan Pangan Segar		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2798			Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Produsen dan Konsumen		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2799			Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok Strategis		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2800			Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA)	Kecamatan	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2801			Neraca Bahan Makanan (NBM)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2802			Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2803			Jumlah Orang (Pemuda Perdesaan) yang didukung dan dilatih untuk mengembangkan usaha		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2804			Jumlah peserta pelatihan bagi petani milenial		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2805			Jumlah Wirausaha Muda Pertanian yang ditumbuhkan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2806			Persentase luas sawah beririgasi		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2807			Jumlah Bantuan Benih Padi dan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2808			Calon Petani Calon Lapangan (CPCL)		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2809			Jumlah alokasi pupuk bersubsidi		Statistik	DPTPH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2810			Jumlah Bantuan Pemerintah Berupa Alat dan Mesin Pertanian Prapanen		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2811			Jumlah Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Sistem Irigasi Perpompaan dan Perpipaan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2812			Jumlah realisasi pupuk bersubsidi		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2813			Nilai Tukar Petani sub sektor tanaman pangan		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2814			Nilai Tukar Petani sub sektor hortikultura		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2815	RPJMD 2025-2029		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	skor	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2816	RKPD 2025		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangsannya	Kecamatan	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2817	RKPD 2025		Persentase daerah rawan pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2818			Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2819			Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2820			Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2821			Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2822	RKPD 2025		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2823	RKPD 2025		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2824	RKPD 2025		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2825	RKPD 2025		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2826			Rasio luas serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		Statistik	DPTPH	Februari 2026
2827	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	2.4.1.(a)	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	Ha	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2828	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.01.04-01.01	Jumlah bantuan unit pengolahan pupuk organik yang disalurkan	Unit	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2829	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.03.03-01.01	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan P	Orang	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2830	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.02.00-01.08	Luas panen komoditas pertanian sektor l	Hektare	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2831	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.04.01-01.01	Jumlah unit rehabilitasi jaringan irigasi t	Unit	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2832	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.04.00-01.01	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanju	Hektare	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2833	Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.03.02.00-01.01	Jumlah Penggunaan Benih Besertifikat (B	Ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2834	Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	Komoditas Unggulan	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2835	Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Luas Tanam Komoditas Pertanian	Hektare	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2836	Daftar Data Lemhannas	3.1.4.1	Persentase potensi lokal beras terhadap potensi nasional	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2837	Daftar Data Lemhannas	3.1.5.2	Jumlah kebutuhan beras	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2838	Daftar Data Lemhannas	3.1.8.2	Jumlah kebutuhan gula	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2839	Daftar Data Lemhannas	3.1.10.1	Persentase potensi lokal jagung terhadap potensi nasional	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2840	Daftar Data Lemhannas	3.1.11.2	Jumlah kebutuhan jagung	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2841	Daftar Data Lemhannas	3.1.13.1	Persentase potensi lokal kacang-kacangan terhadap potensi nasional	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2842	Daftar Data Lemhannas	3.1.14.2	Jumlah kebutuhan kedelai	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2843	Daftar Data Lemhannas	3.1.24.1	Persentase potensi lokal sayuran terhadap potensi nasional	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2844	Daftar Data Lemhannas	3.1.25.2	Jumlah kebutuhan sayuran	ton	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2845	Daftar Data Lemhannas	3.1.27.1	Persentase potensi lokal buah-buahan terhadap potensi nasional	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2846	RPJPD 2025-2045		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2847	RPJMD 2025-2029		Persentase jumlah cadangan pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2848	RPJMD 2025-2029		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2849	RPJMD 2025-2029		Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2850	RPJMD 2025-2029		Peningkatan Produksi tanaman pangan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2851	RPJMD 2025- 2029		Peningkatan Produksi Hortikultura	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2852	RPJMD 2025- 2029		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2853	RPJMD 2025- 2029		Persentase Penanganan bencana pertanian	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2854	RPJMD 2025- 2029		persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2855	RPJMD 2025- 2029		Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	Statistik	DPTPH	Februari 2026
2856			Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Perkebunan	izin	Statistik	Disbun	Februari 2026
2857			Luas Areal Karet	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2858			Luas Tanam Karet	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2859			Jumlah Produksi Karet	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2860			Produktivitas Karet	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2861			Jumlah Tenaga Kerja Karet	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2862			Luas Areal Kopi	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2863			Luas Tanam Kopi	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2864			Jumlah Produksi Kopi	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2865			Produktivitas Kopi	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2866			Jumlah Tenaga Kerja Kopi	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2867			Luas Areal Sawit	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2868			Luas Tanam Sawit	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2869	RPJMN 2025-2029 ;	02.04.005	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2870			Produktivitas Sawit	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2871			Jumlah Tenaga Kerja Sawit	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2872			Luas Areal Kakao	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2873			Luas Tanam Kakao	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2874			Jumlah Produksi Kakao	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2875			Produktivitas Kakao	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2876			Jumlah Tenaga Kerja Kakao	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2877			Luas Areal Lada	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2878			Luas Tanam Lada	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2879			Jumlah Produksi Lada	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2880			Produktivitas Lada	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2881			Jumlah Tenaga Kerja Lada	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2882			Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2883			Luas Tanam Kelapa Dalam	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2884			Jumlah Produksi Kelapa Dalam	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2885			Produktivitas Kelapa Dalam	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2886			Jumlah Tenaga Kerja Kelapa Dalam	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2887			Luas Areal Cengkeh	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2888			Luas Tanam Cengkeh	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2889			Jumlah Produksi Cengkeh	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2890			Produktivitas Cengkeh	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2891			Jumlah Tenaga Kerja Cengkeh	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2892			Luas Areal Aren	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2893			Luas Tanam Aren	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2894			Jumlah Produksi Aren	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2895			Produktivitas Aren	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2896			Jumlah Tenaga Kerja Aren	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2897			Luas Areal Lain - Lain	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2898			Luas Tanam Lain - Lain	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2899			Jumlah Produksi Lain - Lain	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2900			Luas Tanam Karet Perkebunan Besar Pemerintah	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2901			Jumlah Produksi Karet Perkebunan Besar Pemerintah	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2902			Produktivitas Karet Perkebunan Besar Pemerintah	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2903			Jumlah Tenaga Kerja Karet Perkebunan Besar Pemerintah	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2904			Luas Tanam Sawit Perkebunan Besar Pemerintah	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2905			Jumlah Produksi Sawit Perkebunan Besar Pemerintah	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2906			Produktivitas Sawit Perkebunan Besar Pemerintah	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2907			Jumlah Tenaga Kerja Sawit Perkebunan Besar Pemerintah	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2908			Luas Tanam Karet Perkebunan Besar Swasta	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2909			Jumlah Produksi Karet Perkebunan Besar Swasta	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2910			Produktivitas Karet Perkebunan Besar Swasta	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2911			Jumlah Tenaga Kerja Karet Perkebunan Besar Swasta	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2912			Luas Tanam Sawit Perkebunan Besar Swasta	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2913			Jumlah Produksi Sawit Perkebunan Besar Swasta	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2914			Produktivitas Sawit Perkebunan Besar Swasta	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2915			Jumlah Tenaga Kerja Sawit Perkebunan Besar Swasta	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2916			Luas Tanam Karet Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2917			Jumlah Produksi Karet Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2918			Produktivitas Karet Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2919			Luas Tanam Kopi Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2920			Jumlah Produksi Kopi Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2921			Produktivitas Kopi Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2922			Luas Tanam Sawit Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2923			Jumlah Produksi Sawit Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2924			Produktivitas Sawit Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2925			Luas Tanam Kakao Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2926			Jumlah Produksi Kakao Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2927			Produktivitas Kakao Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2928			Luas Tanam Lada Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2929			Jumlah Produksi Lada Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2930			Produktivitas Lada Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2931			Luas Tanam Kelapa Dalam Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2932			Jumlah Produksi Kelapa Dalam Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2933			Produktivitas Kelapa Dalam Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2934			Luas Tanam Cengkeh Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2935			Jumlah Produksi Cengkeh Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2936			Produktivitas Cengkeh Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2937			Luas Tanam Aren Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2938			Jumlah Produksi Aren Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2939			Produktivitas Aren Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2940			Luas Tanam Kemiri Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2941			Jumlah Produksi Kemiri Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2942			Produktivitas Kemiri Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2943			Luas Tanam Sagu Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2944			Jumlah Produksi Sagu Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2945			Produktivitas Sagu Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2946			Luas Tanam Kayu Manis Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2947			Jumlah Produksi Kayu Manis Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2948			Produktivitas Kayu Manis Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2949			Luas Tanam Panili Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2950			Jumlah Produksi Panili Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2951			Produktivitas Panili Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2952			Luas Tanam Pala Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2953			Jumlah Produksi Pala Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2954			Produktivitas Pala Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2955			Luas Tanam Pinang Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2956			Jumlah Produksi Pinang Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2957			Produktivitas Pinang Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2958			Luas Tanam Tebu Perkebunan Kecil/Rakyat	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2959			Jumlah Produksi Tebu Perkebunan Kecil/Rakyat	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2960			Produktivitas Tebu Perkebunan Kecil/Rakyat	ton/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2961			Jumlah Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	industri	Statistik	Disbun	Februari 2026
2962			Jumlah Produk turunan Perkebunan	produk	Statistik	Disbun	Februari 2026
2963			Produksi CPO	ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2964			Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)	perusahaan	Statistik	Disbun	Februari 2026
2965			Jumlah Perusahaan yang mengembangkan POME	perusahaan	Statistik	Disbun	Februari 2026
2966			Kapasitas Terpasang POME	perusahaan	Statistik	Disbun	Februari 2026
2967			Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	kelompok	Statistik	Disbun	Februari 2026
2968			Luas Perkebunan Rakyat yang	ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2969			Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV).	ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2970			Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2971			Produksi Komoditi Perkebunan	Ton	Statistik	Disbun	Februari 2026
2972			Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat	orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2973			Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari Business Usual (BAU)	Jumlah Sertifikat (STDB)	Statistik	Disbun	Februari 2026
2974			Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (Smallholder Plantation Owner)	Pelaku Usaha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2975			Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	jenis	Statistik	Disbun	Februari 2026
2976			Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2977	RKPD 2025		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2978	RKPD 2025		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2979	RKPD 2025		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2980	RKPD 2025		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	Statistik	Disbun	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
2981	RKPD 2025		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2982	RKPD 2025		Luas Kebun yang Dibangun	Ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2983			Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2984			Pabrik kelapa sawit		Statistik	Disbun	Februari 2026
2985			Izin perkebunan (ILOK dan IUP)		Statistik	Disbun	Februari 2026
2986			Penutup lahan kelapa sawit		Statistik	Disbun	Februari 2026
2987			Instalasi Pengolahan Biogas dari POME		Statistik	Disbun	Februari 2026
2988			Surat Tanda Daftar Kebun Budidaya		Statistik	Disbun	Februari 2026
2989			Penutup lahan sawit perkebunan rakyat		Statistik	Disbun	Februari 2026
2990			Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000		Statistik	Disbun	Februari 2026
2991			Peta PerKomoditi Perkebunan		Statistik	Disbun	Februari 2026
2992	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah petani pekebun perkebunan rakyat komoditas pertanian sektor perkebunan	Orang	Statistik	Disbun	Februari 2026
2993	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	kg/ha	Statistik	Disbun	Februari 2026
2994			Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh kelompok tani	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2995			Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2996			Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2997			Persentase Pelaku Usaha Perkebunan Yang Bersertifikasi Berkelanjutan	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2998			Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD	%	Statistik	Disbun	Februari 2026
2999			Pulau (Titik)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3000			Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan		Geospasial	DKP	Februari 2026
3001			Peta Rencana Tata Ruang Laut		Geospasial	DKP	Februari 2026
3002			Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3003			Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan		Geospasial	DKP	Februari 2026
3004			Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3005			Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3006			Peta Laut		Geospasial	DKP	Februari 2026
3007			Peta Wilayah penangkapan		Geospasial	DKP	Februari 2026
3008			Peta Lahan Ekosistem Laut		Geospasial	DKP	Februari 2026
3009			Peta Hutan Bakau/Mangrove (wilayah Pesisir)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3010			Peta Terumbu Karang		Geospasial	DKP	Februari 2026
3011			Peta Padang Lamun		Geospasial	DKP	Februari 2026
3012			Peta Perikanan Budidaya		Geospasial	DKP	Februari 2026
3013			Peta Perairan Umum		Geospasial	DKP	Februari 2026
3014	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peta Sebaran Perikanan Budidaya 1:50.000 (16)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3015	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan 1:50.000 (4)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3016	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peta Terumbu Karang 1:50.000 (14)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3017	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT 1:50.000		Geospasial	DKP	Februari 2026
3018	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Terumbu Karang skala 1:50.000 (14)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3019	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000 (4)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3020	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000 (7)		Geospasial	DKP	Februari 2026
3021	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Padang Lamun skala 1:50.000 (15)		Geospasial	DKP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3022	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan skala 1:5.000-1:250.000		Geospasial	DKP	Februari 2026
3023	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Daerah Penangkapan Ikan di Jalur Penangkapan Ikan skala 1:50.000		Geospasial	DKP	Februari 2026
3024	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0001	Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP	eks (skala 0-1	Statistik	DKP	Februari 2026
3025	RPJMN 2025-2029 ;		Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		Statistik	DKP	Februari 2026
3026	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0002	Indeks Kesiapan Sarana Pengawasan SDKP	eks (skala 0-1	Statistik	DKP	Februari 2026
3027	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0003	Indeks Kinerja Kapal Pengawas (ikp)	eks (tanpa satu	Statistik	DKP	Februari 2026
3028	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0005	Indeks Kinerja Speedboat Pengawas	eks (tanpa satu	Statistik	DKP	Februari 2026
3029	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.002	Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Statistik	DKP	Februari 2026
3030	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.003	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	indeks	Statistik	DKP	Februari 2026
3031	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0006	Jumlah Dokumen Materi Teknis yang Disusun pada Tahun Tertentu	jumlah dokumen (unit dokumen)	Statistik	DKP	Februari 2026
3032	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0007	Jumlah kegiatan partisipatif masyarakat dalam pengumpulan sampah	kegiatan	Statistik	DKP	Februari 2026
3033	SDGs ;	07.04.004	Jumlah nelayan yang terlindungi	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3034	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.04.0009	Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh (KPU)	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3035	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0010	Jumlah Produksi Garam Rakyat	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3036	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.04.0012	Jumlah Total Pelaku Usaha (JKPU)	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3037	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.04.007	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	juta hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3038	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.008	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola	juta hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3039	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0013	luas kawasan konservasi perairan	hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3040	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	07.04.017	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3041	SDGs ;	09.02.040	Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3042	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.018	Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3043	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.020	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3044	SDGs ;		Produksi Perikanan Nasional	rupiah	Statistik	DKP	Februari 2026
3045	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.021	Produktivitas Lahan Garam Rakyat	ton per hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3046	SDGs ;	07.04.022	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	dokumen	Statistik	DKP	Februari 2026
3047	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0036	Total Dokumen Materi Teknis yang Direncanakan	okumen (unit d	Statistik	DKP	Februari 2026
3048	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.023	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3049	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.005	Volume Produksi Garam	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3050			Luas Laut	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3051			Luas Wilayah penangkapan	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3052			Luas Lahan Ekosistem Laut	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3053			Luas Hutan Bakau/Mangrove (wilayah Pesisir)	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3054			Luas Terumbu Karang	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3055			Luas Padang Lamun	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3056			Luas Perikanan Budidaya	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3057			Luas Perairan Umum	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3058			Luas Lahan Jaring Apung Tawar	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3059			Luas Lahan Keramba	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3060			Luas Lahan Kolam Air Tawar	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3061			Luas Lahan Tambak Ikan	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3062			Luas Lahan Budidaya Laut/Pantai	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3063			Jumlah Nelayan	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3064			Nelayan Laut Perikanan Tangkap	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3065			Nelayan Perairan Umum Daratan	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3066			Rumah Tangga Perikanan Perikanan Laut	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3067			Rumah Tangga Perikanan Perairan Umum	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3068			Rumah Tangga Perikanan	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3069			Jumlah Kapal Penangkap Ikan	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3070			Jumlah Perahu Tanpa Motor Perikanan Laut	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3071			Jumlah Perahu Motor Tempel Perikanan Laut	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3072			Jumlah Kapal Motor Perikanan Laut	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3073			Jumlah Perahu Tanpa Motor Perairan Umum	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3074			Jumlah Perahu Motor Tempel Perairan Umum	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3075			Jumlah Kapal Motor Perairan Umum	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3076			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3077			Jumlah Pembudidaya Perikanan Budidaya	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3078			Rumah Tangga Perikanan Budidaya	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3079			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3080			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Tambak	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3081			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kolam	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3082			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Keramba	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3083			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut/Pantai	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3084			Rumah Tangga Perikanan Budidaya Sawah	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3085			Produksi Perikanan Budidaya Jaring Apung Tawar	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3086			Produksi Perikanan Budidaya Tambak	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3087			Produksi Perikanan Budidaya Kolam	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3088			Produksi Perikanan Budidaya Keramba	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3089			Produksi Perikanan Budidaya Laut/Pantai	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3090			Produksi Perikanan Budidaya Sawah	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3091			Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3092			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Perairan Umum/Jaring Apung Tawar	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3093			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Tambak	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3094			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kolam	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3095			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Keramba	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3096			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut/Pantai	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3097			Nilai Produksi Perikanan Budidaya Sawah	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3098			Jumlah UMKM pengolahan perikanan / UPI air tawar	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3099			Omset produksi pengolahan perikanan / UPI air tawar	Juta Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3100			Jumlah perusahaan pengolahan perikanan / UPI air laut	perusahaan	Statistik	DKP	Februari 2026
3101			Omset produksi perusahaan pengolahan perikanan / UPI air laut	Juta Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3102			Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3103			Produksi usaha pembenihan	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3104			Nilai produksi usaha pembenihan	Juta Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3105			Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3106			Kelompok nelayan (KUB)	kelompok	Statistik	DKP	Februari 2026
3107			Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah	kelompok	Statistik	DKP	Februari 2026
3108			Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	kelompok	Statistik	DKP	Februari 2026
3109			Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah	kelompok	Statistik	DKP	Februari 2026
3110			Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3111			Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Unit	Statistik	DKP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3112	RPJMD 2025-2029		Angka Konsumsi Ikan	g/kapita/tahun	Statistik	DKP	Februari 2026
3113			Jumlah Konsumsi Ikan		Statistik	DKP	Februari 2026
3114			Nilai Ekspor Perikanan		Statistik	DKP	Februari 2026
3115			Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman		Statistik	DKP	Februari 2026
3116			Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan		Statistik	DKP	Februari 2026
3117			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha		Statistik	DKP	Februari 2026
3118			Banyaknya pelaku usaha yang patuh		Statistik	DKP	Februari 2026
3119			Jumlah pelaku usaha		Statistik	DKP	Februari 2026
3120			Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)		Statistik	DKP	Februari 2026
3121			Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)		Statistik	DKP	Februari 2026
3122			Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)		Statistik	DKP	Februari 2026
3123	RKPD 2025		Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	Statistik	DKP	Februari 2026
3124	RKPD 2025		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3125			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut		Statistik	DKP	Februari 2026
3126			Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar		Statistik	DKP	Februari 2026
3127	RKPD 2025		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3128	RKPD 2025		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	Statistik	DKP	Februari 2026
3129	RKPD 2025		Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	Statistik	DKP	Februari 2026
3130			Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan		Statistik	DKP	Februari 2026
3131			Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan (%)		Statistik	DKP	Februari 2026
3132			Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya (NTNP)		Statistik	DKP	Februari 2026
3133	RKPD 2025		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	g/kapita/tahun	Statistik	DKP	Februari 2026
3134			Luas Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)		Statistik	DKP	Februari 2026
3135			Pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan atas peraturan perundangundangan yang berlaku di Bidang Kelautan dan Perikanan		Statistik	DKP	Februari 2026
3136	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Luas Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	Ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3137	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kawasan wisata bahari yang dikelola	Kawasan	Statistik	DKP	Februari 2026
3138	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3139	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produksi garam	Kg	Statistik	DKP	Februari 2026
3140	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah perikanan hasil tangkapan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3141	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Rata-rata hasil tangkapan yang dilaporkan dalam 5 (lima) tahun terakhir (ton)	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3142	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove	Hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3143	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	Hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3144	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		luas kawasan konservasi baru yang dicadangkan	Hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3145	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Produksi ikan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3146	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah perikanan hasil budidaya	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3147	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi Hulu Hilir	Unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3148	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produksi rumput laut	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3149	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	Dokumen	Statistik	DKP	Februari 2026
3150	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Luas Kumulatif Konservasi kawasan kelautan	Hektare	Statistik	DKP	Februari 2026
3151	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah WPP	WPP	Statistik	DKP	Februari 2026
3152	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah unit pengelola WPP	Unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3153	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang	Persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3154	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Total Hasil Tangkapan Jenis Ikan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3155	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	WPP	Statistik	DKP	Februari 2026
3156	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kelompok masyarakat yang disuluh	Kelompok Masyarakat	Statistik	DKP	Februari 2026
3157	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3158	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah masyarakat kelautan perikanan yang dilatih	Orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3159	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan		Statistik	DKP	Februari 2026
3160	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan	Persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3161	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Kegiatan	Statistik	DKP	Februari 2026
3162	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kasus Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Kawasan	Statistik	DKP	Februari 2026
3163	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3164	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persen	Statistik	DKP	Februari 2026
3165	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Indeks	Statistik	DKP	Februari 2026
3166	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3167	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah lokasi pengendalian pemanfaatan ruang laut Kaltim	Lokasi	Statistik	DKP	Februari 2026
3168	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Hasil Perikanan Tangkap, Budidaya	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3169	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Angka Konsumsi Ikan	kg/Kapita/Tahun	Statistik	DKP	Februari 2026
3170	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kapal Nelayan	Unit	Statistik	DKP	Februari 2026
3171	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Produksi Olahan Ikan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3172	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	Kelompok	Statistik	DKP	Februari 2026
3173	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	orang	Statistik	DKP	Februari 2026
3174	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Rumah Tangga Perikanan	RTP	Statistik	DKP	Februari 2026
3175	Daftar Data Lemhannas		Jumlah pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni	pulau	Statistik	DKP	Februari 2026
3176	Daftar Data Lemhannas		Jumlah pulau kecil terluar yang berpenghuni	pulau	Statistik	DKP	Februari 2026
3177	Daftar Data Lemhannas		Jumlah pulau keseluruhan	pulau	Statistik	DKP	Februari 2026
3178	Daftar Data Lemhannas		Target produksi tangkap	ribu ton/tahun	Statistik	DKP	Februari 2026
3179	Daftar Data Lemhannas		Potensi lahan perikanan budidaya	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3180	Daftar Data Lemhannas		Potensi lahan perikanan budidaya yang sudah dimanfaatkan	ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3181	RPJMD 2025-2029		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	Statistik	DKP	Februari 2026
3182	RPJMD 2025-2029		Jumlah Produksi perikanan tangkap	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3183	RPJMD 2025-2029		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3184	RPJMD 2025-2029		Luas Kawasan Konservasi	Ha	Statistik	DKP	Februari 2026
3185	RPJMD 2025-2029		Jumlah Pendaratan Hasil Perikanan di PelabuhanPerikanan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3186	RPJMD 2025-2029		Nilai produk olahan hasil perikanan	Rp	Statistik	DKP	Februari 2026
3187	RPJMD 2025-2029		Jumlah produk olahanhasil perikanan	Ton	Statistik	DKP	Februari 2026
3188			Peta Lokasi Kelompok Tani Peternakan Kalimantan Tim		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3189			Peta Pengembangan Desa Korporasi Ternak		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3190			Peta Sebaran Rumah Potong Hewan		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3191			Peta Sebaran Miniranch		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3192			Peta Sebaran Irigasi Perpompaan untuk Peternakan		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3193			Peta Sebaran Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3194			Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000		Geospasial	Disnakeswan	Februari 2026
3195			Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3196			Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3197			Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3198			Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3199			Rata-Rata Kepemilikan per KK Ternak Sapi Potong	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3200			Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3201			Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3202			Jumlah Produksi Susu per Tahun Ternak Sapi Perah	liter	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3203			Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3204			Rata-Rata Kepemilikan per KK Ternak Sapi Perah	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3205			Rata-Rata Produktivitas per Ekor per Hari Ternak Sapi Perah	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3206			Jumlah Populasi Kambing	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3207			Jumlah Produksi Daging Kambing	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3208			Jumlah Konsumsi Daging Kambing	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3209			Jumlah Populasi Domba	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3210			Jumlah Produksi Daging Domba	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3211			Jumlah Konsumsi Daging Domba	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3212			Jumlah Populasi Babi	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3213			Jumlah Produksi Daging Babi	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3214			Jumlah Konsumsi Daging Babi	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3215			Jumlah Populasi Kerbau	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3216			Jumlah Produksi Daging Kerbau	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3217			Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3218			Jumlah Populasi Kuda	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3219			Jumlah Produksi Daging Kuda	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3220			Jumlah Konsumsi Daging Kuda	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3221			Jumlah Populasi Kelinci	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3222			Jumlah Produksi Daging Kelinci	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3223			Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3224			Jumlah Populasi Ayam Buras	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3225			Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3226			Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3227			Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3228			Jumlah Populasi Ayam Petelur	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3229			Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3230			Jumlah Populasi Ayam Pedaging	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3231			Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3232			Jumlah Konsumsi Daging Ayam	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3233			Jumlah Populasi Itik	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3234			Jumlah Produksi Telur Itik	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3235			Jumlah Produksi Daging Itik	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3236			Jumlah Konsumsi Daging Itik	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3237			Jumlah populasi Itik Manila	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3238			Jumlah Produksi Telur Itik Manila	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3239			Jumlah Produksi Daging Itik Manila	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3240			Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3241			Jumlah Populasi Burung Puyuh	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3242			Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3243			Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3244			Jumlah Konsumsi Daging Burung	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3245			Jumlah Populasi Burung Dara	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3246			Jumlah Produksi Daging Burung Dara	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3247			Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3248			Industri Peternakan	unit	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3249			Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	perusahaan	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3250			Jumlah Koperasi Peternakan	unit	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3251			Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	unit	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3252			Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3253			Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3254			Komoditas Masuk Ternak Kerbau	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3255			Komoditas Masuk Ternak Kambing	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3256			Komoditas Masuk Ternak Domba	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3257			Komoditas Masuk Ternak Babi	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3258			Komoditas Masuk Ternak Kuda	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3259			Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3260			Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3261			Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3262			Komoditas Masuk Ternak Itik	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3263			Komoditas Masuk Ternak Kelinci	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3264			Komoditas Masuk Ternak Puyuh	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3265			Komoditas Masuk Ternak Merpati	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3266			Komoditas Masuk Ternak Itik Manila	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3267			Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3268			Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3269			Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3270			Komoditas Masuk Hasil Ternak Kambing	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3271			Komoditas Masuk Hasil Ternak Domba	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3272			Komoditas Masuk Hasil Ternak Babi	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3273			Komoditas Masuk Hasil Ternak Kuda	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3274			Komoditas Masuk Hasil Ternak Ayam Buras	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3275			Komoditas Masuk Hasil Ternak Ayam Ras Pedaging	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3276			Komoditas Masuk Hasil Ternak Itik	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3277			Komoditas Masuk Hasil Ternak Kelinci	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3278			Komoditas Masuk Hasil Ternak Puyuh	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3279			Komoditas Masuk Hasil Ternak Merpati	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3280			Komoditas Masuk Hasil Ternak Jerohan	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3281			Komoditas Masuk Hasil Ternak Kulit	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3282			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Ayam Buras ()	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3283			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Ayam Ras Petelur (Kg)	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3284			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Itik (Kg)	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3285			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Puyuh (Kg)	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3286			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Ayam Buras ()	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3287			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Ayam Ras Petelur (Butir)	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3288			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Itik (Butir)	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3289			Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur Puyuh (Butir)	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3290			Komoditas Masuk Susu	kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3291			Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3292			Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3293			Komoditas Keluar Ternak Kerbau	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3294			Komoditas Keluar Ternak Kambing	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3295			Komoditas Keluar Ternak Domba	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3296			Komoditas Keluar Ternak Babi	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3297			Komoditas Keluar Ternak Kuda	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3298			Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3299			Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3300			Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3301			Komoditas Keluar Ternak Itik	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3302			Komoditas Keluar Ternak Kelinci	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3303			Komoditas Keluar Ternak Puyuh	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3304			Komoditas Keluar Ternak Merpati	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3305			Komoditas Keluar Ternak Itik Manila	ekor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3306			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Potong	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3307			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Perah	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3308			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kerbau	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3309			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kambing	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3310			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Domba	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3311			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Babi	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3312			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kuda	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3313			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Buras	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3314			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3315			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Itik	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3316			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kelinci	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3317			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Puyuh	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3318			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Merpati	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3319			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Jeroan	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3320			Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kulit	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3321			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3322			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3323			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Kg) Itik	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3324			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3325			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3326			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3327			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Butir) Itik	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3328			Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh	Butir	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3329			Komoditas Keluar Susu	Kg	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3330			Kelompok Usaha Ternak	kelompok	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3331			Jumlah Kelompok Tani yang dilatih budidaya peternakan		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3332			Jumlah Kawasan Peternakan		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3333			Jumlah usaha pengolahan hasil		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3334			Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Sapi Gila		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3335			Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Flu Burung		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3336			Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Flu Babi		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3337			Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Kuku dan Mulut pada hewan		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3338			Jumlah Hewan yang Tertular Penyakit Jembrana		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3339			Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3340			Persentase kejadian dan penurunan kasus penyakit hewan menular		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3341			Data Jumlah Peternak (diusulkan jumlah data kelompok petani komoditi peternakan)		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3342			Konsumsi Daging per Kapita per Tahun		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3343			Jumlah kelahiran sapi bibit		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3344			Jumlah bibit HPT yang diproduksi		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3345			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3346			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3347			Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3348			Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3349			Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3350			Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3351			Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3352			Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	skor	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3353			Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan (%)		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3354			Nilai Tukar Petani Peternak		Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3355		01.03.02.00-01.05	Jumlah Produksi daging	juta ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3356		01.03.04.00-01.02	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Unit	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3357		01.03.03.01-01.02	Jumlah petani penerima subsidi premi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS)	Orang	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3358			Jenis Komoditas Unggulan Sektor Petern	jenis	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3359			Jumlah Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3360		3.1.17.2	Jumlah kebutuhan daging ayam	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3361		3.1.21.2	Jumlah kebutuhan daging sapi	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3362		3.1.31.2	Jumlah kebutuhan susu	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3363		3.1.34.1	Persentase produksi lokal telur terhadap produksi nasional	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3364		3.1.35.2	Jumlah kebutuhan telur	ton	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3365			persentase kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3366			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3367			Persentase Unit Usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3368			Peningkatan Produksi Komoditas peternakan	%	Statistik	Disnakeswan	Februari 2026
3369	RPJMN 2025-2029 ;		Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3370	RPJMN 2025-2029 ;		Pertumbuhan ekspor subsektor Aplikasi	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3371	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.054	Pertumbuhan ekspor Subsektor Fesyen dan	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3372	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.055	Pertumbuhan ekspor Subsektor Film, Animasi	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3373	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.056	Pertumbuhan ekspor Subsektor Kuliner	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3374	RPJMN 2025-2029 ;		Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3375	RPJMN 2025-2029 ;		Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas	lokasi	Statistik	Dispar	Februari 2026
3376	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3377	RPJMN 2025-2029 ; SDGs ;	02.11.0050	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3378	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Laju Pertumbuhan Kontribusi Pariwisata	persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3379	RPJMN 2025-2029 ;		Pendapatan dari wisatawan nusantara	miliar rupiah	Statistik	Dispar	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3380	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Penduduk yang Menginap di Akademi	kunjungan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3381	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Jumlah Penduduk yang Mengunjungi Objek	kunjungan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3382	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Wisatawan Nusantara	orang (jumlah	Statistik	Dispar	Februari 2026
3383			Jumlah Usaha Restoran dan Rumah Makan	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3384			Jumlah Seluruh Objek Wisata	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3385			Jumlah Objek Wisata Taman Wisata Alam	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3386			Jumlah Objek Wisata Event Budaya	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3387			Jumlah Objek Wisata Buatan	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3388			Jumlah Objek Wisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3389			Jumlah Objek Wisata Museum	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3390			Jumlah Objek Wisata Desa Kerajinan Tradisional	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3391			Jumlah Objek Wisata Taman Nasional	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3392			Jumlah Objek Wisata Taman Hutan	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3393			Jumlah Objek Wisata Taman Wisata	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3394			Jumlah Objek Wisata Hutan Mangrove	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3395			Jenis Objek Wisata Alam	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3396			Jenis Objek Sejarah dan Budaya	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3397			Jenis Objek Wisata Buatan	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3398			Jenis Objek Wisata Kehidupan Masyarakat	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3399			Jenis Objek Wisata Bahari	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3400			Jenis Objek Wisata Taman Hutan Raya	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3401			Jenis Objek Wisata Taman Nasional	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3402			Jenis Objek Wisata Taman Wisata Laut	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3403			Jenis Objek Wisata Religi	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3404			Total Jenis Objek Wisata	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3405			Total Objek Wisata	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3406			Jumlah Hotel Bintang Lima	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3407			Jumlah Kamar Hotel Bintang Lima	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3408			Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang Lima	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3409			Jumlah Hotel Bintang empat	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3410			Jumlah Kamar Hotel Bintang empat	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3411			Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang empat	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3412			Jumlah Hotel Bintang Tiga	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3413			Jumlah Kamar Hotel Bintang Tiga	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3414			Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang Tiga	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3415			Jumlah Hotel Bintang Dua	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3416			Jumlah Kamar Hotel Bintang Dua	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3417			Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang Dua	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3418			Jumlah Hotel Bintang Satu	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3419			Jumlah Kamar Hotel Bintang Satu	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3420			Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3421			Jumlah Hotel Non Bintang	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3422			Jumlah Kamar Hotel Non Bintang	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3423			Jumlah Tempat Tidur Hotel Non Bintang	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3424			Total Wisatawan	Orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3425			Target Kunjungan Wisata Tiap Tahun	Orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3426			Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3427			Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Derawan dan sekitarnya		Statistik	Dispar	Februari 2026
3428			Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay)		Statistik	Dispar	Februari 2026
3429			Jumlah Kamar Hotel yang Terjual Hotel Bintang		Statistik	Dispar	Februari 2026
3430			Jumlah Kamar Hotel yang Terjual Hotel Non Bintang		Statistik	Dispar	Februari 2026
3431			Tingkat Hunian Kamar Hotel Bintang		Statistik	Dispar	Februari 2026
3432			Tingkat Hunian Kamar Hotel Non Bintang		Statistik	Dispar	Februari 2026
3433			Jumlah Kamar Hotel/Penginapan yang Terisi		Statistik	Dispar	Februari 2026
3434			Jumlah Rata-rata Penggunaan Kamar Hotel		Statistik	Dispar	Februari 2026
3435			Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay) Hotel Bintang		Statistik	Dispar	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3436			Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3437			Jumlah Pramuwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3438			Jumlah Pramuwisata Laki-Laki		Statistik	Dispar	Februari 2026
3439			Jumlah Pramuwisata Perempuan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3440			Cinderamata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3441			Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB		Statistik	Dispar	Februari 2026
3442			Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total		Statistik	Dispar	Februari 2026
3443			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3444			Jumlah SDM Pariwisata yang dibina		Statistik	Dispar	Februari 2026
3445			Jumlah Masyarakat yang Terhubung dalam Pokdarwis		Statistik	Dispar	Februari 2026
3446			Jumlah Pokdarwis		Statistik	Dispar	Februari 2026
3447			Persentase tercapainya target jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi (%)		Statistik	Dispar	Februari 2026
3448			Jumlah ekonomi kreatif yang difasilitasi		Statistik	Dispar	Februari 2026
3449			Nilai tambah ekonomi kreatif		Statistik	Dispar	Februari 2026
3450			Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3451			Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota		Statistik	Dispar	Februari 2026
3452			Jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3453			Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		Statistik	Dispar	Februari 2026
3454			Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Statistik	Dispar	Februari 2026
3455			Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Statistik	Dispar	Februari 2026
3456			Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		Statistik	Dispar	Februari 2026
3457			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3458			Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Statistik	Dispar	Februari 2026
3459			DAK Non Fisik Bidang Pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3460			Data jumlah usaha ekonomi kreatif (meliputi sebaran, subsektor, omzet, tenaga kerja, ekspor, dll)		Statistik	Dispar	Februari 2026
3461			Data PDB Ekonomi Kreatif		Statistik	Dispar	Februari 2026
3462			Data perbandingan tingkat penghunian kamar (TPK) wisatawan mancanegara dan domestik		Statistik	Dispar	Februari 2026
3463			Data rata - rata lama menginap tamu wisatawan mancanegara dan domestik		Statistik	Dispar	Februari 2026
3464			Jumlah orang/atau wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3465			Jumlah sertifikasi SDM Bidang Pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3466			Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI		Statistik	Dispar	Februari 2026
3467			Kebaruan data perjalanan dan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3468			Ketersediaan data perjalanan dan pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3469			Pemusatan destinasi atraksi alam		Statistik	Dispar	Februari 2026
3470			Pemusatan destinasi atraksi budaya		Statistik	Dispar	Februari 2026
3471			Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata		Statistik	Dispar	Februari 2026
3472			Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara		Statistik	Dispar	Februari 2026
3473	RKPD 2025		Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3474	RKPD 2025		Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	Statistik	Dispar	Februari 2026
3475	RKPD 2025		Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	Statistik	Dispar	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3476	RKPD 2025		Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3477	RKPD 2025		Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3478			Obyek Wisata		Geospasial	Dispar	
3479			Pokdarwis		Geospasial	Dispar	
3480			Desa Wisata		Geospasial	Dispar	
3481			Desa Penghasil Kerajinan		Geospasial	Dispar	
3482	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)		Statistik	Dispar	Februari 2026
3483	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan (destinasi) yang difasilitasi dan dikembangkan	Kawasan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3484	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Nilai tambah ekonomi kreatif	Triliun Rupiah	Statistik	Dispar	Februari 2026
3485	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kabupaten/kota kreatif yang dikembangkan	Kabupaten/Kota	Statistik	Dispar	Februari 2026
3486	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi Infrastruktur (sarana dan prasarana)	Pelaku Usaha	Statistik	Dispar	Februari 2026
3487	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pengembangan, pendampingan, dan inkubasi di ruang kreatif	Kegiatan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3488	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3489	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Kontribusi nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3490	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah revitalisasi ruang kreatif	Lokasi	Statistik	Dispar	Februari 2026
3491	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Destinasi pariwisata super prioritas	Kawasan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3492	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi	Kawasan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3493	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi terkait industri halal dan ekonomi syariah	Pelaku Usaha	Statistik	Dispar	Februari 2026
3494	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat	Kegiatan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3495	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata	Dokumen	Statistik	Dispar	Februari 2026
3496	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Nilai ekspor ekonomi kreatif	Miliar Dolar Amerika Serikat	Statistik	Dispar	Februari 2026
3497	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah diklat pemasaran digital	Kegiatan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3498	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pada pelaku ekonomi kreatif	Kegiatan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3499	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)	Lokasi	Statistik	Dispar	Februari 2026
3500	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah publikasi/laporan statistik ekonomi kreatif yang dikembangkan	Buku	Statistik	Dispar	Februari 2026
3501	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersedia dalam format database	Database	Statistik	Dispar	Februari 2026
3502	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3503	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3504	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Nilai Realisasi Investasi Pariwisata	Juta Dolar Amerika Serikat	Statistik	Dispar	Februari 2026
3505	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Permintaan digital wisatawan terhadap destinasi wisata alam	Artikel	Statistik	Dispar	Februari 2026
3506	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Permintaan digital wisatawan terhadap destinasi budaya dan hiburan	Artikel	Statistik	Dispar	Februari 2026
3507	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Permintaan digital wisatawan untuk kategori daya tarik wisata non-rekreasi	Artikel	Statistik	Dispar	Februari 2026
3508	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Penyelenggaraan Event	Kegiatan	Statistik	Dispar	Februari 2026
3509	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Desa Wisata	Desa	Statistik	Dispar	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3510	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Perbatasan		Statistik	Dispar	Februari 2026
3511	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah destinasi wisata alam prioritas	destinasi wisata	Statistik	Dispar	Februari 2026
3512	Daftar Data Lemhannas		Jumlah kawasan wisata laut yang sudah diusahakan	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3513	Daftar Data Lemhannas		Jumlah kawasan potensial wisata laut yang ada	unit	Statistik	Dispar	Februari 2026
3514	RPJPD 2025-2045		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3515	RPJPD 2025-2045		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	ribu orang	Statistik	Dispar	Februari 2026
3516	RPJPD 2025-2045		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3517	RPJMD 2025-2029		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3518	RPJMD 2025-2029		Persentase peningkatan media pemasaran	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3519	RPJMD 2025-2029		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3520	RPJMD 2025-2029		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	Statistik	Dispar	Februari 2026
3521			Peta Pariwisata Bahari		Geospasial	Dispar	Februari 2026
3522			Peta Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)		Geospasial	Dispar	Februari 2026
3523			Peta Sebaran Daerah Pariwisata		Geospasial	Dispar	Februari 2026
3524	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.011	Nilai PMA dan PMDN	triliun rupiah	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3525	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.014	Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder	triliun rupiah	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3526	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.017	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	triliun rupiah	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3527	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.022	Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Industri Logam Dasar Besi dan Baja	juta rupiah	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3528	RPJMN 2025-2029 ;		Pertumbuhan PMA	persen	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3529	RPJMN 2025-2029 ;		Pertumbuhan PMA	persen	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3530	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.0012	Total Nilai Realisasi Investasi Kalimantan Timur	rupiah	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3531	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.0013	Total Realisasi Investasi PMA Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	rp trilliun	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3532	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.0014	Total Realisasi Investasi PMDN Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	rp trilliun	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3533			Jenis Perijinan	jenis	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3534			Jumlah Perijinan yang dikeluarkan / Setujui (Kewenangan Provinsi)	ijin	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3535			Jumlah perijinan per sektor	ijin	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3536			Proyek perijinan per sektor	proyek	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3537			Nilai investasi perijinan per sektor	Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3538			Jumlah tenaga kerja (TKI-TKA) perijinan per sektor	Orang	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3539			Jumlah rekomendasi usaha yang dikeluarkan	rekomendasi	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3540			Jumlah MoU Kerjasama dengan daerah lain yang masih berlaku	Dokumen	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3541			Jumlah Lembaga Perijinan PTSP	lembaga	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3542			Realisasi Jumlah Proyek PMA	Proyek	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3543			Realisasi Nilai investasi PMA	US\$	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3544			Realisasi Investasi PMA per Sektor (Primer)	US\$	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3545			Realisasi Investasi PMA per Sektor (Sekunder)	US\$	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3546			Realisasi Investasi PMA per Sektor (Tersier)	US\$	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3547			Realisasi Jumlah Proyek PMDN	proyek	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3548			Realisasi Nilai Investasi PMDN	Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3549			Realisasi Investasi PMDN per Sektor (Primer)	Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3550			Realisasi Investasi PMDN per Sektor (Sekunder)	Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3551			Realisasi Investasi PMDN per Sektor (Tersier)	Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3552			Jumlah Proyek PMA	Proyek	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3553			Jumlah Proyek PMDN	Proyek	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3554			Jumlah Perusahaan PMA	perusahaan	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3555			Jumlah Perusahaan PMDN	perusahaan	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3556			Jumlah TKA yang Bekerja pada PMA	Orang	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3557			Jumlah TKI yang Bekerja pada PMA	Orang	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3558			Jumlah TKA yang Bekerja pada PMDN	Orang	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3559			Jumlah TKI yang Bekerja pada PMDN	Orang	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3560			Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3561			UKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)	ukm	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3562			Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan		Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3563	RKPD 2025		Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	minat	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3564			Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara		Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3565	RKPD 2025		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3566			Pertumbuhan Nilai Investasi pada Capaian Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara		Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3567			Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat		Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3568			Nilai Realisasi Investasi pada Sektor Non Migas dan Batubara	Juta Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3569	Daftar Data Lemhannas		Jumlah kabupaten/kota yang pelayanan publiknya dilaksanakan	kab/kota	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3570	RPJMD 2025-2029		Realisasi Total terhadap target investasi	Triliun Rp	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3571	RPJMD 2025-2029		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3572	RPJMD 2025-2029		persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3573	RPJMD 2025-2029		Persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	Statistik	DPMPTSP	Februari 2026
3574	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.001	Deviasi Harga Jual Eceran BBM	persen	Statistik	DESDM	Februari 2026
3575	RPJMN 2025-2029 ;		Emisi Aksi Mitigasi (EPy) pembangkitan listrik	ton co2	Statistik	DESDM	Februari 2026
3576	RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;		Emisi Aktual Gas Rumah Kaca	million tonnes of carbon dioxide equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3577	RPJMN 2025-2029 ;		Emisi Baseline (EBy) pembangkitan listrik	ton co2	Statistik	DESDM	Februari 2026
3578	RPJMN 2025-2029 ; RPJMN 2025-2029 ;		Emisi Baseline Gas Rumah Kaca	million tonnes of carbon dioxide equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3579	RPJMN 2025-2029 ;		Energi Diterima di Sisi Penyaluran	kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3580	RPJMN 2025-2029 ;		Energi Terjual ke Pelanggan	kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3581	RPJMN 2025-2029 ;		Energi untuk Keperluan Sendiri	kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3582	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	07.02.002	Indeks Ketahanan Energi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3583	RPJMN 2025-2029 ;	07.01.003	Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	kilometer	Statistik	DESDM	Februari 2026
3584	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.004	Jumlah Produksi Listrik Energi Terbaru	gigawattjam	Statistik	DESDM	Februari 2026
3585	SDGs ;		Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar utama untuk memasak	rumah tangga	Statistik	DESDM	Februari 2026
3586	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.007	Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Private Charging Station Terpasang	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3587	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.008	Jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) Terpasang	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3588	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.009	Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersub	juta kiloliter	Statistik	DESDM	Februari 2026
3589	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.011	Kapasitas Gardu Distribusi	megavolt ampere	Statistik	DESDM	Februari 2026
3590	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.012	Kapasitas Gardu Induk	megavolt ampere	Statistik	DESDM	Februari 2026
3591	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.013	Kapasitas Pembangkit Listrik	gigawatt	Statistik	DESDM	Februari 2026
3592	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.015	Koneksi Tenaga Listrik Tambahan yang B	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3593	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.016	Konsumsi Biofuel	juta kiloliter	Statistik	DESDM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3594	RPJMN 2025-2029 ;		Konsumsi Energi Final (Final Energy Consumption)	tonnes of oil equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3595	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.017	Konsumsi Energi Final per Kapita	tonnes of oil equivalent per kapita	Statistik	DESDM	Februari 2026
3596	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.018	Panjang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik	kilometer	Statistik	DESDM	Februari 2026
3597	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.019	Panjang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	kilometer	Statistik	DESDM	Februari 2026
3598	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.020	Pasokan Energi Primer	million tonnes of oil equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3599	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.021	Penurunan Emisi Pembangkitan Listrik	million tonnes of carbon dioxide equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3600	RPJMN 2025-2029 ;	07.02.022	Penurunan Intensitas Energi Final	setara barel minyak per miliar rupiah	Statistik	DESDM	Februari 2026
3601	SDGs ;	07.02.026	Persentase Subsidi Bahan Bakar Fosil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	persen	Statistik	DESDM	Februari 2026
3602	RPJMN 2025-2029 ;	07.01.006	Realisasi Kebutuhan Batubara Dalam Negara	persen	Statistik	DESDM	Februari 2026
3603	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Total Konsumsi Energi Baru Terbarukan	terajoule (tj) atau gigawatt-jam (gwh)	Statistik	DESDM	Februari 2026
3604	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Total Konsumsi Listrik Non-PLN	kilowatt jam	Statistik	DESDM	Februari 2026
3605	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Total Konsumsi Listrik PLN	kilowatt jam	Statistik	DESDM	Februari 2026
3606	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Total Pasokan Energi Primer (TEP)	setara barel minyak (sbm)	Statistik	DESDM	Februari 2026
3607	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3608	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah geopark yang telah direkomendasikan oleh Dewan UNESCO Global Geopark.	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3609	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah geopark yang telah resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh UNESCO	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3610	RPJMN 2025-2029 ;		Kapasitas Produksi Konsentrat Tembaga (Cu Concentrate)	ribu ton per tahun	Statistik	DESDM	Februari 2026
3611	RPJMN 2025-2029 ;		Kapasitas terpakai Idle Capacity IPAL	meter kubik per hari	Statistik	DESDM	Februari 2026
3612	RPJMN 2025-2029 ;		Kapasitas total Idle Capacity IPAL	meter kubik per hari	Statistik	DESDM	Februari 2026
3613	SDGs ;		Luas akuifer lintas batas yang tercakup dalam pengaturan operasional	km ²	Statistik	DESDM	Februari 2026
3614	RPJMN 2025-2029 ;		Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	million tonnes of carbon dioxide equivalent	Statistik	DESDM	Februari 2026
3615	SDGs ;		Total luas akuifer lintas batas dalam wilayah negara	km ²	Statistik	DESDM	Februari 2026
3616			Luas Lahan Pertambangan Migas	ha	Statistik	DESDM	Februari 2026
3617			Luas Lahan Pertambangan Batuan Mineral Bukan Logam (sesuai Pergub tanah urug, pasir, batu gunung, batu gamping, batu padas, koral)	ha	Statistik	DESDM	Februari 2026
3618			Jumlah Produksi Bahan Tambang	Ton	Statistik	DESDM	Februari 2026
3619			Jumlah Lifting Minyak Bumi	barel	Statistik	DESDM	Februari 2026
3620			Jumlah Lifting Gas Alam	mmbtu	Statistik	DESDM	Februari 2026
3621			Jumlah Perusahaan Batubara	Perusahaan	Statistik	DESDM	Februari 2026
3622			Jumlah PLTG	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3623			Kapasitas PLTG	kva/kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3624			Jumlah PLTU	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3625			Kapasitas PLTU	kva/kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3626			Jumlah PLTD	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3627			Kapasitas PLTD	kva/kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3628			Jumlah PLTS Terpusat (Komunal)	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3629			Kapasitas PLTS Terpusat (Komunal)	kva/kwh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3630			Cakupan Wilayah PLTS Terpusat (Komunal)	kab/kota	Statistik	DESDM	Februari 2026
3631			Jumlah sambungan rumah PLTS Terpusat (Komunal)	SR	Statistik	DESDM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3632			Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	KK	Statistik	DESDM	Februari 2026
3633			Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	KK	Statistik	DESDM	Februari 2026
3634			Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	KK	Statistik	DESDM	Februari 2026
3635	RPJMD 2025-2029		Rasio Elektrifikasi Listrik	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3636			Persentase Desa Berlistrik	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3637			Jumlah SPBU	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3638			Jumlah UPPDN Pertamina	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3639			Jumlah SPBE	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3640			Jumlah Agen LPG	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3641			Jumlah prosentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3642			Jumlah Instalasi Biogas	unit	Statistik	DESDM	Februari 2026
3643			Jumlah perusahaan yang memenuhi standar dalam pelaksanaan dokumen RKAB	Perusahaan	Statistik	DESDM	Februari 2026
3644			Jumlah pengurangan emisi sektor energi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3645			Pembinaan dan Pemanfaatan Air Tanah	kab/kota	Statistik	DESDM	Februari 2026
3646	RPJMD 2025-2029		Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	Statistik	DESDM	Februari 2026
3647			Total penggunaan energi listrik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3648			Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga		Statistik	DESDM	Februari 2026
3649			Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga		Statistik	DESDM	Februari 2026
3650			Jumlah rumah tangga yang menggunakan gas		Statistik	DESDM	Februari 2026
3651			Bauran Energi Terbarukan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3652			Kualitas air tanah		Statistik	DESDM	Februari 2026
3653			Jumlah energi yang disalurkan kepada industri kecil dengan daya 450VA		Statistik	DESDM	Februari 2026
3654			Jumlah perizinan di bidang jasa usaha pertambangan yang dikeluarkan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3655			Jumlah Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3656			Jumlah Pengguna Listrik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3657			Jumlah Produksi Tenaga Listrik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3658			Kapasitas terpasang pembangkit EBT		Statistik	DESDM	Februari 2026
3659			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit		Statistik	DESDM	Februari 2026
3660	RPJMD 2025-2029		Porsi EBT dalam bauran energi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3661			Jumlah penerima subsidi listrik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3662			Kuota LPG 3 KG		Statistik	DESDM	Februari 2026
3663			Realisasi penjualan LPG 3 KG		Statistik	DESDM	Februari 2026
3664			Intensitas energi primer (SBM/MiliarRupiah)		Statistik	DESDM	Februari 2026
3665			Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda		Statistik	DESDM	Februari 2026
3666			jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3667			Persentase Badan Usaha yang memenuhi kaidah K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan)		Statistik	DESDM	Februari 2026
3668			Persentase Pertambahan infrstruktur produksi dan konsumsi Energi Baru Terbarukan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3669			Jumlah sumur bor air tanah yang beroperasi sesuai dengan peraturan perundangan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3670			Luas zona konservasi air tanah yang dievaluasi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3671			Persentase tercapainya realisasi produksi, reklamasi dan program ppm MBLB sesuai rencana dalam RKAB		Statistik	DESDM	Februari 2026
3672			Tindaklanjut rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan MBLB yang menjadi kewenangan Provinsi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3673			Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam		Statistik	DESDM	Februari 2026
3674			Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan		Statistik	DESDM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3675	RKPD 2025		Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3676	RKPD 2025		Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	Statistik	DESDM	Februari 2026
3677	RKPD 2025		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3678	RKPD 2025		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3679			Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN		Statistik	DESDM	Februari 2026
3680			Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani		Statistik	DESDM	Februari 2026
3681			Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT		Statistik	DESDM	Februari 2026
3682	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Intensitas energi primer	SBM/Miliar Rupiah	Statistik	DESDM	Februari 2026
3683	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah cadangan minyak dan gas bumi		Statistik	DESDM	Februari 2026
3684	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Daya Terpasang Listrik	MW	Statistik	DESDM	Februari 2026
3685	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah konsumsi komoditas tambang mineral logam dan Batuan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3686	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN		Statistik	DESDM	Februari 2026
3687	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penambahan kapasitas pembangkit	MW	Statistik	DESDM	Februari 2026
3688	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penambahan penyalur BBM satu harga		Statistik	DESDM	Februari 2026
3689	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penambahan sistem distribusi	kms	Statistik	DESDM	Februari 2026
3690	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah penambahan sistem transmisi	kms	Statistik	DESDM	Februari 2026
3691	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pengguna listrik		Statistik	DESDM	Februari 2026
3692	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produksi komoditas tambang mineral logam dan Batuan		Statistik	DESDM	Februari 2026
3693	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produksi tenaga listrik	GWh	Statistik	DESDM	Februari 2026
3694	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	Juta Sr	Statistik	DESDM	Februari 2026
3695	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah subsidi bahan bakar fosil	Kilo Liter	Statistik	DESDM	Februari 2026
3696	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Subsidi Bahan Bakar Minyak	Kilo Liter	Statistik	DESDM	Februari 2026
3697	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Subsidi Gas / LPG	Ton	Statistik	DESDM	Februari 2026
3698	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah volume elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi masyarakat, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3699	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor energi	Juta Ton	Statistik	DESDM	Februari 2026
3700	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Persentase susut jaringan	Persen	Statistik	DESDM	Februari 2026
3701	Daftar Data Lemhannas		Jumlah gunung api seluruhnya (termasuk gunungapi di bawah laut)-Tipe A,B,C	buah	Statistik	DESDM	Februari 2026
3702	Daftar Data Lemhannas		Jumlah Gunung api Tipe A	buah	Statistik	DESDM	Februari 2026
3703	Daftar Data Lemhannas		Jumlah cadangan (reserve) batubara yang terdata	juta ton	Statistik	DESDM	Februari 2026
3704	Daftar Data Lemhannas		Jumlah potensi sumber daya (resource) batubara yang diperkirakan ada	juta ton	Statistik	DESDM	Februari 2026
3705	Daftar Data Lemhannas		Persentase potensi lokal batu bara terhadap potensi nasional	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3706	Daftar Data Lemhannas		Produksi batu bara	juta ton/tahun	Statistik	DESDM	Februari 2026
3707	Daftar Data Lemhannas		Jumlah rumah tangga (Keluarga) yang ada di daerah	KK	Statistik	DESDM	Februari 2026
3708	RPJPD 2025-2045		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	Statistik	DESDM	Februari 2026
3709	RPJPD 2025-2045		Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	Statistik	DESDM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3710	RPJPD 2025-2045		Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Miliar	Statistik	DESDM	Februari 2026
3711	RPJMD 2025-2029		Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/kota		Statistik	DESDM	Februari 2026
3712	RPJMD 2025-2029		Luas zona konversi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota		Statistik	DESDM	Februari 2026
3713	RPJMD 2025-2029		Luas WPR yang diusulkan pemerintah daerah		Statistik	DESDM	Februari 2026
3714	RPJMD 2025-2029		Jumlah rekomendasi terhadap usulan IPR		Statistik	DESDM	Februari 2026
3715	RPJMD 2025-2029		Jumlah rumah tangga penerima listrik yang bersumber dari pembangkit EBT		Statistik	DESDM	Februari 2026
3716	RPJMN 2025-2029 ;		Indeks Harga Konsumen (IHK)	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3717	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.004	Inflasi Harga Bergejolak	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3718	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	02.02.0004	Jumlah Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang Disepakati	kesepakatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3719	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	02.02.0006	Jumlah Free Trade Agreement (FTA) yang Disepakati	kesepakatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3720	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Nilai Investasi Ekonomi Kreatif	triliun rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3721	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah pelaku usaha yang berbadan hukum	jumlah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3722	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.006	Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	u usaha (kum	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3723	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	02.02.0010	Jumlah Preferential Trade Agreement (PTA) yang Disepakati	kesepakatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3724	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	02.02.007	Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	kesepakatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3725	SDGs ;		Jumlah Rekening Kredit UMKM (RK UMKM)	unit usaha yang memiliki rekening	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3726	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Seluruh Unit Usaha	unit usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3727	RPJMN 2025-2029 ;	07.04.0012	Jumlah total pelaku usaha	jumlah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3728	RPJMN 2025-2029 ; SDGs ;		Jumlah Total UMKM	unit usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3729	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.0002	Jumlah UMKM yang Memiliki Izin Usaha (NIB)	unit usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3730	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	02.10.003	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	unit usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3731	RPJMN 2025-2029 ;	02.09.0006	Jumlah Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3732	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3733	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.021	Nilai ekspor barang ke Australia dalam Rangka Utilisasi IA-CEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3734	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.022	Nilai ekspor barang ke Chile dalam Rangka Utilisasi Indonesia-Chile CEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3735	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.023	Nilai ekspor barang ke Jepang dalam Rangka Utilisasi IJEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3736	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.024	Nilai ekspor barang ke Korea dalam Rangka Utilisasi IK-CEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3737	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.025	Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam Rangka Utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3738	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.026	Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3739	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.027	Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3740	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.028	Nilai ekspor barang ke UAE dalam Rangka Utilisasi IUAE-CEPA	dolar amerika	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3741	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0014	Nilai Ekspor Barang per Negara ASEAN	dolar as	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3742	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0015	Nilai Ekspor Barang per Negara EFTA	dolar as	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3743	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0016	Nilai Ekspor Barang per Negara RCEP	dolar as	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3744	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0017	Nilai Ekspor Barang per Provinsi	miliar rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3745	RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0019	Nilai Ekspor per Produk dengan Kode HS 2 Digit	rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3746	RPJMN 2025-2029 ;	02.08.037	Persentase Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3747	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	02.10.003	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3748	RPJMN 2025-2029 ;	02.10.014	Proporsi Pelaku Usaha dengan Usaha Berbadan Hukum atau Memiliki Catatan Pembukuan Lengkap	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3749	RPJMN 2025-2029 ;	02.10.005	Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Memiliki Izin Usaha	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3750	SDGs ;		Proporsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3751	RPJMN 2025-2029 ;	02.09.003	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi terhadap Total Volume Usaha Koperasi	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3752	RPJMN 2025-2029 SDGs ;		Rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3753	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	02.02.0036	Total Ekspor Barang dan Jasa	miliar rupiah.	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3754	RPJMN 2025-2029 ;	02.06.0024	Total Ekspor Rumput Laut	dolar	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3755	RPJMN 2025-2029 ;	06.03.0019	Total Jumlah Usaha E-Commerce	unit usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3756	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	02.10.0005	Total Kredit Perbankan	rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3757	RPJMN 2025-2029 ;		Total Kredit yang disalurkan	rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3758	RPJMN 2025-2029 ;		Total Nilai Ekspor (TNE)	usd	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3759	Permendagri 101/2018 ;		Update dan pengumpulan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3760		02.01.007	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3761	RPJMN 2025-2029 ;	02.04.017	Ragam Produk Hilir Sawit	produk	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3762	RPJMN 2025-2029 ;	02.01.067	Volume Produksi Pembuatan Kapal	ribu tonase bobot mati	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3763	RPJMN 2025-2029 ;	02.01.068	Volume Reparasi Kapal	ribu tonase bobot mati	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3764			Jumlah Industri	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3765			Jumlah Industri Besar	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3766			Jumlah Industri Kecil Menengah	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3767			Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3768			Nilai Investasi	Rp Ribu	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3769			Jumlah industri pengolahan khas	industri	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3770			Jumlah Koperasi	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3771			Jumlah Koperasi Aktif	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3772			Jumlah Koperasi Pasif	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3773			Jumlah Anggota Koperasi Laki-laki	orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3774			Jumlah Anggota Koperasi Perempuan	orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3775			Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3776			Volume Usaha Koperasi	Rp. Juta	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3777			Jumlah KUD		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3778			Jumlah non KUD		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3779			Jumlah Koperasi Berkualitas		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3780	RPJMD 2025-2029		Persentase Koperasi Aktif	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3781			Jumlah Koperasi Sehat		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3782			Jumlah Koperasi Primer		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3783			Jumlah Koperasi Sekunder		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3784			Pertumbuhan industri olahan		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3785			Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB dan perkapita.		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3786			Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3787			Jumlah Pasar		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3788			Jumlah Pasar Tradisional		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3789			Jumlah Pasar Modern		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3790			Rasio Pasar per 10.000 penduduk		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3791			Jumlah Koperasi Produsen		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3792			Jumlah Koperasi Konsumen		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3793			Jumlah Koperasi Jasa		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3794			Jumlah Koperasi Simpan Pinjam		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3795			Jumlah Koperasi Konvensional		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3796			Jumlah Koperasi Syariah		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3797			Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Mikro		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3798			Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Kecil		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3799			Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha Menengah		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3800			Jumlah UKM		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3801			Jumlah UKM Naik Kelas		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3802			Jumlah Koperasi Berkualitas		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3803			Jumlah KUKM terlatih		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3804			Jumlah IKM Yang Berorientasi Ekspor		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3805			Jumlah Wirausaha Baru		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3806			Jumlah WUB Mandiri		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3807			Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3808			Jumlah Kelompok Pengrajin		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3809			Jumlah produksi sektor industri		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3810			Sertifikat Produk IKM		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3811			Usaha kecil yang menjadi wirausaha		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3812			Persentase penanganan pengaduan konsumen		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3813			Jumlah UKM yang berpotensi masuk ke dalam rantai pasok dan ekspor		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3814			Jumlah penggunaan Bahan baku sektor industri		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3815			Jumlah penggunaan Energi Sektor industri		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3816			IKM yang memanfaatkan penjualan online		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3817			Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batu bara terhadap PDRB (%)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3818			Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim (%)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3819			Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3820			Nilai indeks keberdayaan konsumen (Indeks)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3821			Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM (%)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3822			Inflasi pangan bergejolak (%)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3823			Pertumbuhan Omzet UKM		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3824			Pertumbuhan Omzet Koperasi		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3825			Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (%)		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3826			Galeri UKM	Jumlah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3827	RKPD 2025		Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3828			Persentase Koperasi dan UKM yang Mengikuti Pelatihan		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3829	RKPD 2025		Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3830	RKPD 2025		Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3831	RKPD 2025		Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3832	RKPD 2025		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3833	RKPD 2025		Persentase Penerbitan SKA yang Tepat Waktu	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3834	RKPD 2025		Persentase Surat Rekomendasi yang Tepat Waktu	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3835	RKPD 2025		Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3836	RKPD 2025		Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	jenis	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3837	RKPD 2025		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan P erundang-Undangan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3838			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan Berlaku	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3839	RKPD 2025		Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3840	RKPD 2025		Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3841	RKPD 2025		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3842	RKPD 2025		Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3843	RKPD 2025		Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3844	RKPD 2025		Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3845			Peta Sebaran Izin Usaha Industri Besar		Geospasial	DPPKUKM	
3846			Peta Sebaran Koperasi		Geospasial	DPPKUKM	
3847			Peta Kawasan Industri		Geospasial	DPPKUKM	
3848			Peta Sebaran UKM Ekspor dan Potensial Ekspor		Geospasial	DPPKUKM	
3849			Peta Sebaran Perusahaan di kawasan industri		Geospasial	DPPKUKM	
3850			Pertumbuhan industri pengolahan non migas	Persentase	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3851		01.05.01.01-01.01	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan peyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3852		01.06.02.00-01.01	Jumlah informasi industri yang tersedia kewenangan provinsi berbasis SIINAS	Industri	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3853		01.05.04.04-01.01	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum	UMKM	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3854		06.03.04.00-01.01	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Persentase	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3855		01.06.02.00-01.01	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Dokumen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3856	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.06.06.00-01.01	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3857	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.04.00-01.01	Jumlah tenaga kerja pada Kawasan Industri	Pekerja	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3858	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.03.00-01.01	Jumlah sentra industri kecil dan menengah di luar Jawa yang beroperasi	Unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3859	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.00.00.00-02.04	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3860	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.01.01-01.01	Jumlah Kawasan Industri (KI) operasional		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3861		04.01.05.00-01.02	Jumlah industri halal yang difasilitasi	Industri	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3862	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.00-01.03	Jumlah Produk tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri > 25% yang masih berlaku	Sertifikat	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3863	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.01.01-01.01	Jumlah Produk Dalam Negeri Bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Produk	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3864	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.01.01-01.01	Jumlah tenaga kerja pada Smelter	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3865	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Produk	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3866	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.00.00-01.02	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang memiliki izin usaha (Realisasi Kumulatif)	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3867	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.00.00-01.03	Jumlah Peserta Fasilitas kelompok usaha / unit bisnis Pondok Pesantren	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3868	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.00.00-01.02	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan perbaikan kemasan	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3869	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	14a	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendaftarkan perlindungan merk	Perusahaan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3870	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	14c	Jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha, tenaga kerja, aset-omzet, dan Skala Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3871	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	14b	Jumlah wirausaha per tahun	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3872	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Kontribusi koperasi terhadap PDRB	Rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3873	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Pertumbuhan wirausaha	Orang (Diganti Menggunakan Persentase)	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3874	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.05.02-01.01	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3875	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.02-01.01	Volume usaha koperasi	Rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3876	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.02-01.01	Rasio kewirausahaan	Persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3877	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.03-01.01	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3878	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.03-01.01	Jumlah Dukungan Pengelolaan Rumah Produksi Bersama oleh Koperasi	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3879	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.02-01.01	Jumlah Fasilitasi Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan melalui sinergi Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3880	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.00-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Peningkatan Skala Usaha Koperasi Melalui Kemitraan Strategis	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3881	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.02-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembinaan Koperasi Pengelola Rumah Kemasam	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3882	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.04-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pembaharuan dan Inovasi Produk Koperasi Pangan Modern	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3883	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.02-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Industrialisasi Koperasi Pangan Modern Melalui Rantai Pasok Produksi	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3884	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.01-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Dukungan Fasilitasi Factory Sharing	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3885	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.01-01.01	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3886	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.01-01.01	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3887	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.01-01.01	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3888	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.02.00-01.01	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3889	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.05-01.01	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Penguatan Kelembagaan dan Tatakelola Koperasi Modern	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3890	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.05-01.01	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Digitalisasi Koperasi	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3891	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.01-01.01	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Bagi SDM Pengawas Koperasi	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3892	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.02.01-01.01	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Akutansi, Keuangan dan Manajemen Risiko Koperasi	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3893	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.05.02-01.01	Jumlah UMKM Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3894	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.05.02-01.01	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3895	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.03-01.01	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3896	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Jumlah wirausaha yang ditingkatkan melalui Dunia Usaha Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3897	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Jumlah wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3898	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Wirausaha Pengarustamaan yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3899	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah usaha yang memiliki dampak sosial atau dampak lingkungan yang dibina	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3900	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pembinaan Koperasi Pengelola Factory Sharing dan Rumah Kemasan	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3901	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pembinaan dan Pengembangan Koperasi Syariah	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3902	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Jumlah Pembentukan/Pengembangan Koperasi Berbasis Komoditas di Kalangan Kelompok Strategis	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3903	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Jumlah pelaku usaha berdasarkan Lapangan Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3904	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.03-01.01	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan skala usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3905	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.03.04-01.01	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan jenis kelamin Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3906	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	04.01.05.02-01.01	Jumlah UMKM berdasarkan bentuk usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3907	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.01.01-01.01	Jumlah Koperasi aktif	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3908	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.04.05-02.01	Jumlah Koperasi yang memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3909	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.05.01.01-01.01	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Koperasi	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3910	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.01.00-01.04	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3911	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.07.02-01.01	Jumlah konsumen yang diedukasi cinta produk dalam negeri	Orang	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3912	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.02.01-01.01	Jumlah UMKM yang mengikuti Fasilitas Pengelolaan Keuangan Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3913	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.02.02-01.01	Jumlah UMKM yang mengikuti Export Coaching Program	Pelaku Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3914	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.07.03-01.01	Jumlah UMKM yang mengikuti Bimtek Pengembangan Produk dan Kemasan	Pelaku Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3915	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.01.02-01.01	Persentase ekspor hasil pertanian (fob)	Persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3916	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.00.00-01.01	Jumlah kesepakatan dan perjanjian perdagangan yang diikuti	Dokumen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3917	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah kegiatan promosi, pencitraan dan misi dagang	Kegiatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3918	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas ekspor (pelayanan ekspor-impor melalui INATRADE, pelayanan SKA, dan fasilitas pembiayaan perdagangan)	Pelaku Usaha	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3919	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	4.12.10.2	Jumlah promosi terintegrasi	Kegiatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3920	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitas pengembangan produk	Produk	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3921	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	4.12.17.2	Neraca perdagangan barang	Dolar Amerika Serikat	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3922	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	4.13.3.1	Jumlah rencana kegiatan promosi produk ke luar negeri	Kegiatan	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3923	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	4.13.7.1	Pertumbuhan impor produk non migas	Persen	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3924	Daftar Data Lemhannas	5.13.5.1	Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3925			Jumlah Usaha Berbadan Hukum		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3926	Daftar Data Lemhannas		Jumlah perusahaan industri kecil dan rumah tangga	unit	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3927	Daftar Data Lemhannas		Alokasi kredit perbankan untuk UMKM	juta rupiah	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3928	Daftar Data Lemhannas		Persentase volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3929	Daftar Data Lemhannas		Persentase anggaran APBN/APBD untuk pemberdayaan UMKM	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3930	RPJPD 2025-2045		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3931	RPJPD 2025-2045		Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3932	RPJPD 2025-2045		Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3933	RPJPD 2025-2045		Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3934	RPJPD 2025-2045		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3935	RPJPD 2025-2045		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3936	RPJPD 2025-2045		Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3937	RPJPD 2025-2045		Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3938	RPJMD 2025-2029		pertumbuhan volume usaha koperasi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3939	RPJMD 2025-2029		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3940	RPJMD 2025-2029		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3941	RPJMD 2025-2029		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3942	RPJMD 2025-2029		Promosi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3943	RPJMD 2025-2029		persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3944	RPJMD 2025-2029		Persentase Izin Usaha perdagangan yang difasilitasi	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3945	RPJMD 2025-2029		Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3946	RPJMD 2025-2029		Persentase Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3947	RPJMD 2025-2029		Nilai Ekspor Barang		Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3948	RPJMD 2025-2029		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3949	RPJMD 2025-2029		Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3950	RPJMD 2025-2029		Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3951	RPJMD 2025-2029		Persentase izin usaha yang diterbitkan	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3952	RPJMD 2025-2029		Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3953	RPJMN 2025-2029 ;		Kapasitas Produksi Industri Kimia Dasar Berbasis Gas Bumi	ribu ton	Statistik	DPPKUKM	Februari 2026
3954			Peta Terminal Tipe B		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3955			Peta Trayek Angkutan Umum Antar		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3956			Peta Pelabuhan Laut Pengumpan Regional		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3957			Peta Pelabuhan Sungai		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3958	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Alur Pelayaran Sungai-Danau dan Penyeberangan		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3959	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025		Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.00		Geospasial	Dishub	Februari 2026
3960	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	03.03.010	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	bandara	Statistik	Dishub	Februari 2026
3961	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	03.03.0005	Jumlah Bandar Udara yang Dibangun	unit (bandara)	Statistik	Dishub	Februari 2026
3962	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	03.03.0006	Jumlah Bandar Udara yang Dioperasikan	unit (bandara)	Statistik	Dishub	Februari 2026
3963	RPJMN 2025-2029 ;	03.03.011	Jumlah Bandara Primer/Utama yang ditingkatkan Kapasitasnya	lokasi	Statistik	Dishub	Februari 2026
3964	RPJMN 2025-2029 SDGs ;	03.03.014	Jumlah pelabuhan penyeberangan	pelabuhan	Statistik	Dishub	Februari 2026
3965	RPJMN 2025-2029 ;	03.03.015	Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi Standar	pelabuhan	Statistik	Dishub	Februari 2026
3966	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya	pelabuhan	Statistik	Dishub	Februari 2026
3967	SDGs ;		Jumlah Penduduk dengan Akses Nyaman ke Transportasi Umum	orang (jiwa)	Statistik	Dishub	Februari 2026
3968	SDGs ;		Jumlah Penumpang Berdasarkan Moda Transportasi	orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3969	SDGs ;		Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	orang dan barang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3970	RPJMN 2025-2029 ;	03.03.024	Jumlah Terminal Penumpang yang Beroperasi	lokasi	Statistik	Dishub	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
3971	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Total Bandara	bandara	Statistik	Dishub	Februari 2026
3972			Jumlah Terminal Bis	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3973			Jumlah Penumpang Bis Tiba	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3974			Jumlah Penumpang Bis Berangkat	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3975			Jumlah Terminal Kelas A	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3976			Jumlah Terminal Kelas B	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3977			Jumlah Terminal Kelas C	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3978			Jumlah Orang Melalui Terminal	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3979			Angkutan Penyeberangan		Statistik	Dishub	Februari 2026
3980			Jumlah Angkutan Penyeberangan Kapal Ferry	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3981			Jumlah Kendaraan Roda Empat yang melalui Dermaga Penyeberangan	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3982			Jumlah Orang Melalui Dermaga Penyeberangan	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3983			Jumlah Jembatan Timbang	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3984			Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3985			Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3986			Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
3987			Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3988			Jumlah Pelabuhan Udara		Statistik	Dishub	Februari 2026
3989			Jumlah Pelabuhan Udara Internasional		Statistik	Dishub	Februari 2026
3990			Jumlah Pelabuhan Udara Lokal		Statistik	Dishub	Februari 2026
3991			Jumlah Bandar Udara	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3992			rute penerbangan	Rute	Statistik	Dishub	Februari 2026
3993			Jumlah penumpang pesawat udara tiba	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3994			Jumlah penumpang pesawat udara berangkat	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
3995			Jumlah Barang yang dimuat Melalui Bandara	Kilogram (Kg)	Statistik	Dishub	Februari 2026
3996			Jumlah Barang yang dibongkar Melalui Bandara	Kilogram (Kg)	Statistik	Dishub	Februari 2026
3997			Jumlah Angkutan Umum		Statistik	Dishub	Februari 2026
3998			Jumlah Mobil penumpang umum	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
3999			Jumlah Mobil bus	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4000			Jumlah Mobil barang		Statistik	Dishub	Februari 2026
4001			Jumlah Ijin Trayek	Izin	Statistik	Dishub	Februari 2026
4002			Jumlah Izin Trayek antarkota antarprovinsi	Izin	Statistik	Dishub	Februari 2026
4003			Jumlah Izin Trayek antarkota dalam provinsi	Izin	Statistik	Dishub	Februari 2026
4004			Jumlah Izin Trayek perkotaan	Izin	Statistik	Dishub	Februari 2026
4005			Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang	Orang dan Ton	Statistik	Dishub	Februari 2026
4006			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan.	Indeks	Statistik	Dishub	Februari 2026
4007			Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	Statistik	Dishub	Februari 2026
4008	RKPD 2025		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	kejadian	Statistik	Dishub	Februari 2026
4009	RKPD 2025		Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
4010	RKPD 2025		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	Statistik	Dishub	Februari 2026
4011	RKPD 2025		Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
4012	RKPD 2025		Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
4013	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun dan dikembangkan	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4014	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pelabuhan laut yang dibangun dan dikembangkan	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4015	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Kota Metropolitan dengan Sistem Angkutan Umum Massal yang Dibangun dan Dikembangkan	Kabupaten/Kota	Statistik	Dishub	Februari 2026
4016	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Pelabuhan Penyeberangan Baru yang Dibangun	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4017	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4018	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Penumpang berdasarkan Moda Transportasi	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4019	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Trayek Angkutan Jalan Perintis yang Dilayani	Layanan	Statistik	Dishub	Februari 2026
4020	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Ditingkatkan/Direvitalisasi	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4021	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB) yang Dibangun dan Ditingkatkan/Direvitalisasi	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4022	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Bandar Udara yang Dibangun dan Dikembangkan	Unit	Statistik	Dishub	Februari 2026
4023	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Bandar Udara Penghubung (Hub) Skala Pelayanan Primer yang Mendapatkan Kegiatan Rehabilitasi / Pengembangan	Layanan	Statistik	Dishub	Februari 2026
4024	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Layanan Angkutan Udara Perintis Penumpang	Layanan	Statistik	Dishub	Februari 2026
4025	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Peserta Bimtek Implementasi SMK (Sistem Manajemen Keselamatan) Perusahaan Angkutan Umum	Orang	Statistik	Dishub	Februari 2026
4026	RPJMD 2025-2029		Konektivitas Darat	Rasio	Statistik	Dishub	Februari 2026
4027	RPJMD 2025-2029		Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
4028	RPJMD 2025-2029		Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani	%	Statistik	Dishub	Februari 2026
4029			Peta Jaringan Drainase Provinsi	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4030			Peta Jaringan Irigasi Teknis Primer dan Sekunder (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4031			Peta Daerah Irigasi Teknis Primer dan Sekunder (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4032			Peta Luas Baku Sawah Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4033			Peta Sawah Fungsional Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4034			Peta Sawah Potensial Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4035			Peta Sawah Terlayani Irigasi (Kewenangan Provinsi)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4036			Peta Kawasan Permukiman (RTRW)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4037			Peta Kawasan Budidaya	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4038			Peta Kawasan Budidaya (Kehutanan)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4039			Peta Kawasan Budidaya (Non	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4040			Peta Kawasan Lindung	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4041			Peta Pengelolaan wilayah laut 0 s/d 12 mil	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4042			Peta Genangan Banjir Perkotaan (Area)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4043			Peta Pantai Kritis	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4044			Peta Sungai yang Dinormalisasi	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4045			Peta Sebaran Pos Hidrologi	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4046			Peta Kawasan Permukiman	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4047			Peta Kawasan Permukiman Kumuh	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4048			Peta Sebaran Rumah Layak Huni	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4049			Peta Prasarana Sarana Utilitas	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4050			Peta Jalan Provinsi	Koordinat	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4051			Peta Jembatan Kewenangan Provinsi	Koordinat	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4052			Peta Titik Rawan Longsor Jalan Provinsi	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4053			Peta Waduk	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4054			Peta Turap Sungai	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4055			Peta Rencana Waduk	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4056			Peta Rencana Drainsae	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4057			Peta Rencana Bendungan	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4058			Peta Rencana Bendung	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4059			Peta Rawa	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4060			Peta Pengaman Pantai	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4061			Peta Bendung (titik)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4062			Peta Bendungan (titik)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4063			Peta Embung (titik)	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4064			Peta Daerah Aliran Sungai	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4065			Sungai (garis) 50k	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4066			Sungai (garis) 250k	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4067			Peta Wilayah Sungai	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4068			Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4069	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Peta Ketersediaan Air Baku	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4070	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025	03.01.0029	Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4071	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025	07.05.0107	Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4072	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025	03.01.0036	Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4073	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025	03.01.0034	Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4074	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2025	03.01.0037	Peta Sebaran Lokasi Pengendali Banjir skala 1:50.000	shp	Geospasial	DPUPR & PERA	Februari 2026
4075	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4076	RPJMD 2025-2029		Jumlah penerima manfaat gratis biaya administrasi kepemilikan rumah	orang	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4077			Panjang Jalan Provinsi	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4078			Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4079			Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4080			Panjang jalan Kelas I	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4081			Panjang jalan Kelas II	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4082			Panjang jalan Kelas III	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4083			Panjang Jalan Provinsi Perkerasan	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4084			Panjang Jalan Provinsi Perkerasan Cor Beton	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4085			Panjang Jalan Provinsi Perkerasan Kerikil	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4086			Panjang Jalan Provinsi Perkerasan Tanah	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4087			Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4088			Panjang Jalan Provinsi Kondisi Sedang	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4089			Panjang Jalan Provinsi Kondisi Rusak Ringan	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4090			Panjang Jalan Provinsi Kondisi Rusak Berat	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4091	RKPD 2025		Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4092	RKPD 2025		Panjang Jalan Provinsi Kondisi Tidak Mantap	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4093	RKPD 2025		Persentase Jalan Provinsi Kondisi Mantap	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4094	RKPD 2025		Persentase Jalan Provinsi Kondisi Tidak Mantap	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4095			Panjang Jembatan	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4096			Jumlah Jembatan	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4097			Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Sebagai Jalan Arteri	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4098			Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Sebagai Jalan Kolektor	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4099			Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Sebagai Jalan Jalan Lokal	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4100			Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Sebagai Jalan Lingkungan	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4101			Panjang Jaringan Drainase Provinsi	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4102			Panjang Drainase Provinsi tidak berfungsi dengan baik	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4103			Panjang Drainase yang ditangani (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4104			Persentase Drainase Provinsi dalam kondisi baik	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4105			Jumlah titik rawan longsor di Jalan Provinsi	titik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4106			Total Panjang Jaringan Irigasi Teknis (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4107			Panjang Jaringan Irigasi Teknis Primer (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4108			-Panjang Jaringan Irigasi Teknis Sekunder (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4109			Total Panjang Jaringan Irigasi (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4110			Panjang Jaringan Irigasi Primer (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4111			Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (Kewenangan Provinsi)	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4112			Luas Baku Sawah Daerah Irigasi (Kewenangan Provinsi)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4113			Luas Daerah Irigasi Fungsional (Kewenangan Provinsi)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4114			Luas Daerah Irigasi Potensial (Kewenangan Provinsi)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4115			Luas Sawah Terlayani Irigasi (Kewenangan Provinsi)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4116			Luas Provinsi Kalimantan Timur		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4117			Luas Kawasan Pemukiman (RTRW)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4118			Ketaatan terhadap RTRW Provinsi	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4119			Luas Kawasan Perairan/tubuh air		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4120			Luas Kawasan Budidaya		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4121			Luas Kawasan Budidaya (Kehutanan)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4122			Luas Kawasan Budidaya (Non		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4123			Luas Kawasan Lindung	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4124			Luas Pengelolaan wilayah laut 0 s/d 12 mil	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4125			Status Perda RTRW Kab/Kota		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4126			Status Perda RRTR Kab/Kota		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4127			Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4128			Cakupan layanan air minum aman	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4129	RPJPD 2025-2045		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4130			Kapasitas air baku Provinsi untuk air minum	lt/detik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4131			Jumlah rekomendasi teknis air permukaan di WS Kewenangan Provinsi (TKPSDA)	Dokumen	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4132			Total Jumlah Rumah Layak Huni	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4133			Jumlah Rumah Layak Huni APBD	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4134			Persentase Rumah Layak Huni	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4135			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4136			Persentase Rumah Tidak Layak Huni		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4137			Persentase Kawasan Kumuh	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4138			Luas Kawasan Kumuh yang ditangani Kewenangan Pemerintah Provinsi	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4139			Jumlah penanganan rumah tidak layak huni	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4140			Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4141			Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang dibebaskan untuk Penyelenggaraan Jalan	Ruas Jalan	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4142			Jumlah Turap/Talud/Bronjong Provinsi yang dibangun	Titik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4143			Panjang Jalan Provinsi yang dibangun	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4144			Panjang Jalan Provinsi yang direkonstruksi	km	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4145			Jumlah Jembatan Provinsi yang Dibangun	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4146			Jumlah Jembatan Provinsi yang Direhabilitasi	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4147			Luas Genangan Banjir	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4148			Luas Genangan Banjir yang ditangani	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4149			Luas Genangan Banjir Perkotaan yang ditangani	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4150	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Banyaknya Bendungan dan Bendung Eksisting	Unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4151			Panjang Bangunan Pengaman Pantai Kewenangan Provinsi yang Terbangun	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4152			Panjang Pantai Kritis	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4153			Panjang Pantai Kritis yang ditangani	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4154			Panjang Sungai yang Dinormalisasi oleh Provinsi	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4155			Panjang Sungai Kewenangan Provinsi	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4156			Total Panjang Sungai se-Kaltim	m	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4157			Data Sebaran Pos Hidrologi	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4158	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional		Jumlah Tenaga Ahli yang Bersertifikat	orang	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4159	Daftar Data dari Bantuan Keuangan (BANKEU)		Jumlah Tenaga Ahli yang Bersertifikat	orang	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4160	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional		Jumlah Penduduk Bekerja Di Sektor Konstruksi Menurut Tingkat Pendidikan	orang	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4161			Jumlah Pengurangan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK	unit Ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4162			Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN, dan CSR	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4163			Jumlah Luasan Kawasan Kumuh Berdsarkan : - Kewenangan Pusat > 15 Ha - Kewenangan Provinsi 10 - 15 Ha - Kewenangan Kab/Kota < 10 Ha	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4164			Jumlah PSU Permukiman di Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi 10 - 15 Ha. (Eksisting yang Akan Dilaksanakan)		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4165			Jumlah KK di kawasan kumuh Kewenangan provinsi	kk	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4166			Jumlah bangunan di kawasan kumuh Kewenangan provinsi	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4167	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Tersertifikasi	badan/lembaga	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4168	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Data Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4169			Luas Kawasan Pemukiman (Hasil Identifikasi)	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4170			Jumlah Data Backlog kepemilikan Kab/Kota	Unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4171			Jumlah Data Backlog Penghunian Kab/Kota	Unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4172			Jumlah Data Backlog Perumahan Kab/Kota	Unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4173			Total Jumlah Rumah Layak Huni	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4174			Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun CSR provinsi dan kab/kota	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4175			Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4176			Jumlah rumah tidak layak huni dalam kawasan kumuh (kewenangan pusat,provinsi, kab/kota)	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4177			Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4178			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4179			Jumlah penanganan rumah tidak layak huni Pusat/Provinsi/Kab/Kota/CSR (BSPS/Aladin dan sejenisnya)	unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4180			Luas Kawasan Kumuh Berdasarkan : - Kewenangan Pusat > 15 Ha - Kewenangan Provinsi 10 - 15 Ha - Kewenangan Kab/Kota < 10 Ha	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4181			Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN, dan CSR	ha	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4182			Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4183	RKPD 2025		Persentase Penyelenggaraan SPM Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat provinsi dan kab/kota	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4184	RKPD 2025		Persentase Penanganan PSU Permukiman (Capaian dan Target)	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4185	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan termasuk SMF dan TAPERA	Kepala Keluarga	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4186	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Rumah Tangga	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4187			Jumlah Rusunawa di Kab/Kota		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4188	RPJPD 2025-2045		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4189	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2023		Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi	orang	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4190			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prioritas		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4191			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pendukung		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4192			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	bangunan gedung	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4193			Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4194	RKPD 2025		Penambahan Ruas Jalan Baru	ruas jalan	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4195			Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4196	RKPD 2025		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4197	RKPD 2025		Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	skor	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4198	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah pengembangan SPAM regional	Unit	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4199			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-Setempat Kabupaten/Kota	Sambungan Rumah	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4200	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Presentase dan Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4201	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah	Persen	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4202	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Jumlah Ketersediaan Air	Meter Kubik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4203			Jumlah ketersediaan CAT		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4204	RKPD 2025		Defisit kapasitas air baku	lt/detik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4205			Jumlah kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih PDAM		Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4206	RPJPD 2025-2045		Kapasitas Air Baku	m3/detik	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4207	RPJMD 2025-2029		Indeks Infrastruktur/Indeks kualitas layanan infrastruktur	Indeks	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4208	RPJMD 2025-2029		Persentase peningkatan perlindungan kawasan pemukiman rawan banjir	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4209	RPJMD 2025-2029		persentase perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4210	RPJMD 2025-2029		Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4211	RPJMD 2025-2029		Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4212	RPJMD 2025-2029		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4213	RPJMD 2025-2029		Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4214	RPJMD 2025-2029		persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4215	RPJMD 2025-2029		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4216	RPJMD 2025-2029		persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4217	RPJMD 2025-2029		Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4218	RPJMD 2025-2029		Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4219	RPJMD 2025-2029		Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4220	RPJMD 2025-2029		Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	%	Statistik	DPUPR & PERA	Februari 2026
4221			Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4222			Jumlah Pelanggaran Perda	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4223			Jumlah Kasus	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4224			Rasio Penegakan Perda		Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4225			Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4226			Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Provinsi	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4227			Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja Kabupaten/Kota	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4228			Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4229			Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Provinsi (Satgaslinmas)	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4230			Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota (Satgaslinmas)	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4231			Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan (Satlinmas)	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4232			Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat Desa/Kampung (Linmas)	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4233			Jumlah Pos Siskamling	unit	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4234			Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa		Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4235			Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4236			Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4237			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4238			Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk		Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4239			angka pelayanan publik		Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4240			Jumlah Aduan Warga, Aparatur dan Badan Hukum Terhadap Adanya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4241			Jumlah pencegahan gangguan	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4242			Jumlah penindakan atas gangguan trantibun	kasus	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4243			jumlah anggota satuan perlindungan masyarakat	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4244			Jumlah daerah rawan kebakaran	daerah	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4245			Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	berkas	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4246			Jumlah Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4247			Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)		Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4248	RKPD 2025		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4249	RKPD 2025		Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4250	RPJPD 2025-2045		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4251	RPJMD 2025-2029		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4252	RPJMD 2025-2029		Indeks rasa aman	Angka	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4253	RPJMD 2025-2029		Indeks Keamanan dan Ketertiban	angka	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4254	RPJMD 2025-2029		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	angka	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4255	RPJMD 2025-2029		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4256	RPJMD 2025-2029		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4257	RPJMD 2025-2029		Persentase cakupan perlindungan masyarakat	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4258	RPJMD 2025-2029		Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4259	RPJMD 2025-2029		Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	Statistik	Satpol PP	Februari 2026
4260			Persentase PT swasta terhadap seluruh PT	%	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4261			Jumlah perguruan tinggi swasta	unit	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4262			Jumlah Perguruan Tinggi	unit	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4263			Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4264	RPJMD 2025-2029		Jumlah mahasiswa penerima manfaat gratispol S1, S2, S3 dalam Kaltim	orang	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4265	RPJMD 2025-2029		Jumlah mahasiswa penerima manfaat gratispol S1, S2, S3 luar Kaltim	orang	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4266	RPJMD 2025-2029		Jumlah mahasiswa penerima manfaat gratispol khusus/kerjasama	orang	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4267	RPJMD 2025-2029		Jumlah penerima manfaat gratis ibadah umroh (perjalanan suci,dll)	orang	STATISTIK	Biro Kesra	Februari 2026
4268	SDGs ;		Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi (JMBHL)	orang	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4269	SDGs ;		Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi (JMBHNL)	orang	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4270	SDGs ;		Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi (JBHL)	permohonan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4271	SDGs ;		Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi (JBHNL)	permohonan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4272	RPJMN 2025-2029 ;	05.01.0012	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan	kasus	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4273	RPJMN 2025-2029 ;	05.01.0013	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan	kasus	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4274	RPJMN 2025-2029 ;	05.01.0052	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	kasus	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4275	RPJMN 2025-2029 ;	05.01.0053	Jumlah Total Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi	kasus	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4276	RPJMN 2025-2029 ;	05.01.017	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	persen	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4277	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase Restitusi dalam penegakan hukum	persen	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4278	2025-2045 RPJMN 2025-	05.01.0068	Prosentase Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Taat Asas	skor atau persentase yang mencerminkan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan asas pembentukann peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4279	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.0015	Jumlah Instansi dengan Nilai IKK Kategori Baik	Terbuka	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4280	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.041	Persentase Instansi Pemerintah yang Menerapkan Tata Kelola Kualitas Kebijakan yang baik	Terbuka	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4281			Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4282			Jumlah Produk Hukum Peraturan Daerah	Produk Hukum	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4283			Jumlah Produk Hukum Peraturan Gubernur	Produk Hukum	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4284			Jumlah Produk Hukum Keputusan Gubernur	Produk Hukum	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4285			Jumlah Peraturan Daerah Yang Diterbitkan	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4286			Jumlah Peraturan Daerah yang Mendorong Peningkatan Perekonomian Daerah	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4287			Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4288			Jumlah Peraturan Daerah terkait Perijinan	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4289			Jumlah Peraturan Daerah terkait lalu lintas barang dan jasa	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4290			Jumlah Peraturan Daerah terkait ketenagakerjaan	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4291			Jumlah Peraturan Daerah Untuk RTRW	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4292			Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Peraturan Daerah RTRW		Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4293			Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah	Peraturan	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4294			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin	SK	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4295			Persentase rancangan produk hukum daerah provinsi yang diharmonisasi	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4296			Persentase rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4297			Persentase penanganan pengaduan masalah hukum dan HAM	kasus	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4298			Persentase rancangan Produk Hukum daerah provinsi yang difasilitasi	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4299			Persentase Pendokumentasian Produk Hukum	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4300			Data Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi		Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4301			Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi		Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4302	Daftar Data Lemhannas	2.6.2.8	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) sesuai UU No. 23 Tahun 2014	kab/kota	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4303	Daftar Data Lemhannas	5.1.11.1	Jumlah rancangan Perda yang diusulkan gubernur dalam satu tahun tetapi tidak disahkan oleh DPRD Provinsi	buah	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4304	Daftar Data Lemhannas	5.1.11.2	Jumlah rancangan Perda yang diusulkan gubernur dalam satu tahun	buah	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4305	Daftar Data Lemhannas	5.2.4.1	Jumlah Perda yang dianulir Mendagri karena saling bertentangan	buah	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4306	RPJPD 2025-2045		Indeks Reformasi Hukum	indeks	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4307	RPJPD 2025-2045		Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4308	RPJMD 2025- 2029		Persentase Produk hukum yang dihasilkan	%	Statistik	Biro Hukum	Februari 2026
4309			Peta Batas Administrasi		Geospasial	Biro POD	Februari 2026
4310			Peta Pilar Batas Kabupaten/Kota		Geospasial	Biro POD	Februari 2026
4311			Persentase LPPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai sangat tinggi	%	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4312			Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Skor/Point	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4313			Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/status	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4314			Jumlah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4315			Jumlah Perjanjian Kesepakatan Bersama	Dokumen	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4316			Jumlah Perjanjian Kerjasama Luar Negeri	Dokumen	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4317			Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dokumen	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4318			Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Rupiah	Statistik	Biro POD	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4319			Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun	Dokumen	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4320			Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	ha (hektar)	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4321			Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	%	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4322	RPJMD 2025-2029;RKPD 2025		Persentase Kerja Sama Daerah Yang Difasilitasi	%	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4323	RKPD 2025		Persentase LPPD yang dilaporkan	%	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4324	RKPD 2025		Persentase perumusah kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah	%	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4325			Garis batas kabupaten	Km	Geospasial	Biro POD	Februari 2026
4326	Daftar Data Lemhannas	1.1.8.1	Jumlah kabupaten dan kota yang mempunyai konflik batas wilayah	Kab/kota	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4327	Daftar Data Lemhannas	8.18.9.2	Panjang garis perbatasan darat Negara	Km	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4328	RPJPD 2025-2045		Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemerintah	PKS	Statistik	Biro POD	Februari 2026
4329			Jumlah BUMD	BUMD	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4330			Jumlah Aset dan Modal BUMD	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4331			Total Nilai Asset BUMD	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4332			Nilai Asset BPD Kaltim	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4333			Nilai Asset Perusda Pertambangan (BKS)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4334			Nilai Asset Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4335			Nilai Asset Perusda Agro Kaltim Utama	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4336			Nilai Asset Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4337			Nilai Asset Perusda Ketenagalistrikan	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4338			Nilai Asset PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4339			Nilai Asset PT. Jamkrida	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4340			Modal BPD Kaltim	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4341			Modal Perusda Pertambangan (BKS)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4342			Modal Perusda Melati Bhakti Satya	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4343			Modal Perusda Agro Kaltim Utama	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4344			Modal Perusda Sylva Kaltim Sejahtera (SKS)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4345			Modal Perusda Ketenagalistrikan	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4346			Modal PT. Migas Mandiri Pratama (MMP)	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4347			Modal PT. Jamkrida	Rupiah	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4348			Jumlah Kelompok Komoditi yang Dapat Dijaga Kestabilan Harga	Kelompok Komoditi	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4349			Jumlah BLUD	BLUD	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4350	RPJMD 2025-2029; RKPD 2025		Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	%	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4351	RPJMD 2025-2029; RKPD 2025		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	%	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4352	RPJPD 2025-2045		Return on Asset (ROA) BUMD	%	Statistik	Biro Ekonomi	Februari 2026
4353	RPJMN 2025-2029 ;	09.02.078	Maturitas UKPBJ (X3)	cor dinormalisa	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4354	RPJMN 2025-2029 ;	09.02.078	Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaa	%	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4355	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Nilai transaksi pengadaan barang/jasa Pemerintah berdasarkan Perangkat Daerah	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4356	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.04.01-01.02	Jumlah Produk yang Tayang di Katalog Elektronik	Produk	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4357	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	12.7.1*	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dokumen	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4358	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024		Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Perangkat Daerah dan BUMD	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4359	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.02.07.6320.02	Nilai Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP berdasarkan Perangkat Daerah dirinci menurut jumlah paket pengadaan	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026

No	Sumber Referensi	ID DDP/Kode Indikator	Nama Data	Satuan	Jenis Data	Produsen Data	Rilis Data
4360	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.01.03.6320.01	Nilai Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Perangkat Daerah	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4361	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.01.03.6320.01	Nilai Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan Perangkat Daerah	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4362	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.01.03.6323.02	Jumlah Produk Dalam Negeri yang Tayang di Katalog Elektronik	Produk	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4363	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.01.03.6323.02	Jumlah Penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang Produknya Ditayangkan dalam Katalog Elektronik	Penyedia UMK	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4364	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	CJ.02.05.6321.02	Jumlah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kematangan	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4365	Daftar Data Prioritas Nasional Tahun 2024	01.07.04.01-01.03	Jumlah Sistem yang terintegrasi dengan Sistem informasi katalog elektronik dan e-purchasing lainnya berdasarkan Instansi Pengelola	Sistem	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4366	RKPD 2025		Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	%	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4367			Nilai transaksi pengadaan barang/jasa perangkat daerah melalui e-purchasing	Rupiah	Statistik	Biro PBJ	Februari 2026
4368	RKPD 2025		Persentase Pelaksanaan Program dan Kegiatan unggulan daerah yang sesuai dengan target waktu dan capaian fisik	%	Statistik	Biro Adbang	Februari 2026
4369	SDGs ;		Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	unit	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4370	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4371	RPJMN 2025-2029 ;		Jumlah total perangkat Daerah yang dinilai		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4372	RPJMN 2025-2029 ;		Persentase perangkat daerah yang mendapatkan Opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	persen	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4373	RPJMN 2025-2029 ;	09.06.001	Indeks BerAkhlak	persen	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4374	RPJPN 2025-2045 RPJMN 2025-2029 ;	09.06.006	Indeks Pelayanan Publik	nilai/skor	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4375			Jumlah Biro Sekretariat Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4376			Sekretariat DPRD		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4377			Jumlah Dinas Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4378			Satuan Polisi Pamong Praja		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4379			Jumlah Badan Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4380			Inspektorat		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4381			Rumah Sakit Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4382			Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4383			Jumlah Perangkat Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4384			Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4385	LAPORAN SKM PEMPROV. KALTIM		Survei IKM di setiap Perangkat Daerah		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4386			Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4387	RKPD 2025		Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat minimal BB	%	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4388	RKPD 2025		Indeks Kelembagaan	indeks	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4389	RPJMD 2025-2029		Indeks Kematangan Organisasi	indeks	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4390	RKPD 2025		Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4391			Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)		Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4392	RKPD 2025		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026
4393	RPJMD 2025-2029		Nilai AKIP	Nilai	Statistik	Biro Organisasi	Februari 2026

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD) MODUL E-WALIDATA SIPD RI TAHUN 2025

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1	1.01.000006	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.01.000016	Bengkel/Unit Produksi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	1.01.000017	Bengkel/Unit Produksi yang layak	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	1.01.000018	Bengkel/Unit Produksi yang rusak sedang/berat	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	1.01.000019	Buku	Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	1.01.000021	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang tersedia dan terdistribusi	Buku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	1.01.000025	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan khusus yang tersedia	Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	1.01.000026	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang dibutuhkan	Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	1.01.000027	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang tersedia	Buah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	1.01.000076	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Khusus	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	1.01.000077	Kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	1.01.000085	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	1.01.000087	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan khusus	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	1.01.000088	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	1.01.000091	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	1.01.000092	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	1.01.000104	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang didistribusikan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	1.01.000118	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	1.01.000121	Pendidikan khusus yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	1.01.000134	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	1.01.000135	Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	1.01.000160	Rasio Pendidik pada pendidikan khusus	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	1.01.000161	Rasio Pendidik pada pendidikan menengah	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	1.01.000164	Ruang Bina Diri	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	1.01.000165	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	1.01.000166	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	1.01.000167	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	1.01.000168	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	1.01.000169	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)) yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
30	1.01.000170	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	1.01.000171	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	1.01.000172	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	1.01.000173	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34	1.01.000174	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35	1.01.000175	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	1.01.000176	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	1.01.000177	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	1.01.000178	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39	1.01.000179	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	1.01.000180	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41	1.01.000181	Ruang Bina PersepsiBunyi dan Irama	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	1.01.000182	Ruang Bina Pribadi dan Sosial	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43	1.01.000183	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	1.01.000184	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	1.01.000185	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	1.01.000186	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47	1.01.000187	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48	1.01.000188	Ruang Bina Wicara	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49	1.01.000189	Ruang BKPBI	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51	1.01.000214	Ruang keterampilan	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52	1.01.000217	Ruang konseling	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	1.01.000219	Ruang laboratorium bahasa yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	1.01.000220	Ruang laboratorium bahasa yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	1.01.000221	Ruang laboratorium IPA yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56	1.01.000222	Ruang laboratorium IPA yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57	1.01.000223	Ruang laboratorium komputer yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	1.01.000224	Ruang laboratorium komputer yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60	1.01.000227	Ruang laboratorium bahasa	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61	1.01.000228	Ruang laboratorium bahasa yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62	1.01.000229	Ruang laboratorium bahasa yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
63	1.01.000230	Ruang laboratorium biologi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64	1.01.000231	Ruang laboratorium biologi yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	1.01.000232	Ruang laboratorium biologi yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	1.01.000233	Ruang laboratorium biologi yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	1.01.000234	Ruang laboratorium biologi yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68	1.01.000235	Ruang laboratorium fisika	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
69	1.01.000236	Ruang laboratorium fisika yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
70	1.01.000237	Ruang laboratorium fisika yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71	1.01.000239	Ruang laboratorium fisika yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
72	1.01.000240	Ruang laboratorium fisika yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73	1.01.000242	Ruang laboratorium IPA yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
74	1.01.000243	Ruang laboratorium IPA yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
75	1.01.000249	Ruang laboratorium komputer	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
76	1.01.000250	Ruang laboratorium komputer yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
77	1.01.000251	Ruang laboratorium komputer yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
78	1.01.000253	Ruang Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
79	1.01.000254	Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80	1.01.000255	Ruang OM	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
81	1.01.000256	Ruang organisasi kesiswaan	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82	1.01.000257	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	1.01.000258	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84	1.01.000274	Ruang Praktik yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
85	1.01.000275	Ruang Praktik yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
86	1.01.000276	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang perlu direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
87	1.01.000277	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang telah direhabilitasi	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
88	1.01.000278	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
89	1.01.000279	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90	1.01.000280	Ruang Ruang Orientasi dan Mobilitas yang rusak sedang/berat	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91	1.01.000287	Ruang tata usaha	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	1.01.000290	Ruang TU yang layak	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
93	1.01.000305	Ruang/Sudut Baca	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94	1.01.000306	Ruang/sudut baca yang perlu direhabilitasi	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	1.01.000377	Satuan pendidikan yang belum memiliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
96	1.01.000381	Satuan pendidikan yang membutuhkan Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	1.01.000382	Satuan pendidikan yang membutuhkan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	1.01.000385	Satuan pendidikan yang memliki Sarana Mobilitas Sekolah	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	1.01.000397	Satuan pendidikan yang sudah memiliki Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	1.01.000406	Sekolah Menengah Atas yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
101	1.01.000407	Sekolah Menengah Kejuruan yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
102	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
103	1.01.000419	Silabus Muatan Lokal Pendidikan khusus	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
104	1.01.000420	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
105	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
106	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
107	1.01.000442	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
108	1.01.000454	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
109	1.01.000455	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
110	1.01.000464	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS pendidikan khusus	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
111	1.01.000466	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
112	1.01.000467	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
113	1.01.000471	Unit pendidikan khusus	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
114	1.01.000472	Unit pendidikan khusus yang layak	Kasus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
115	1.01.000473	Unit pendidikan khusus yang rusak sedang/berat	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
116	1.01.000477	Unit SMK	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
117	1.01.000478	Unit SMK yang layak	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
118	1.01.000479	Unit SMK yang rusak sedang/berat	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
119	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
120	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
121	1.01.000691	jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
122	1.01.000692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
123	1.01.000693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
124	1.01.000694	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
125	1.01.000695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
126	1.01.000696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
127	1.01.000697	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
128	1.01.000698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
129	1.01.000699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
130	1.01.000700	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
131	1.01.000701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
132	1.01.000702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
133	1.01.000703	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
134	1.01.000704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
135	1.01.000705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
136	1.01.000706	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
137	1.01.000707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	1.01.000708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	1.01.000709	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140	1.01.000710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	1.01.000711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
142	1.01.000712	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	1.01.000713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
144	1.01.000714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
145	1.01.000725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
146	1.01.000726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
147	1.01.000727	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
148	1.01.000728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
149	1.01.000729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
150	1.01.000730	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
151	1.01.000731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
152	1.01.000732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
153	1.01.000733	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
154	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
155	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
156	1.01.000736	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
157	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
158	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
159	1.01.000739	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
160	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
161	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
162	1.01.000742	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
163	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
164	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
165	1.01.000745	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
166	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
167	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
168	1.01.000748	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
169	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
170	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
171	1.01.000751	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
173	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
174	1.01.000754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
175	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
176	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
177	1.01.000757	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
178	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
179	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
180	1.01.000760	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
181	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
182	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
183	1.01.000763	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
184	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
185	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
186	1.01.000766	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
187	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
188	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
189	1.01.000769	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
190	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
191	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
192	1.01.000772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
193	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
194	1.01.000774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
195	1.01.000775	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
196	1.01.000776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
197	1.01.000777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
198	1.01.000778	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
199	1.01.000779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
200	1.01.000780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
201	1.01.000781	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
202	1.01.000782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
203	1.01.000783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
204	1.01.000784	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
205	1.01.000785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
206	1.01.000786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
207	1.01.000787	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
208	1.01.000788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
209	1.01.000790	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
210	1.01.000791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
211	1.01.000792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
212	1.01.000793	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
213	1.01.000794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
214	1.01.000795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
215	1.01.000796	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
216	1.01.000797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
217	1.01.000798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
218	1.01.000800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
219	1.01.000801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
220	1.01.000803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
221	1.01.000804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
222	1.01.000806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
223	1.01.000807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
224	1.01.000809	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
225	1.01.000810	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
226	1.01.000812	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
227	1.01.000813	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
228	1.01.000814	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
229	1.01.000821	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
230	1.01.000822	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
231	1.01.000823	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
232	1.01.000824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
233	1.01.000825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
234	1.01.000826	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
235	1.01.000827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
236	1.01.000828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
237	1.01.000829	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
238	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
239	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
240	1.01.000832	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
241	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
242	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
243	1.01.000835	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
244	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
245	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
246	1.01.000838	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
247	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
248	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
249	1.01.000841	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
250	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
251	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
252	1.01.000844	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
253	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
254	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
255	1.01.000847	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
256	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
257	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
258	1.01.000850	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
259	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
260	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
261	1.01.000853	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
262	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
263	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
264	1.01.000856	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
265	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
266	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
267	1.01.000859	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
268	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
269	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
270	1.01.000862	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
271	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
272	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
273	1.01.000865	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
274	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
275	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
276	1.01.000868	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
277	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
278	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
279	1.01.000871	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
280	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
281	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
282	1.01.000874	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
283	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
284	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
285	1.01.000877	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
286	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
287	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
288	1.01.000880	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
289	1.01.000883	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
290	1.01.000887	Profesi pelaku perbukuan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
291	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
292	1.01.000889	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
293	1.01.000890	Akademi Komunitas	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
294	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Dinas Kesehatan
295	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Dinas Kesehatan
296	1.02.000003	Alat-Alat kesehatan/peralatan labkes	Unit	Dinas Kesehatan
297	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Dinas Kesehatan
298	1.02.000013	Bahan habis pakai lainnya	Paket	Dinas Kesehatan
299	1.02.000017	BMHP yang didistribusikan ke kabupaten/kota	Paket	Dinas Kesehatan
300	1.02.000019	Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Sarana	Dinas Kesehatan
301	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kuantitas	Dinas Kesehatan
302	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dinas Kesehatan
303	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dinas Kesehatan
304	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dinas Kesehatan
305	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dinas Kesehatan
306	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dinas Kesehatan
307	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Dinas Kesehatan
308	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Dinas Kesehatan
309	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Dinas Kesehatan
310	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Dinas Kesehatan
311	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Dinas Kesehatan
312	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Dinas Kesehatan
313	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Dinas Kesehatan
314	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Dinas Kesehatan
315	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Dinas Kesehatan
316	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Dinas Kesehatan
317	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	Dokumen	Dinas Kesehatan
318	1.02.000042	Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Kesehatan
319	1.02.000043	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Kesehatan
320	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
321	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
322	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
323	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dinas Kesehatan
324	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Dinas Kesehatan
325	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Dinas Kesehatan
326	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	Dinas Kesehatan
327	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Dinas Kesehatan
328	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Dinas Kesehatan
329	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Dinas Kesehatan
330	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Dinas Kesehatan
331	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Dinas Kesehatan
332	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Dinas Kesehatan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
333	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
334	1.02.000063	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
335	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
336	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Dinas Kesehatan
337	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Dinas Kesehatan
338	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	Dinas Kesehatan
339	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Dinas Kesehatan
340	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Dinas Kesehatan
341	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	Dinas Kesehatan
342	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Dinas Kesehatan
343	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Dinas Kesehatan
344	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Dinas Kesehatan
345	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Dinas Kesehatan
346	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Dinas Kesehatan
347	1.02.000098	HCU	Unit	Dinas Kesehatan
348	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Dinas Kesehatan
349	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Dinas Kesehatan
350	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Dinas Kesehatan
351	1.02.000102	ICU	Unit	Dinas Kesehatan
352	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Dinas Kesehatan
353	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Dinas Kesehatan
354	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Dinas Kesehatan
355	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	Dinas Kesehatan
356	1.02.000113	NICU	Unit	Dinas Kesehatan
357	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Dinas Kesehatan
358	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Dinas Kesehatan
359	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Dinas Kesehatan
360	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Dinas Kesehatan
361	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Dinas Kesehatan
362	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Dinas Kesehatan
363	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Dinas Kesehatan
364	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Dinas Kesehatan
365	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	Dinas Kesehatan
366	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Dinas Kesehatan
367	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Dinas Kesehatan
368	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Dinas Kesehatan
369	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Dinas Kesehatan
370	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Dinas Kesehatan
371	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Dinas Kesehatan
372	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	Dinas Kesehatan
373	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Dinas Kesehatan
374	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Dinas Kesehatan
375	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	Dinas Kesehatan
376	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Dinas Kesehatan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
377	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Dinas Kesehatan
378	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Dinas Kesehatan
379	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Dinas Kesehatan
380	1.02.000158	PICU	Unit	Dinas Kesehatan
381	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Dinas Kesehatan
382	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Dinas Kesehatan
383	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	Dinas Kesehatan
384	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Dinas Kesehatan
385	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Dinas Kesehatan
386	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Dinas Kesehatan
387	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Dinas Kesehatan
388	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Dinas Kesehatan
389	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Dinas Kesehatan
390	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Dinas Kesehatan
391	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Dinas Kesehatan
392	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Dinas Kesehatan
393	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Dinas Kesehatan
394	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Dinas Kesehatan
395	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Dinas Kesehatan
396	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Dinas Kesehatan
397	1.02.000190	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	Dinas Kesehatan
398	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Dinas Kesehatan
399	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Dinas Kesehatan
400	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Dinas Kesehatan
401	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Dinas Kesehatan
402	1.02.000199	Ruang Rawat Intensif:	Unit	Dinas Kesehatan
403	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Dinas Kesehatan
404	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Dinas Kesehatan
405	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Dinas Kesehatan
406	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Dinas Kesehatan
407	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Dinas Kesehatan
408	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Dinas Kesehatan
409	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Dinas Kesehatan
410	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Dinas Kesehatan
411	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Dinas Kesehatan
412	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Dinas Kesehatan
413	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Dinas Kesehatan
414	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Dinas Kesehatan
415	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Dinas Kesehatan
416	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Dinas Kesehatan
417	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Dinas Kesehatan
418	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Dinas Kesehatan
419	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Dinas Kesehatan
420	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Dinas Kesehatan
421	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	Dinas Kesehatan
422	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	Dinas Kesehatan
423	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	Dinas Kesehatan
424	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Dinas Kesehatan
425	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	Dinas Kesehatan
426	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	Dinas Kesehatan
427	1.02.000241	Tenaga keterampilan fisik	Orang	Dinas Kesehatan
428	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	Dinas Kesehatan
429	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Dinas Kesehatan
430	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Dinas Kesehatan
431	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	Dinas Kesehatan
432	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Dinas Kesehatan
433	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Dinas Kesehatan
434	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dinas Kesehatan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
435	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Dinas Kesehatan
436	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Dinas Kesehatan
437	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Dinas Kesehatan
438	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Dinas Kesehatan
439	1.02.000274	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	Dinas Kesehatan
440	1.02.000276	Labkesda	Unit	Dinas Kesehatan
441	1.02.000304	Balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit	Dinas Kesehatan
442	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Dinas Kesehatan
443	1.02.000306	Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan	Orang	Dinas Kesehatan
444	1.02.000309	Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang	Dinas Kesehatan
445	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Dinas Kesehatan
446	1.02.000315	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen	Dinas Kesehatan
447	1.02.000316	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen	Dinas Kesehatan
448	1.03.000006	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
449	1.03.000007	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
450	1.03.000008	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
451	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
452	1.03.000012	Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
453	1.03.000014	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
454	1.03.000016	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
455	1.03.000017	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
456	1.03.000020	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
457	1.03.000022	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
458	1.03.000025	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	Bantuan Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
459	1.03.000027	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Bantuan Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
460	1.03.000034	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
461	1.03.000039	Berita acara kesepakatan substansi antara gubernur dengan DPRD Provinsi atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
462	1.03.000041	Berita Acara konsultasi publik I	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
463	1.03.000042	Berita Acara konsultasi publik II	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
464	1.03.000045	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
465	1.03.000046	Berita Acara rapat koordinasi/surat kesepkatan dengan Pemda Provinsi yang berbatasan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
466	1.03.000056	Dokumen dan Validasi KLHS Provinsi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
467	1.03.000066	Dokumen Evaluasi Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
468	1.03.000069	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
469	1.03.000070	Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
470	1.03.000071	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
471	1.03.000073	Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Drainase Perkotaan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
472	1.03.000074	Dokumen kebijakan PERDA/PERGUB selain RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
473	1.03.000076	Dokumen Kebijakan Strategis Daerah Jalan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
474	1.03.000082	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
475	1.03.000083	Dokumen Leger Jalan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
476	1.03.000085	Dokumen Lingkungan Hidup Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
477	1.03.000086	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
478	1.03.000087	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
479	1.03.000089	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
480	1.03.000090	Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
481	1.03.000099	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
482	1.03.000100	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
483	1.03.000101	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
484	1.03.000102	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
485	1.03.000105	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
486	1.03.000106	Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
487	1.03.000107	Dokumen Pelaporan Capaian SPM Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
488	1.03.000108	Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-SermoWates	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
489	1.03.000113	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
490	1.03.000118	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
491	1.03.000122	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
492	1.03.000123	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
493	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
494	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
495	1.03.000132	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
496	1.03.000133	Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
497	1.03.000134	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
498	1.03.000135	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
499	1.03.000136	Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
500	1.03.000142	Dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
501	1.03.000144	Dokumen Ranperda (Raperda, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
502	1.03.000145	Dokumen Ranperda (Raperda, Ranperkada, Buku Rencana, Album Peta, Indikasi Program Utama)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
503	1.03.000148	Dokumen Rekomtek Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
504	1.03.000149	Dokumen Rencana Induk pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
505	1.03.000150	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
506	1.03.000154	Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
507	1.03.000157	Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
508	1.03.000158	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
509	1.03.000159	Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
510	1.03.000162	Dokumen Rencana Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
511	1.03.000163	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
512	1.03.000164	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
513	1.03.000165	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
514	1.03.000166	Dokumen Rencana Teknis untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
515	1.03.000184	Dokumen tentang pengelolaan kawasan khusus	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
516	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
517	1.03.000192	Flyover	Flyover	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
518	1.03.000196	Jembatan	Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
519	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
520	1.03.000222	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
521	1.03.000223	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkait Penetapan Kawasan Hutan dalam RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
522	1.03.000224	Keterangan Kesesuaian Substansi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
523	1.03.000229	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
524	1.03.000230	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
525	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
526	1.03.000233	Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
527	1.03.000238	Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
528	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
529	1.03.000247	Panjang Breakwater	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
530	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
531	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
532	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
533	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
534	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
535	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
536	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
537	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
538	1.03.000262	Pemberian Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
539	1.03.000263	Pemberian Insentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
540	1.03.000273	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
541	1.03.000277	Penyempurnaan Ranperda RTRW Provinsi menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
542	1.03.000282	Persetujuan Bersama dengan DPRD Provinsi atas Ranperda beserta lampirannya (Pasca Linsek)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
543	1.03.000283	Persetujuan teknis Pengaturan Perairan pesisir dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
544	1.03.000284	Peta (SHP) untuk diunggah dalam bentuk link google drive	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
545	1.03.000291	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah mencakup muatan pengaturan perairan pesisir beserta lampiran (dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
546	1.03.000295	Rapat Pelaksanaan Persetujuan Subatansi RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
547	1.03.000297	Rapat Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
548	1.03.000302	Rapat Persiapan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
549	1.03.000305	Rekomendasi Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
550	1.03.000308	Rumah Negara	Rumah Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
551	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
552	1.03.000310	Rumah Tangga yang disediakan Prasarana Cubluk	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
553	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
554	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
555	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
556	1.03.000339	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
557	1.03.000340	Surat Keterangan Kebenaran/Keaslian Dokumen dari Dinas Tata Ruang Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
558	1.03.000343	Surat penyampaian Ranperda RTRW Provinsi yang telah disempurnakan dari Gubernur Kepada Menteri Dalam Negeri	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
559	1.03.000344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
560	1.03.000346	Surat Permohonan Evaluasi dari Gubernur	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
561	1.03.000348	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
562	1.03.000349	Surat Persetujuan substansi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, dengan dilengkapi matriks perbaikan untuk RTRW Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
563	1.03.000353	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh gubernur	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
564	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
565	1.03.000364	Underpass	Underpass	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
566	1.03.000376	Fasilitas Penunjang SPA	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
567	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
568	1.03.000380	Fasilitas Penunjang TPS-3R	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
569	1.03.000381	Fasilitas Penunjang TPST	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
570	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
571	1.03.000385	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
572	1.03.000389	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
573	1.03.000390	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
574	1.03.000391	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
575	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
576	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
577	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
578	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
579	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
580	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
581	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
582	1.03.000402	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
583	1.03.000403	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
584	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
585	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
586	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
587	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
588	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
589	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
590	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
591	1.03.000416	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
592	1.03.000420	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
593	1.03.000422	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
594	1.03.000423	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Gedung	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
595	1.03.000424	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Kegagalan Bangunan Sipil	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
596	1.03.000426	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pelaksanaan Infrastruktur dengan Skema KPDBU	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
597	1.03.000427	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
598	1.03.000431	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
599	1.03.000432	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
600	1.03.000434	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
601	1.03.000435	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
602	1.03.000436	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
603	1.03.000437	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
604	1.03.000438	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
605	1.03.000440	Jumlah Dokumen Jakstrada Persampahan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
606	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
607	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
608	1.03.000445	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
609	1.03.000446	Jumlah Dokumen PeLaporan Capaian SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
610	1.03.000450	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
611	1.03.000451	Jumlah Dokumen Pembinaan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
612	1.03.000453	Jumlah Dokumen Pembongkaran Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
613	1.03.000454	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
614	1.03.000456	Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
615	1.03.000457	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
616	1.03.000458	Jumlah Dokumen Penghitungan Kebutuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
617	1.03.000459	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
618	1.03.000461	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
619	1.03.000465	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
620	1.03.000467	Jumlah Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) Daerah Irigasi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
621	1.03.000469	Jumlah Dokumen Prosedur Operasi Standar Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
622	1.03.000470	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
623	1.03.000471	Jumlah Dokumen Readiness Criteria Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
624	1.03.000474	Jumlah Dokumen Readiness Criteria untuk konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
625	1.03.000475	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
626	1.03.000476	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
627	1.03.000477	Jumlah Dokumen Rencana Pemenuhan SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
628	1.03.000478	Jumlah Dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
629	1.03.000479	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
630	1.03.000481	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
631	1.03.000483	Jumlah Dokumen Rencana Teknis Rinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
632	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
633	1.03.000487	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
634	1.03.000489	Jumlah Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
635	1.03.000491	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
636	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
637	1.03.000496	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
638	1.03.000500	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
639	1.03.000501	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
640	1.03.000502	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Air Limbah Domestik	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
641	1.03.000503	Jumlah Kajian Naskah Akademis Penyusunan Regulasi Persampahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
642	1.03.000505	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
643	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
644	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
645	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
646	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
647	1.03.000511	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
648	1.03.000513	Jumlah Lisensi Arsitek yang diperpanjang	Lisensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
649	1.03.000514	Jumlah Lisensi Arsitek yang diterbitkan	Lisensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
650	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
651	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
652	1.03.000522	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
653	1.03.000523	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Insentif	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
654	1.03.000524	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
655	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
656	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
657	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
658	1.03.000532	Jumlah Prasarana dan Saran Pendukung SPALD Terpusat	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
659	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
660	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
661	1.03.000538	Jumlah Rencana Teknis Rinci Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
662	1.03.000539	Jumlah Rumah Negara	Rumah Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
663	1.03.000540	Jumlah Rumah Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Rumah Negara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
664	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
665	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
666	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
667	1.03.000546	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
668	1.03.000548	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
669	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
670	1.03.000551	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
671	1.03.000554	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
672	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
673	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
674	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
675	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
676	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
677	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
678	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
679	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
680	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	M ³ /Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
681	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	M ³ /Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
682	1.03.000585	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
683	1.03.000587	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
684	1.03.000589	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
685	1.03.000591	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
686	1.03.000593	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Provinsi	Ton	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
687	1.03.000595	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
688	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
689	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
690	1.03.000598	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
691	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
692	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
693	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
694	1.03.000610	Dokumen Pengumpulan Data SPM Air Limbah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
695	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÃ³/Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
696	1.03.000614	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
697	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
698	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
699	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
700	1.03.000618	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan regulasi tarif	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
701	1.03.000619	Jumlah Kab/Kota yang menyusun regulasi tata kelola air limbah domestik	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
702	1.03.000620	Jumlah Kab/Kota yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
703	1.03.000621	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
704	1.03.000622	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
705	1.03.000623	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
706	1.03.000624	Jumlah Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
707	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
708	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
709	1.03.000635	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pendataan seluruh lembaga/pelaksana penyelenggara SPALD di wilayahnya	kabupaten/kot a	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
710	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
711	1.03.000637	Pembangunan Bendungan	Bendungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
712	1.03.000638	Rehabilitasi Bendungan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
713	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
714	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
715	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
716	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
717	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
718	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
719	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
720	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
721	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
722	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
723	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
724	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
725	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
726	1.03.000653	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
727	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
728	1.03.000655	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
729	1.03.000656	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
730	1.03.000657	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
731	1.03.000658	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
732	1.03.000659	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
733	1.03.000660	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
734	1.03.000661	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
735	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
736	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
737	1.03.000664	Panjang Pebangunan Seawall	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
738	1.03.000665	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
739	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
740	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
741	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
742	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
743	1.03.000670	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
744	1.03.000671	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
745	1.03.000672	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
746	1.03.000673	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
747	1.03.000674	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
748	1.03.000675	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
749	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
750	1.03.000677	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
751	1.03.000678	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
752	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
753	1.03.000680	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
754	1.03.000681	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
755	1.03.000682	Jumlah Revitalisasi Penampung Air Alami	Penampung Air Alami	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
756	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
757	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
758	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
759	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
760	1.03.000688	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
761	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
762	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
763	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
764	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
765	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
766	1.03.000695	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
767	1.03.000696	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
768	1.03.000697	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
769	1.03.000698	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
770	1.03.000699	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
771	1.03.000700	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
772	1.03.000701	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
773	1.03.000702	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
774	1.03.000703	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
775	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
776	1.03.000705	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
777	1.03.000706	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
778	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
779	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
780	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
781	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
782	1.03.000711	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
783	1.03.000712	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
784	1.03.000713	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
785	1.03.000714	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
786	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
787	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
788	1.03.000717	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
789	1.03.000718	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
790	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
791	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
792	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
793	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
794	1.03.000723	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
795	1.03.000724	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
796	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
797	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
798	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
799	1.03.000728	Jumlah Alokasi Air di Daerah Irigasi	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
800	1.03.000729	Fasilitasi Jumlah Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
801	1.03.000730	Fasilitasi Jumlah Lembaga P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	Lembaga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
802	1.03.000731	Penyusunan Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
803	1.03.000732	Penyusunan Jumlah Dokumen Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
804	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
805	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
806	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
807	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	m ³ /detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
808	1.03.000737	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
809	1.03.000738	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
810	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
811	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
812	1.03.000742	Jumlah kawasan rawa	Kawasan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
813	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
814	1.03.000745	Dokumen Studi Kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
815	1.03.000746	Jumlah Rencana Teknis Rinci (RTR/DED) Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
816	1.03.000747	Jumlah Dokumen Standar Operasi Prosedur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
817	1.03.000748	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Data dan Informasi Air Minum	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
818	1.03.000749	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
819	1.03.000750	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
820	1.03.0910102	Jumlah dokumen pengawasan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
821	1.03.910102	Jumlah Dokumen pengawasan Bangunan dan Lingkungan Pariwisata	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
822	1.03.910103	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Sistem Perkotaan Nasional	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
823	1.03.910104	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan dan Lingkungan Strategis Lainnya	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
824	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
825	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
826	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
827	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
828	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
829	1.03.910114	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
830	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
831	1.03.910118	Jumlah perjanjian kerja sama SPAM lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
832	1.03.910119	Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
833	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
834	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
835	1.03.910124	Jumlah perjanjian kerja sama SPALD lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
836	1.03.910125	Jumlah Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan pembinaan SPALD	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
837	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
838	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
839	1.03.910129	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
840	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
841	1.03.910131	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
842	1.03.910132	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
843	1.03.910133	Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
844	1.03.910134	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
845	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
846	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
847	1.03.910137	Dokumen hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
848	1.03.910138	Dokumen hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
849	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
850	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
851	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
852	1.03.910142	Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
853	1.03.910143	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
854	1.03.910144	Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
855	1.03.910145	Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
856	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
857	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
858	1.03.910148	Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
859	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
860	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
861	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
862	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
863	1.03.910154	Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
864	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
865	1.03.910165	Jumlah Kawasan Rawa	Kawasan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
866	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
867	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
868	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
869	1.03.910173	Dokumen pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
870	1.03.910175	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
871	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
872	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
873	1.03.910182	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung dan Masyarakat	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
874	1.03.910183	Jumlah Dokumen rencana teknis rinci TPA, TPST, SPA	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
875	1.03.910184	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis operasional TPA/TPST	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
876	1.03.910185	Jumlah Dokumen NSPK dan SOP teknis penataan TPA/TPST	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
877	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
878	1.03.910187	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
879	1.03.910188	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
880	1.03.910189	Jumlah Masyarakat	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
881	1.03.910191	Jumlah dokumen legal yang disahkan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
882	1.03.910192	Jumlah Dokumen RTBL	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
883	1.03.910193	Jumlah Kabupaten/Kota yang di bina dan di awasi dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
884	1.03.910194	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	TPA	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
885	1.03.910195	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
886	1.03.910196	Kapasitas TPA terpakai	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
887	1.03.910197	Fasilitas penunjang TPA	Paket	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
888	1.03.910198	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
889	1.03.910199	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
890	1.03.910200	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
891	1.03.910201	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
892	1.03.910205	Jumlah TPA	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
893	1.03.910207	Jumlah KK terlayani	KK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
894	1.03.910208	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
895	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
896	1.03.910210	Jumlah Dokumen Pelestarian Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
897	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
898	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
899	1.03.910213	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
900	1.03.910214	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
901	1.03.910215	ketersediaan Pengelola Teknis yaitu tenaga teknis perangkat daerah yang tersertifikasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN untuk membantu perangkat daerah dalam pembangunan BGN	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
902	1.03.910216	Dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
903	1.03.910217	Kesesuaian dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR, KRK/KKPR)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
904	1.03.910218	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
905	1.03.910219	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
906	1.03.910227	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
907	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
908	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
909	1.03.910230	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) setempat	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
910	1.03.910231	Rekomendasi Pendanaan Pembangunan BGN yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Provins	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
911	1.03.910232	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
912	1.03.910234	dokumen kajian (FS) dan dokumen lingkungan (AMDAL/ANDALALIN/UKL/UPL)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
913	1.03.910236	Surat Keterangan Status Cagar Budaya Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur dan Surat Keterangan Kepemilikan Objek CB yang dikuasai Negara/pemerintah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
914	1.03.910237	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
915	1.03.910238	Dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
916	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
917	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
918	1.03.910241	Dokumen RTBL di Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
919	1.03.910242	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
920	1.03.910243	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan per Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
921	1.03.910252	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
922	1.03.910253	Kapasitas Intalasi Pengolahan Air Limbah Domestik(IPALD)/ sub-sistem pengolahan terpusat	M ³ /Hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
923	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
924	1.03.910255	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
925	1.03.910256	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
926	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
927	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
928	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
929	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
930	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
931	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
932	1.04.000011	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
933	1.04.000012	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
934	1.04.000013	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
935	1.04.000015	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
936	1.04.000017	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
937	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
938	1.04.000021	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
939	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
940	1.04.000025	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
941	1.04.000031	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
942	1.04.000033	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
943	1.04.000041	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
944	1.04.000043	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
945	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
946	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
947	1.04.000048	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
948	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
949	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
950	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
951	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
952	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
953	1.04.000056	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
954	1.04.000057	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
955	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
956	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
957	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
958	1.04.000062	Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
959	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
960	1.04.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
961	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
962	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
963	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
964	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
965	1.04.000077	Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
966	1.04.000079	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
967	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
968	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
969	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
970	1.04.000086	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
971	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
972	1.04.000091	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
973	1.04.000093	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana provinsi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
974	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
975	1.04.000096	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
976	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
977	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
978	1.04.000104	Laporan pelaksanaan proses peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
979	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
980	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
981	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
982	1.04.000117	Lokasi Rawan Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
983	1.04.000118	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
984	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
985	1.04.000121	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
986	1.04.000125	Luas Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
987	1.04.000127	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
988	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
989	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
990	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
991	1.04.000143	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
992	1.04.000144	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
993	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
994	1.04.000148	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
995	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
996	1.04.000155	Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang terbangun	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
997	1.04.000159	Rumah Khusus	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
998	1.04.000161	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
999	1.04.000163	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1000	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1001	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1002	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1003	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1004	1.04.000174	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1005	1.04.000176	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1006	1.04.000178	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1007	1.04.000180	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1008	1.04.000182	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1009	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1010	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1011	1.04.000186	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1012	1.04.000189	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1013	1.04.000192	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1014	1.04.000195	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1015	1.04.000197	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1016	1.04.000199	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1017	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1018	1.04.000202	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Provinsi	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1019	1.04.000205	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1020	1.04.000213	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1021	1.04.000214	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1022	1.04.000215	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1023	1.04.000220	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1024	1.04.000224	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1025	1.04.000226	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1026	1.04.000228	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1027	1.04.000230	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1028	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1029	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1030	1.04.000239	Jumlah kabupaten/kota pelaksana Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1031	1.04.000244	Jumlah lokasi permukiman yang dilaksanakan perbaikan PSU	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1032	1.04.000247	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Lokasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1033	1.04.000252	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1034	1.04.000253	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1035	1.04.000255	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1036	1.04.000257	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Masyarakat terdampak Bencana Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1037	1.04.000260	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1038	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1039	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1040	1.04.000266	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1041	1.04.000267	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1042	1.04.000268	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1043	1.04.000270	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1044	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1045	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1046	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1047	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1048	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1049	1.04.000283	Jumlah Rumah yang terdampak Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1050	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1051	1.04.000287	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1052	1.04.000288	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1053	1.04.000291	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1054	1.04.000292	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Permukiman yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1055	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1056	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1057	1.04.000295	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1058	1.04.000299	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada perumahan yang telah tertangani atas dampak bencana provinsi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1059	1.04.000300	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni Kepada Masyarakat Terdampak Program Pengentasan Permukiman Kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1060	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1061	1.04.000304	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program provinsi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1062	1.04.000306	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Laporan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1063	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1064	1.04.000319	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1065	1.04.000321	Rumah pada Lokasi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1066	1.04.000322	Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1067	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1068	1.04.000329	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1069	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1070	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1071	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1072	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki “Lack of Access” terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1073	1.05.000010	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1074	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1075	1.05.000012	Data Kebencanaan	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1076	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1077	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1078	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1079	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1080	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1081	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1082	1.05.000055	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1083	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1084	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1085	1.05.000078	Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen	Satpol PP
1086	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen	Satpol PP
1087	1.05.000084	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	Satpol PP
1088	1.05.000107	Informasi Kebencanaan	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1089	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Satpol PP
1090	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	Satpol PP
1091	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Satpol PP
1092	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	Laporan	Satpol PP
1093	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	Satpol PP
1094	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	Laporan	Satpol PP
1095	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	Laporan	Satpol PP
1096	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1097	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1098	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1099	1.05.000209	Laporan Pelaksanaan Pencarian Korban Bencana	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1100	1.05.000210	Laporan Pelaksanaan Pertolongan Korban Bencana	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1101	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1102	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1103	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1104	1.05.000222	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1105	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1106	1.05.000226	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1107	1.05.000257	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1108	1.05.000258	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Lembaga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1109	1.05.000271	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	Satpol PP
1110	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Satpol PP
1111	1.05.000294	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1112	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Satpol PP
1113	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Satpol PP
1114	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1115	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1116	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Satpol PP
1117	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	Satpol PP
1118	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	Satpol PP
1119	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Satpol PP
1120	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1121	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1122	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Satpol PP
1123	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti	Orang	Dinas Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1124	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Unit	Dinas Sosial
1125	1.06.000004	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	Orang	Dinas Sosial
1126	1.06.000005	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Dinas Sosial
1127	1.06.000006	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Dinas Sosial
1128	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Dinas Sosial
1129	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Dinas Sosial
1130	1.06.000012	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1131	1.06.000013	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Dinas Sosial
1132	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Dinas Sosial
1133	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Dinas Sosial
1134	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	Orang	Dinas Sosial
1135	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1136	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1137	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	Orang	Dinas Sosial
1138	1.06.000027	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal	Orang	Dinas Sosial
1139	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Dinas Sosial
1140	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Dinas Sosial
1141	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Dinas Sosial
1142	1.06.000035	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Kartu Identitas Anak	Orang	Dinas Sosial
1143	1.06.000036	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran	Orang	Dinas Sosial
1144	1.06.000037	Gelandangan dan pengemis yang mendapat Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk	Orang	Dinas Sosial
1145	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Dinas Sosial
1146	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Dinas Sosial
1147	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1148	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1149	1.06.000049	Gelandangan dan pengemis yang tmendapat Fasilitas Pembuatan Surat Nikah	Orang	Dinas Sosial
1150	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Dinas Sosial
1151	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	Orang	Dinas Sosial
1152	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	Dinas Sosial
1153	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	Orang	Dinas Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1154	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	Keluarga	Dinas Sosial
1155	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Kegiatan	Dinas Sosial
1156	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Kegiatan	Dinas Sosial
1157	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Kegiatan	Dinas Sosial
1158	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	Dinas Sosial
1159	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	Dinas Sosial
1160	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Dinas Sosial
1161	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	Dinas Sosial
1162	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Dinas Sosial
1163	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Dinas Sosial
1164	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Dinas Sosial
1165	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Orang	Dinas Sosial
1166	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1167	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Dinas Sosial
1168	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Dinas Sosial
1169	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Dinas Sosial
1170	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Dinas Sosial
1171	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1172	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Dinas Sosial
1173	1.06.000092	Makam pahlawan	Makam	Dinas Sosial
1174	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Orang	Dinas Sosial
1175	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Dinas Sosial
1176	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Dinas Sosial
1177	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Dinas Sosial
1178	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	Dinas Sosial
1179	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Dinas Sosial
1180	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Dinas Sosial
1181	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Dinas Sosial
1182	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Dinas Sosial
1183	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Dinas Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1184	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Dinas Sosial
1185	1.06.000109	Pemulasaraan	Kegiatan	Dinas Sosial
1186	1.06.000114	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	Dinas Sosial
1187	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Orang	Dinas Sosial
1188	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	Orang	Dinas Sosial
1189	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	Dinas Sosial
1190	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Dinas Sosial
1191	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Orang	Dinas Sosial
1192	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1193	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1194	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	Dinas Sosial
1195	1.06.000146	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1196	1.06.000148	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	Orang	Dinas Sosial
1197	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Dinas Sosial
1198	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	Unit	Dinas Sosial
1199	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Dinas Sosial
1200	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Dinas Sosial
1201	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Dinas Sosial
1202	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	Unit	Dinas Sosial
1203	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	Unit	Dinas Sosial
1204	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	Unit	Dinas Sosial
1205	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Unit	Dinas Sosial
1206	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Dinas Sosial
1207	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Dinas Sosial
1208	1.06.000163	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak	Orang	Dinas Sosial
1209	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	Orang	Dinas Sosial
1210	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	Orang	Dinas Sosial
1211	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar	Orang	Dinas Sosial
1212	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	Orang	Dinas Sosial
1213	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Dinas Sosial
1214	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	Dinas Sosial
1215	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Dinas Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1216	1.06.000180	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Dinas Sosial
1217	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Dinas Sosial
1218	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Dinas Sosial
1219	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1220	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Dinas Sosial
1221	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Dinas Sosial
1222	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	Dinas Sosial
1223	1.06.000211	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	Dinas Sosial
1224	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	Dinas Sosial
1225	1.06.000213	Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha	Dinas Sosial
1226	1.06.000215	Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan mendapat Akreditasi	Lembaga	Dinas Sosial
1227	1.06.000216	Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan	Dinas Sosial
1228	1.06.000217	Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga	Dinas Sosial
1229	1.06.000218	Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang	Dinas Sosial
1230	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1231	1.06.000220	Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1232	1.06.000221	Anak Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1233	1.06.000222	Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1234	1.06.000223	Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1235	1.06.000225	Gelandangan dan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Dinas Sosial
1236	1.06.000227	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi	Orang	Dinas Sosial
1237	1.06.000228	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Dinas Sosial
1238	1.06.000229	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	Dinas Sosial

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1239	1.06.000230	Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Orang	Dinas Sosial
1240	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1241	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1242	2.07.000008	Data penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang diselesaikan oleh PPNS Ketenagakerjaan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1243	2.07.000009	Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1244	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1245	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1246	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1247	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1248	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1249	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1250	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1251	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1252	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1253	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1254	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1255	2.07.000048	Mediator	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1256	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1257	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1258	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1259	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1260	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1261	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1262	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1263	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1264	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1265	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1266	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1267	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1268	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1269	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1270	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1271	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1272	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1273	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1274	2.07.000089	Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1275	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1276	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1277	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1278	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3*	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1279	2.07.000094	Perush. yang diaudit SMK3	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1280	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1281	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1282	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1283	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1284	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1285	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1286	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	Surat Keputusan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1287	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	Surat Keputusan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1288	2.07.000122	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1289	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1290	2.07.000126	Perusahaan Menengah	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1291	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1292	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1293	2.08.000004	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1294	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1295	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1296	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1297	2.08.000016	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1298	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1299	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1300	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1301	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1302	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1303	2.08.000040	Organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1304	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1305	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1306	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1307	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1308	2.08.000056	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1309	2.08.000058	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1310	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1311	2.08.000062	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1312	2.08.000063	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1313	2.08.000064	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1314	2.08.000065	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1315	2.08.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1316	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1317	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1318	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1319	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1320	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1321	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1322	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1323	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1324	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1325	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1326	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1327	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1328	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1329	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1330	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1331	2.09.000111	Jumlah izin rumah pengemasan per tahun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1332	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1333	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1334	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1335	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1336	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1337	2.09.000126	Jumlah promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1338	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1339	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1340	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1341	2.09.000148	Indeks Ketahanan Pangan Level Kecamatan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1342	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1343	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1344	2.09.000154	Jumlah sertifikat keamanan dan/atau mutu pangan per tahun	Sertifikat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1345	2.09.000157	Jumlah izin sertifikat penerapan penanganan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1346	2.09.000158	Rekomendasi Keamanan dan/atau Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1347	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1348	2.09.000163	data cadangan pangan pemerintah provinsi	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1349	2.09.000210	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1350	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1351	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1352	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1353	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1354	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1355	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
1356	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1357	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1358	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1359	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1360	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1361	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Dinas Lingkungan Hidup
1362	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1363	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1364	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Dinas Lingkungan Hidup
1365	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1366	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1367	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1368	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1369	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1370	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1371	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1372	2.11.000045	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh Provinsi s.d. n-1	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1373	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Dinas Lingkungan Hidup
1374	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Dinas Lingkungan Hidup
1375	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	Izin	Dinas Lingkungan Hidup
1376	2.11.000059	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	Izin	Dinas Lingkungan Hidup
1377	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1378	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1379	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1380	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1381	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1382	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1383	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1384	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1385	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1386	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1387	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1388	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1389	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1390	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup
1391	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
1392	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
1393	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
1394	2.11.000115	Lokasi Proklamasi yang dibina oleh Provinsi	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
1395	2.11.000123	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
1396	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Dinas Lingkungan Hidup
1397	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Dinas Lingkungan Hidup
1398	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
1399	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
1400	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
1401	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
1402	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
1403	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1404	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	Aduan	Dinas Lingkungan Hidup
1405	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1406	2.11.000137	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1407	2.11.000138	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1408	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	Dinas Lingkungan Hidup
1409	2.11.000145	Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1410	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1411	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1412	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1413	2.11.000162	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Dinas Lingkungan Hidup
1414	2.11.000164	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Unit	Dinas Lingkungan Hidup
1415	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Dinas Lingkungan Hidup
1416	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
1417	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1418	2.11.000204	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1419	2.11.000206	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	Dinas Lingkungan Hidup
1420	2.11.000212	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
1421	2.11.000214	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
1422	2.11.000216	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
1423	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1424	2.11.000237	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1425	2.11.000239	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala provinsi eksisting	Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup
1426	2.11.000240	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup
1427	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1428	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1429	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1430	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1431	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1432	2.11.000267	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	Dinas Lingkungan Hidup
1433	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1434	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1435	2.11.000276	Luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
1436	2.11.000278	Luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
1437	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1438	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1439	2.11.000291	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan		Dinas Lingkungan Hidup
1440	2.11.000294	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikenakan denda akibat tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup		Dinas Lingkungan Hidup
1441	2.11.000304	Data kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, penilaian, dan evaluasi	Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
1442	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1443	2.11.000312	Data dokumen KLHS Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1444	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1445	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1446	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
1447	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Dinas Lingkungan Hidup
1448	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1449	2.11.000333	Laporan hasil telaahan terhadap muatan dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Laporan / Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1450	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1451	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
1452	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1453	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1454	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1455	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Dinas Lingkungan Hidup
1456	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
1457	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Dinas Lingkungan Hidup
1458	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Dinas Lingkungan Hidup
1459	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1460	2.12.000011	Dokumen hasil kerja sama Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1461	2.12.000014	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1462	2.12.000018	Dokumen hasil pemanfaatan data atas Peristiwa Penting	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1463	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1464	2.12.000021	Dokumen hasil pemanfaatan data peristiwa kependudukan	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1465	2.12.000022	Dokumen hasil penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1466	2.12.000030	Dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1467	2.12.000031	Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil ditetapkan	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1468	2.12.000036	Dokumen komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1469	2.12.000041	Dokumen Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1470	2.12.000043	Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1471	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1472	2.12.000048	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1473	2.12.000049	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1474	2.12.000054	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1475	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1476	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1477	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1478	2.12.000064	Laporan hasil konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1479	2.12.000065	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1480	2.12.000066	Laporan hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1481	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1482	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1483	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1484	2.12.000083	Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1485	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1486	2.12.000093	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1487	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1488	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1489	2.12.000101	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Administrasi Kependudukan	Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1490	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1491	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	DPMPD
1492	2.13.000022	Dokumen hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	DPMPD
1493	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	Orang	DPMPD
1494	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	DPMPD
1495	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	DPMPD
1496	2.13.000032	Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Laporan	DPMPD
1497	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan	DPMPD
1498	2.13.000039	Laporan pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan	DPMPD
1499	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan	DPMPD
1500	2.13.000041	Laporan penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan	DPMPD
1501	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	Desa	DPMPD
1502	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	DPMPD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1503	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	Dokumen	DPMPD
1504	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan	DPMPD
1505	2.13.000063	Penyelenggaraan musyawarh desa	Dokumen	DPMPD
1506	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	DPMPD
1507	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	Dokumen	DPMPD
1508	2.13.000068	Pranata hukum adat	Dokumen	DPMPD
1509	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	DPMPD
1510	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	DPMPD
1511	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	DPMPD
1512	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1513	2.13.000076	Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1514	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	Laporan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1515	2.14.000043	Kebijakan yang telah disediakan daerah	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1516	2.14.000059	Materi Promosi dan Konseling Kespro dan Hak-Hak Reproduksi yang telah Dikembangkan dan Disediakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1517	2.14.000083	Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Kegiatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1518	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dinas Perhubungan
1519	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Dinas Perhubungan
1520	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	Dinas Perhubungan
1521	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Dinas Perhubungan
1522	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Dinas Perhubungan
1523	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Dinas Perhubungan
1524	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1525	2.15.000011	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1526	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	Dinas Perhubungan
1527	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1528	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia	Unit	Dinas Perhubungan
1529	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1530	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1531	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Dinas Perhubungan
1532	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Dinas Perhubungan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1533	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawasi olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Dinas Perhubungan
1534	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1535	2.15.000048	Data auditor LLAJ Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1536	2.15.000053	Data dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1537	2.15.000062	Data dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1538	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	Dokumen	Dinas Perhubungan
1539	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	Dokumen	Dinas Perhubungan
1540	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Dinas Perhubungan
1541	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Dinas Perhubungan
1542	2.15.000076	Data Inspektur LLAJ provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1543	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1544	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Dinas Perhubungan
1545	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Dinas Perhubungan
1546	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1547	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Dinas Perhubungan
1548	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1549	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	Dinas Perhubungan
1550	2.15.000121	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	Dinas Perhubungan
1551	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1552	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1553	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1554	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1555	2.15.000157	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1556	2.15.000164	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1557	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B	Dokumen	Dinas Perhubungan
1558	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Dinas Perhubungan
1559	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	Dinas Perhubungan
1560	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Dinas Perhubungan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1561	2.15.000182	Dokumen kebijakan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang telah di tetapkan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1562	2.15.000185	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian	Dokumen	Dinas Perhubungan
1563	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	Dinas Perhubungan
1564	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dinas Perhubungan
1565	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	Dokumen	Dinas Perhubungan
1566	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1567	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1568	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Dinas Perhubungan
1569	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Dinas Perhubungan
1570	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Dinas Perhubungan
1571	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Dinas Perhubungan
1572	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	Dinas Perhubungan
1573	2.15.000229	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Region	Dokumen	Dinas Perhubungan
1574	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dinas Perhubungan
1575	2.15.000236	Rencana teknis bangunanpelabuhan yang paling sedikitmemuat:a) gambar yang memuat situasiatau rencana tapak, denah,tampak dan potongan;b) gambar rencana pondasitermasuk detailnya;c) gambar rencana kolom, balok,plat dan detailnya.d) Kondisi tanah(borlog/ stratigrafi).e) Rencana penempatan fasilitasSBNP.f) Koordinat geografis minimal 4(empat) titik yaitu 2 (dua) titikdi sisi dermaga/perairan dan 2(dua) titik di darat.	Dokumen	Dinas Perhubungan
1576	2.15.000240	Salinan dokumen Rencana IndukPelabuhan;	Dokumen	Dinas Perhubungan
1577	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	Dinas Perhubungan
1578	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1579	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1580	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	Dinas Perhubungan
1581	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1582	2.15.000250	Peraturan Gubernur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1583	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1584	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dinas Perhubungan
1585	2.15.000259	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dinas Perhubungan
1586	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	Dinas Perhubungan
1587	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Dinas Perhubungan
1588	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	Dinas Perhubungan
1589	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Dinas Perhubungan
1590	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Dinas Perhubungan
1591	2.15.000275	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1592	2.15.000277	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	Dinas Perhubungan
1593	2.15.000278	Dokumen Pemeriksaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1594	2.15.000279	Data sarana perkeretaapian	Unit	Dinas Perhubungan
1595	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	Dinas Perhubungan
1596	2.15.000287	Data izin operasi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1597	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Dinas Perhubungan
1598	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	Dinas Perhubungan
1599	2.15.000297	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	Dinas Perhubungan
1600	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	Dinas Perhubungan
1601	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	Dinas Perhubungan
1602	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	Dinas Perhubungan
1603	2.15.000323	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Dinas Perhubungan
1604	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	Dinas Perhubungan
1605	2.15.000326	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran	Orang	Dinas Perhubungan
1606	2.15.000331	Data jumlah dan lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Dinas Perhubungan
1607	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	Dinas Perhubungan
1608	2.15.000345	Tarif Angkutan Sungai dan Danau	Regulasi	Dinas Perhubungan
1609	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	Dinas Perhubungan
1610	2.15.000352	Data badan usaha yang telah memperoleh izin dari Gubernur untuk Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas di Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen	Dinas Perhubungan
1611	2.15.000363	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan	Regulasi	Dinas Perhubungan
1612	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dinas Perhubungan
1613	2.15.000379	Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen	Dinas Perhubungan
1614	2.15.000396	Data Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Perhubungan
1615	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Dinas Perhubungan
1616	2.15.000419	Pita Penggadu	Meter	Dinas Perhubungan
1617	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	Dinas Komunikasi dan Informatika
1618	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika
1619	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika
1620	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika
1621	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1622	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		Dinas Komunikasi dan Informatika
1623	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		Dinas Komunikasi dan Informatika
1624	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
1625	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1626	2.16.000077	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1627	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1628	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1629	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1630	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1631	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1632	2.16.000084	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kot a	Dinas Komunikasi dan Informatika
1633	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1634	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1635	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1636	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		Dinas Komunikasi dan Informatika
1637	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1638	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1639	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
1640	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1641	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1642	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1643	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1644	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1645	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1646	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1647	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1648	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1649	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1650	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1651	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1652	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1653	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1654	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1655	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1656	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1657	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1658	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1659	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1660	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1661	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1662	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	Dinas Komunikasi dan Informatika
1663	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1664	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1665	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1666	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	Dinas Komunikasi dan Informatika
1667	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika
1668	2.16.000125	Konten Teks	Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
1669	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
1670	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
1671	2.16.000128	Konten Audio	Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
1672	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika
1673	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1674	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1675	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1676	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1677	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1678	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1679	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
1680	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	Dinas Komunikasi dan Informatika
1681	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Dinas Komunikasi dan Informatika
1682	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
1683	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Dinas Komunikasi dan Informatika
1684	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1685	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Dinas Komunikasi dan Informatika
1686	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	Dinas Komunikasi dan Informatika
1687	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1688	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1689	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1690	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1691	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1692	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1693	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1694	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	Dinas Komunikasi dan Informatika
1695	2.16.000156	Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika
1696	2.16.000157	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	kabupaten/kot a	Dinas Komunikasi dan Informatika
1697	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Dinas Komunikasi dan Informatika
1698	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
1699	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1700	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1701	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1702	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1703	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1704	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1705	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1706	2.17.000017	Koperasi Yang Diberikan penilaian manajemen	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1707	2.17.000018	Koperasi Yang Diberikan penilaian permodalan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1708	2.17.000019	Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1709	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1710	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1711	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1712	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1713	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1714	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1715	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1716	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1717	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1718	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
1719	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1720	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1721	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1722	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1723	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1724	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;	Orang	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1725	2.18.000015	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Sistem Elektronik.	Orang	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1726	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1727	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1728	2.18.000019	Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1729	2.18.000020	Peraturan daerah tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1730	2.18.000022	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1731	2.18.000023	Peraturan daerah/Provinsi tentang Pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1732	2.18.000024	Peraturan daerah/Provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1733	2.18.000025	Peraturan daerah/provinsi tentang Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1734	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1735	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi .	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1736	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1737	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1738	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1739	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1740	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1741	2.18.000044	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu
1742	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1743	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1744	2.19.000066	Pemuda wirausaha muda	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1745	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1746	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
1747	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga
1748	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
1749	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Dinas Pemuda dan Olahraga
1750	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1751	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1752	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1753	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Dinas Pemuda dan Olahraga
1754	2.19.000079	kompetisi/kejuaraan multi event	Kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1755	2.19.000080	kompetisi/kejuaraan paralimpik	Kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1756	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1757	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Dinas Pemuda dan Olahraga
1758	2.19.000083	wasit	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1759	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Dinas Pemuda dan Olahraga
1760	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga
1761	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga
1762	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga
1763	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Dinas Pemuda dan Olahraga
1764	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
1765	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1766	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
1767	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1768	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Dinas Komunikasi dan Informatika
1769	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Dinas Komunikasi dan Informatika
1770	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1771	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1772	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1773	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1774	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Dinas Komunikasi dan Informatika
1775	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1776	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1777	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1778	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1779	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1780	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1781	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1782	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1783	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1784	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1785	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1786	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Dinas Komunikasi dan Informatika
1787	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1788	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1789	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1790	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
1791	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1792	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1793	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1794	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
1795	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1796	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
1797	2.22.000003	Budayawan yang mendapatkan penghargaan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1798	2.22.000006	Cagar Budaya yang dilakukan pengamanan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1799	2.22.000007	Cagar Budaya yang dipelihara	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1800	2.22.000008	Cagar Budaya yang dipublikasikan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1801	2.22.000009	Cagar Budaya yang diselamatkan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1802	2.22.000040	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1803	2.22.000043	Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1804	2.22.000058	Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1805	2.22.000065	Laporan kegiatan/event terkait pengayaan cagar budaya	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1806	2.22.000066	Laporan kegiatan/event terkait pengembangan cagar budaya	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1807	2.22.000089	Lembaga Adat yang dibina	Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1808	2.22.000092	Lembaga kebudayaan yang dibina	Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1809	2.22.000100	Maestro/empu yang terfasilitasi pengembangan karyanya	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1810	2.22.000105	Objek Warisan Budaya yang dikelola	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1811	2.22.000108	Objek Warisan Budaya yang dipublikasikan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1812	2.22.000111	Objek Cagar Budaya yang dipublikasikan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1813	2.22.000120	Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan penetapannya	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1814	2.22.000121	Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1815	2.22.000122	Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1816	2.22.000123	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1817	2.22.000127	Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1818	2.22.000132	Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1819	2.22.000133	Objek pemajuan tradisi budaya yang di dimanfaatkan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1820	2.22.000143	Orang yang mengakses Data dan Informasi Sejarah	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1821	2.22.000151	Penerima Penghargaan terhadap kontribusi dalam pemajuan kebudayaan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1822	2.22.000154	Penulisan Sejarah Lokal Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1823	2.22.000157	Permuseuman yang dikelola	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1824	2.22.000162	Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1825	2.22.000163	Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1826	2.22.000174	Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1827	2.22.000177	Sarana Pembinaan Sejarah	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1828	2.22.000181	Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1829	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1830	2.22.000189	SDM Lembaga Adat yang dibina	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1831	2.22.000191	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1832	2.22.000193	Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1833	2.22.000194	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Sertifikasi	Sertifikat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1834	2.22.000195	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1835	2.22.000198	Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Dibina	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1836	2.22.000205	Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1837	2.22.000206	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1838	2.22.000207	Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1839	2.22.000208	Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1840	2.22.000225	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1841	2.22.000234	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)	Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1842	2.22.000235	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1843	2.22.000236	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1844	2.22.000237	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1845	2.22.000238	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1846	2.22.000239	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1847	2.22.000240	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1848	2.22.000241	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1849	2.22.000242	Revitalisasi Taman Budaya	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1850	2.22.000243	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1851	2.22.000246	Pengelolaan Koleksi Museum	Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1852	2.22.000248	Pengelolaan Operasional Museum	Layanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1853	2.22.000250	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1854	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1855	2.23.000055	Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1856	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1857	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1858	2.23.000058	Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1859	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1860	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1861	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1862	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1863	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1864	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1865	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1866	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1867	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1868	2.23.000068	Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang diterima oleh perpustakaan milik provinsi	Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1869	2.23.000069	Penerbit dan Produsen Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR)	Penerbit/produsen	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1870	2.23.000070	Jumlah Koleksi hasil pelaksanaan KCKR yang diolah	Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1871	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	Entry	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1872	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1873	2.23.000073	Pelestarian naskah kuno milik Provinsi	naskah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1874	2.23.000074	Koleksi khas daerah yang dimiliki provinsi	Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1875	2.23.000075	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Provinsi	Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1876	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1877	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1878	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1879	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1880	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1881	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1882	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1883	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1884	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1885	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1886	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1887	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1888	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1889	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1890	2.23.000090	Siswa sekolah menengah dan khusus yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1891	2.23.000091	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1892	2.23.000092	Pegiat literasi binaan provinsi	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1893	2.23.000093	Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1894	2.23.000094	Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1895	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1896	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1897	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1898	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1899	2.24.000007	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1900	2.24.000011	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1901	2.24.000012	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1902	2.24.000014	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1903	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1904	2.24.000016	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1905	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1906	2.24.000018	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1907	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1908	2.24.000020	Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1909	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1910	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1911	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1912	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1913	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1914	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1915	2.24.000035	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1916	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1917	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1918	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1919	3.25.000087	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1920	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	Kegiatan	Dinas Kelautan dan Perikanan
1921	3.25.000111	Kelompok pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
1922	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1923	3.25.000132	Masyarakat yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
1924	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
1925	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1926	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
1927	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Dinas Kelautan dan Perikanan
1928	3.25.000230	speedboat pengawas	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1929	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	Dinas Kelautan dan Perikanan
1930	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
1931	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
1932	3.25.000320	Lokasi rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1933	3.25.000324	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1934	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil	Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
1935	3.25.000328	Personel Pengawas Perikanan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
1936	3.25.000329	Peta Rawan pelanggaran pemanfaatan ruang laut	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1937	3.25.000330	Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1938	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
1939	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1940	3.25.000345	Sumber Daya Manusia Penguji kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan di laut	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
1941	3.25.000346	Lahan pembudidayaan ikan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1942	3.25.000376	Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberikan Fasilitas	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1943	3.25.000377	Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1944	3.25.000378	Pelaku Usaha yang diberikan Pembinaan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1945	3.25.000382	Pelaku Usaha yang mendapat bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha bagi pelaku usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1946	3.25.000392	Hari Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1947	3.25.000393	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Yang Dirawat	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1948	3.25.000394	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP)	Forum	Dinas Kelautan dan Perikanan
1949	3.25.000396	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
1950	3.25.000399	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1951	3.25.000413	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Peraturan	Dinas Kelautan dan Perikanan
1952	3.25.000418	Volume Produksi Garam	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
1953	3.25.000419	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1954	3.25.000420	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan Di Laut sampai dengan 12 Mil	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1955	3.25.000421	Kasus pelanggaran usaha pengolahan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan	Perkara	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1956	3.25.000422	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1957	3.25.000432	Sarana Usaha Pergaraman	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1958	3.25.000434	Kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
1959	3.25.000437	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1960	3.25.000440	Pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi	Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1961	3.25.004101	Rekomendasi untuk perizinan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	Rekomendasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
1962	3.25.004146	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Dinas Kelautan dan Perikanan
1963	3.25.004157	Jumlah dokumen yang memuat Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1964	3.25.004159	Data lahan existing yang sudah dimanfaatkan untuk perikanan budidaya laut	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1965	3.25.004160	Data jenis ikan / komoditas yang dibudidayakan	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1966	3.25.004161	Data produksi benih dari unit pembenihan/hatchery	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1967	3.25.004163	Data pelaku usaha / tenaga kerja bidang pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kab/kota	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
1968	3.25.004170	Gugus tugas tanggap darurat penyakit ikan tingkat provinsi	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
1969	3.25.004181	Pelabuhan Perikanan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1970	3.25.004184	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Dinas Kelautan dan Perikanan
1971	3.25.004185	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
1972	3.25.004188	mesin pembuat pakan dan bahan baku pakan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
1973	3.26.000006	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	Dinas Pariwisata
1974	3.26.000011	Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dinas Pariwisata
1975	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1976	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1977	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Dinas Pariwisata
1978	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Dinas Pariwisata
1979	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1980	3.26.000043	Dokumen Perancangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1981	3.26.000045	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1982	3.26.000047	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1983	3.26.000055	Laporan Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	Dinas Pariwisata
1984	3.26.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Orang Kreatif	Laporan	Dinas Pariwisata
1985	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	Laporan	Dinas Pariwisata
1986	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	Dinas Pariwisata
1987	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	Dinas Pariwisata

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
1988	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	Orang	Dinas Pariwisata
1989	3.26.000143	Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi	Unit Usaha	Dinas Pariwisata
1990	3.26.000149	Data Pemetaan unsur pemangku kepentingan terkait pelaku usaha dan asosiasi bidang pariwisata	Data	Dinas Pariwisata
1991	3.26.000160	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Dokumen	Dinas Pariwisata
1992	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	Dinas Pariwisata
1993	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	Dinas Pariwisata
1994	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	Dinas Pariwisata
1995	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Dinas Pariwisata
1996	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	Dinas Pariwisata
1997	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	Dinas Pariwisata
1998	3.26.000183	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	Unit	Dinas Pariwisata
1999	3.26.000186	Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	Dinas Pariwisata
2000	3.26.000192	Data infrastruktur ruang kreatif		Dinas Pariwisata
2001	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	Dinas Pariwisata
2002	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Dinas Pariwisata
2003	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	Dinas Pariwisata
2004	3.26.000211	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Orang	Dinas Pariwisata
2005	3.26.000213	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Dinas Pariwisata
2006	3.26.000215	Data jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi setelah difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	Dinas Pariwisata
2007	3.26.000219	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Dinas Pariwisata
2008	3.26.000220	Daya jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Orang	Dinas Pariwisata
2009	3.26.000223	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Orang	Dinas Pariwisata
2010	3.26.000224	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi yang telah dilakukan	Orang	Dinas Pariwisata
2011	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Dinas Pariwisata
2012	3.26.000230	Data kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan	Orang	Dinas Pariwisata
2013	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Dinas Pariwisata
2014	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Dinas Pariwisata
2015	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Dinas Pariwisata
2016	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	Dinas Pariwisata

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2017	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Dinas Pariwisata
2018	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Dinas Pariwisata
2019	3.26.000272	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Orang	Dinas Pariwisata
2020	3.26.000279	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	Dinas Pariwisata
2021	3.26.000287	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	Dinas Pariwisata
2022	3.26.000288	Kegiatan / event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Dinas Pariwisata
2023	3.26.000292	Produk yang Memperoleh Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual	Produk	Dinas Pariwisata
2024	3.27.000021	Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2025	3.27.000026	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2026	3.27.000052	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2027	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2028	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2029	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	Sertifikat	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2030	3.27.000224	Sertifikat Benih Tanaman Perkebunan yang diterbitkan	Sertifikat	Dinas Perkebunan
2031	3.27.000229	Unit Usaha Produk Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi nomor kontrol veteriner	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2032	3.27.000230	Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme	Varietas Unggul Baru (VUB)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2033	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2034	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2035	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2036	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2037	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2038	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2039	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2040	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2041	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2042	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2043	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2044	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Dinas Perkebunan
2045	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	Dinas Perkebunan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2046	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	Dinas Perkebunan
2047	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2048	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2049	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2050	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2051	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2052	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2053	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2054	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Dinas Perkebunan
2055	3.27.000267	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	Dinas Perkebunan
2056	3.27.000268	Jumlah benih perkebunan berbentuk mata tumbuh yang diperbanyak/ diproduksi	Mata	Dinas Perkebunan
2057	3.27.000269	Jumlah benih perkebunan berbentuk setek yang diperbanyak/ diproduksi	Setek	Dinas Perkebunan
2058	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2059	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2060	3.27.000283	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2061	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2062	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2063	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2064	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2065	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2066	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2067	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2068	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2069	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2070	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2071	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2072	3.27.000303	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2073	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2074	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2075	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2076	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2077	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskesmas	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2078	3.27.000316	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2079	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2080	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2081	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2082	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2083	3.27.000325	Jumlah Eksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2084	3.27.000326	Jumlah Eksisting Laboratorium Pertanian	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2085	3.27.000327	Jumlah Eksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2086	3.27.000332	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2087	3.27.000333	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2088	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2089	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2090	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2091	3.27.000338	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2092	3.27.000340	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2093	3.27.000342	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2094	3.27.000345	Jumlah izin laboratorium yang diawasi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2095	3.27.000346	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang memenuhi komitmen	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2096	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2097	3.27.000348	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2098	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2099	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2100	3.27.000363	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	Dinas Perkebunan
2101	3.27.000367	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2102	3.27.000368	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2103	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2104	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2105	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2106	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2107	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2108	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2109	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2110	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2111	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2112	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2113	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2114	3.27.000386	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2115	3.27.000387	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2116	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2117	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2118	3.27.000392	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2119	3.27.000393	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2120	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2121	3.27.000397	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2122	3.27.000398	Jumlah Ketersediaan Pestisida	Liter	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2123	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2124	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2125	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2126	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2127	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2128	3.27.000409	Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2129	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2130	3.27.000411	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2131	3.27.000413	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2132	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2133	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2134	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2135	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2136	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2137	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2138	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2139	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2140	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Dinas Perkebunan
2141	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Dinas Perkebunan
2142	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2143	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2144	3.27.000430	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi	Ha	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2145	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2146	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2147	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	Dinas Perkebunan
2148	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	Dinas Perkebunan
2149	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2150	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2151	3.27.000439	Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Dinas Perkebunan
2152	3.27.000440	Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Dinas Perkebunan
2153	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2154	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2155	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	Dinas Perkebunan
2156	3.27.000447	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2157	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2158	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2159	3.27.000456	Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2160	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2161	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2162	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2163	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2164	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2165	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2166	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksian HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2167	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2168	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2169	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2170	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2171	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2172	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2173	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2174	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2175	3.27.000478	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2176	3.27.000479	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2177	3.27.000480	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Unit	Dinas Perkebunan
2178	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2179	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2180	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2181	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2182	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2183	3.27.000488	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2184	3.27.000489	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2185	3.27.000493	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2186	3.27.000494	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2187	3.27.000495	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2188	3.27.000496	Jumlah pengolahan hasil perkebunan	Unit	Dinas Perkebunan
2189	3.27.000499	Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kasus	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2190	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2191	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2192	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2193	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2194	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2195	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2196	3.27.000507	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2197	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2198	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2199	3.27.000510	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2200	3.27.000513	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2201	3.27.000514	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2202	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2203	3.27.000516	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2204	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2205	3.27.000518	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2206	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2207	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2208	3.27.000525	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2209	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2210	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2211	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2212	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2213	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2214	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2215	3.27.000538	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2216	3.27.000539	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2217	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratn registrasi produk hewan	Produk	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2218	3.27.000550	Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2219	3.27.000551	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2220	3.27.000553	Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2221	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2222	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2223	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2224	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan	Dokumen	Dinas Perkebunan
2225	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2226	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2227	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2228	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2229	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2230	3.27.000567	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2231	3.27.000568	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2232	3.27.000569	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Rumpun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2233	3.27.000570	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Rumpun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2234	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2235	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2236	3.27.000576	Jumlah Sarana Pendukung dibangun	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2237	3.27.000580	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2238	3.27.000581	Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan	Varietas Unggul Baru (VUB)	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2239	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2240	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2241	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2242	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2243	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2244	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2245	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2246	3.27.000591	Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2247	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2248	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2249	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2250	3.27.000604	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2251	3.27.000610	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2252	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2253	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	Dinas Perkebunan
2254	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2255	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2256	3.27.000620	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2257	3.27.000625	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2258	3.27.000627	Jumlah unit usaha yang telah dilakukan pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada unit usaha produk hewan	Unit Usaha	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2259	3.27.000628	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2260	3.27.000649	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2261	3.27.000651	Jumlah Pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2262	3.27.000656	Jumlah Sebaran Kondisi Alsintan : (Baik dan Rusak)	Unit	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2263	3.27.000659	Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura (berbentuk batang, biji maupun umbi)	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2264	3.27.000660	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2265	3.27.000661	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2266	3.27.000662	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan dalam kondisi rusak	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2267	3.27.000663	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2268	3.27.000664	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan dalam kondisi baik	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2269	3.27.000668	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura (berbentuk batang, biji, maupun umbi) yang terawasi peredarannya	Ton	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2270	3.27.000673	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan	Unit	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2271	3.27.000680	Jumlah Izin Usaha Perkebunan yang Diawasi	Unit Usaha	Dinas Perkebunan
2272	3.28.000001	Bangunan sipil teknis yang Terbangun, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Unit	Dinas Kehutanan
2273	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	Kasus	Dinas Kehutanan
2274	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	Ha	Dinas Kehutanan
2275	3.28.000004	Data Luas area kawasan hutan, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Dinas Kehutanan
2276	3.28.000005	Data Luas area mangrove yang dilaksanakan rehabilitasi, Bibit Mangrove yang disiapkan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan
2277	3.28.000006	Data Luas area Penerapan pengembangan Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan
2278	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan
2279	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	Data	Dinas Kehutanan
2280	3.28.000009	Data Luas hutan Kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan
2281	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2282	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pendukung pembangunan sumber benih	Ha	Dinas Kehutanan
2283	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	Dinas Kehutanan
2284	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Ha	Dinas Kehutanan
2285	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	Dinas Kehutanan
2286	3.28.000015	Dokumen analisis dalam rangka pemberian pertimbangan teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2287	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2288	3.28.000017	Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2289	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2290	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2291	3.28.000021	Dokumen kegiatan pengawasan KHDTK	Dokumen	Dinas Kehutanan
2292	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	Dokumen	Dinas Kehutanan
2293	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	Dokumen	Dinas Kehutanan
2294	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	Dinas Kehutanan
2295	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Dokumen	Dinas Kehutanan
2296	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	Dokumen	Dinas Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2297	3.28.000027	Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2298	3.28.000028	Dokumen Pemanfaatan Hutan di wilayah KPH, Unit KPH	Dokumen	Dinas Kehutanan
2299	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit	Dinas Kehutanan
2300	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultasi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	Dokumen	Dinas Kehutanan
2301	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2302	3.28.000036	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2303	3.28.000037	Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst	Kasus	Dinas Kehutanan
2304	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	Kasus	Dinas Kehutanan
2305	3.28.000039	Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, laporan kegiatan fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK, Dokumen pengelolaan tempat ibadah dan wisata religi di kawasan hutan	Dokumen	Dinas Kehutanan
2306	3.28.000040	Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH	Dokumen	Dinas Kehutanan
2307	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	Dokumen	Dinas Kehutanan
2308	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	Kasus	Dinas Kehutanan
2309	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	Kasus	Dinas Kehutanan
2310	3.28.000045	Kegiatan pemanfaatan Tahura, Masyarakat yang mengikuti kegiatan. Laporan Kegiatan.	Permohonan	Dinas Kehutanan
2311	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelaksana penanganan kerusakan lahan basah.	Kasus	Dinas Kehutanan
2312	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	Kasus	Dinas Kehutanan
2313	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	Kegiatan	Dinas Kehutanan
2314	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	Kasus	Dinas Kehutanan
2315	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	Kegiatan	Dinas Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2316	3.28.000053	Kegiatan pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, dokumen penetapan koridor hidupan liar	Kasus	Dinas Kehutanan
2317	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	Kasus	Dinas Kehutanan
2318	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	Kelompok	Dinas Kehutanan
2319	3.28.000056	Kerja sama Tahura, Laporan Kegiatan Kerjasama, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan
2320	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	Kasus	Dinas Kehutanan
2321	3.28.000058	Laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHHBK skala Kecil dan Menengah, izin PBPHH Bukan Kayu skala kecil dan menengah	Laporan	Dinas Kehutanan
2322	3.28.000059	Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	Kasus	Dinas Kehutanan
2323	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Dinas Kehutanan
2324	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Kasus	Dinas Kehutanan
2325	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	Kasus	Dinas Kehutanan
2326	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	Kasus	Dinas Kehutanan
2327	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	Kasus	Dinas Kehutanan
2328	3.28.000066	Penerbitan Perizinan berusaha berbasis risiko kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, Pengadaan dan Pengedaran bibit, serta Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit dalam Provinsi, laporan Pelayanan Perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih, kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran bibit serta kegiatan usaha Pengadaan dan Pengedaran benih dan bibit.	Kasus	Dinas Kehutanan
2329	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	penyuluh	Dinas Kehutanan
2330	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl.	Laporan	Dinas Kehutanan
2331	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	Personil	Dinas Kehutanan
2332	3.28.000070	peta blok Pengelolaan dan Penataan wilayah kerja dari Tahura, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	Dokumen	Dinas Kehutanan

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2333	3.28.000071	Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, Unit KPH	Dokumen	Dinas Kehutanan
2334	3.28.000072	sarana prasarana operasionalisasi resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun, laporan operasional KPH, Unit KPH	Unit	Dinas Kehutanan
2335	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	Kasus	Dinas Kehutanan
2336	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	Kasus	Dinas Kehutanan
2337	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	Kasus	Dinas Kehutanan
2338	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitas Forum DAS	Lembaga	Dinas Kehutanan
2339	3.28.000077	Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang telah dilakukan pembagian blok, dan Dokumen Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan pada Wilayah KPHP/L terkait dengan RPHJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang)	Unit	Dinas Kehutanan
2340	3.28.000078	Unit konservasi tanah dan air Wilayah DAS untuk pengendalian kerusakan lingkungan dan lahan, izin penerapan teknik konservasi DAS, Bangunan Sipil Teknis, terbagunnya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully plug di Wilayah DAS	Unit	Dinas Kehutanan
2341	3.28.000079	Unit manajemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah beroperasi, laporan kegiatan fasilitasi pendampingan terhadap PBPH HHBK skala Kecil dan Menengah, Luas pembudidayaan hasil hutan bukan kayu	Unit	Dinas Kehutanan
2342	3.28.000080	Unit manajemen PBPH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPH untuk PBPH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Unit	Dinas Kehutanan
2343	3.29.000001	Data SOP Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2344	3.29.000002	Data Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Izin	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2345	3.29.000004	Data Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.	Kegiatan Usaha	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2346	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	Perusahaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2347	3.29.000007	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Rekomendasi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2348	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2349	3.29.000011	Data Infrastruktur Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2350	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Km ²	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2351	3.29.000013	Data Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Unit Usaha	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2352	3.29.000014	Data Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	Zona	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2353	3.29.000023	Data Perusahaan yang Melaksanakan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	Perusahaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2354	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	Perusahaan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2355	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2356	3.29.000027	Data Realisasi Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2357	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2358	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2359	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2360	3.29.000039	Data Zona Konservasi Air Tanah;	Zona	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2361	3.29.000040	Dokumen Prosedur dan Persyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2362	3.29.000041	Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2363	3.29.000043	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Unit	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2364	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	Bahan Berbahaya	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2365	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2366	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2367	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2368	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2369	3.30.000008	Barang yang telah diuji	Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2370	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2371	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Distributor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2372	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2373	3.30.000016	Jasa yang diawasi	Jasa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2374	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	Kalibrasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2375	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2376	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2377	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2378	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2379	3.30.000032	Laporan komoditi potensial yang dipantau	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2380	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2381	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2382	3.30.000036	Laporan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2383	3.30.000037	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2384	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2385	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2386	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2387	3.30.000042	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2388	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2389	3.30.000052	Pedagangan besar/distributor yang telah diberikan surat rekomendasi Pemenuhan komitmen Perizinan Pedagang besar/distributor terdaftar bahan berbahaya melalui OSS	Pedagang Besar/Distributor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2390	3.30.000055	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pestisida	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2391	3.30.000056	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2392	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2393	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota	Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2394	3.30.000086	Pengawasan Pengadaan Pestisida di Tingkat Daerah Provinsi	Pestisida	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2395	3.30.000087	Pengawasan Pengadaan Pupuk di Tingkat Daerah Provinsi	Pupuk	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2396	3.30.000088	Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2397	3.30.000089	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2398	3.30.000093	Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	Produk	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2399	3.30.000095	Produk yang telah diterbitkan sertifikasinya	Produk	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2400	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	SKA	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2401	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2402	3.31.000035	Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Dokumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2403	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2404	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2405	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2406	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2407	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2408	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2409	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2410	3.31.000058	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2411	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2412	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2413	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
2414	3.32.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2415	3.32.000001	Calon lokasi yang sudah dilakukan penjajakan	Lokasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2416	3.32.000003	Calon Transmigran atau Transmigran yang mampu implementasi hasil pelatihan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2417	3.32.000006	Calon transmigran atau transmigran yang mendapat pelatihan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2418	3.32.000007	Data kabupaten yang berpotensi menjadi calon kawasan transmigrasi	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2419	3.32.000008	Data KK asal dan tujuan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2420	3.32.000009	Data bangunan yang dimiliki	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2421	3.32.000010	Data KK yg beradaptasi	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2422	3.32.000011	Data Kepala Keluarga transmigrasi yg dibina	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2423	3.32.000014	Data SP pemantapan dan SP penguatan	Satuan Permukiman (SP)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2424	3.32.000015	Dokumen hasil evaluasi kelayakan hunian	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2425	3.32.000016	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2426	3.32.000017	Dokumen Hasil Identifikasi	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2427	3.32.000018	Dokumen usulan pencadangan tanah	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2428	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	Materi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2429	3.32.000021	Jenis Sarpras yang belum memenuhi kriteria	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2430	3.32.000022	Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2431	3.32.000023	Data kabupaten yg berpotensi jd calon kawasan transmigrasi, luasannya brp, jumlah KK	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2432	3.32.000024	Data Kabupaten yg berpotensi menjadi pencadangan tanah utk kawasan transmigrasi	Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2433	3.32.000025	Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2434	3.32.000026	Kasus yang tidak dapat diselesaikan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2435	3.32.000027	Data jumlah Kerja sama antar provinsi dan provinsi-kabupaten/kota, kabupaten/kota-kabupaten/kota	Laporan / Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2436	3.32.000028	Ketersedian sarpras di lokasi penempatan	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2437	3.32.000029	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2438	3.32.000030	Kepala Keluarga yang berminat mengikuti program transmigrasi (animo)	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2439	3.32.000031	Jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2440	3.32.000032	Kepala Keluarga yang ikut Pelatihan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2441	3.32.000035	Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2442	3.32.000036	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2443	3.32.000037	Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2444	3.32.000038	Kepala Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2445	3.32.000039	Laporan hasil koordinasi kerja sama	Laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2446	3.32.000040	Laporan hasil sinkronisasi kerja sama	Laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2447	3.32.000041	Lokasi yang diusulkan	Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2448	3.32.000042	Lokasi kawasan yang memiliki potensi	Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2449	3.32.000043	Lokasi penempatan	Lokasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2450	3.32.000044	lokasi yang di usulkan	Lokasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2451	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	Lokasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2452	3.32.000046	Luas tanah	Hektar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2453	3.32.000047	Luas tanah pembangunan kawasan transmigrasi	Hektar	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2454	3.32.000049	Data Permasalahan yg belum, sedang, dan sudah diselesaikan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2455	3.32.000050	Satuan Permukiman yang dikembangkan	SP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2456	3.32.000052	Transmigran yang diberangkatkan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2457	3.32.000053	Transmigran yang ditampung	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2458	3.32.000054	Transmigran yang memperoleh layanan kesehatan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2459	3.32.000055	Transmigran yang mendapatkan pendampingan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2460	3.32.000056	transmigran yang mengikuti penyuluhan sebelum keberangkatan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2461	3.32.000057	Transmigran yang telah diberikan bantuan non-standar	Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2462	3.32.000058	transmigran yang telah diberikan bantuan permodalan	Paket	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2463	3.32.000059	Transmigran yang terseleksi akhir pra pemberangkatan	Kepala Keluarga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2464	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Sekretariat Daerah
2465	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	Sekretariat Daerah
2466	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2467	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2468	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	Sekretariat Daerah
2469	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	Sekretariat Daerah
2470	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2471	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	Sekretariat Daerah
2472	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2473	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	Sekretariat Daerah
2474	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen	Sekretariat Daerah
2475	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	Sekretariat Daerah
2476	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen	Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2477	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	Sekretariat Daerah
2478	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2479	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2480	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan	Sekretariat Daerah
2481	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	Sekretariat Daerah
2482	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	Sekretariat Daerah
2483	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2484	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2485	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	Sekretariat Daerah
2486	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	Sekretariat Daerah
2487	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	Sekretariat Daerah
2488	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2489	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	Sekretariat Daerah
2490	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	Sekretariat Daerah
2491	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	Sekretariat Daerah
2492	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2493	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	Sekretariat Daerah
2494	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	Sekretariat Daerah
2495	4.01.000032	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	Sekretariat Daerah
2496	4.01.000033	Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	Sekretariat Daerah
2497	4.01.000034	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2498	4.01.000035	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	Sekretariat Daerah
2499	4.01.000036	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	Sekretariat Daerah
2500	4.01.000037	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	Sekretariat Daerah
2501	4.01.000038	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2502	4.01.000039	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2503	4.01.000040	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	Sekretariat Daerah
2504	4.01.000041	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen	Sekretariat Daerah
2505	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Sekretariat Daerah
2506	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Sekretariat Daerah
2507	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Sekretariat Daerah
2508	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	Sekretariat Daerah
2509	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Sekretariat Daerah
2510	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	Sekretariat Daerah
2511	4.01.000048	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Sekretariat Daerah
2512	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Sekretariat Daerah
2513	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Sekretariat Daerah
2514	4.01.000051	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	Sekretariat Daerah
2515	4.01.000052	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	Sekretariat Daerah
2516	4.01.000053	Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	Sekretariat Daerah
2517	4.01.000054	Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2518	4.01.000055	Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	Sekretariat Daerah
2519	4.01.000056	Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	Sekretariat Daerah
2520	4.01.000057	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Laporan	Sekretariat Daerah
2521	4.01.000058	Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2522	4.01.000059	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen	Sekretariat Daerah
2523	4.01.000060	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan	Sekretariat Daerah
2524	4.01.000061	Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit	Sekretariat Daerah
2525	4.01.000062	Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit	Sekretariat Daerah
2526	4.01.000063	Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang	Sekretariat Daerah
2527	4.01.000064	Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit	Sekretariat Daerah
2528	4.01.000065	Perpustakaan yang Dibangun	Unit	Sekretariat Daerah
2529	4.01.000066	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit	Sekretariat Daerah
2530	4.01.000067	Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit	Sekretariat Daerah
2531	4.01.000068	Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang	Sekretariat Daerah
2532	4.01.000069	Gedung Serba Guna	Unit	Sekretariat Daerah
2533	4.01.000070	Perpustakaan	Unit	Sekretariat Daerah
2534	4.01.000071	Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit	Sekretariat Daerah
2535	4.01.000078	Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit	Sekretariat Daerah
2536	4.01.000079	Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang	Sekretariat Daerah
2537	4.01.000080	Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang	Sekretariat Daerah
2538	4.01.000081	Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang	Sekretariat Daerah
2539	4.01.000082	Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang	Sekretariat Daerah
2540	4.01.000083	Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang	Sekretariat Daerah
2541	4.01.000084	Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya	Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2542	4.01.000085	Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya	Sekretariat Daerah
2543	4.01.000086	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2544	4.01.000089	Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Sekretariat Daerah
2545	4.01.000090	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen	Sekretariat Daerah
2546	4.01.000091	Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2547	4.01.000093	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2548	4.01.000130	Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit	Sekretariat Daerah
2549	4.01.000131	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2550	4.01.000132	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2551	4.01.000133	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	Sekretariat Daerah
2552	4.01.000134	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Sekretariat Daerah
2553	4.01.000135	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	Sekretariat Daerah
2554	4.01.000136	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	Sekretariat Daerah
2555	4.01.000137	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	Sekretariat Daerah
2556	4.01.000138	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Sekretariat Daerah
2557	4.01.000139	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	Sekretariat Daerah
2558	4.01.000140	Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	Sekretariat Daerah
2559	4.01.000141	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	Sekretariat Daerah
2560	4.01.000142	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	Sekretariat Daerah
2561	4.01.000143	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	Sekretariat Daerah
2562	4.01.000145	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	Sekretariat Daerah
2563	4.01.000150	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	Sekretariat Daerah
2564	4.01.000151	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	Sekretariat Daerah
2565	4.01.000152	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Sekretariat Daerah
2566	4.01.000153	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	Sekretariat Daerah
2567	4.01.000154	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	Sekretariat Daerah
2568	4.01.000159	Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	Sekretariat Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2569	4.01.000161	Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga	Sekretariat Daerah
2570	4.01.000164	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	Sekretariat Daerah
2571	4.01.000167	Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	Sekretariat Daerah
2572	4.01.000180	Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	Unit	Sekretariat Daerah
2573	4.01.000183	Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
2574	4.01.000184	Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
2575	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	Sekretariat DPRD
2576	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen	Sekretariat DPRD
2577	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Sekretariat DPRD
2578	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	Sekretariat DPRD
2579	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Sekretariat DPRD
2580	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Sekretariat DPRD
2581	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Sekretariat DPRD
2582	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	Sekretariat DPRD
2583	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Sekretariat DPRD
2584	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Sekretariat DPRD
2585	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2586	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2587	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	Sekretariat DPRD
2588	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2589	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	Sekretariat DPRD
2590	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	Sekretariat DPRD
2591	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	Sekretariat DPRD
2592	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	Sekretariat DPRD
2593	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	Sekretariat DPRD
2594	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	Sekretariat DPRD
2595	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Sekretariat DPRD
2596	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Sekretariat DPRD
2597	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2598	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2599	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Sekretariat DPRD
2600	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Sekretariat DPRD
2601	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	Sekretariat DPRD
2602	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2603	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2604	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Sekretariat DPRD

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2605	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Sekretariat DPRD
2606	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Sekretariat DPRD
2607	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2608	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	Sekretariat DPRD
2609	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	Sekretariat DPRD
2610	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	Sekretariat DPRD
2611	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2612	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	Sekretariat DPRD
2613	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	Sekretariat DPRD
2614	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Sekretariat DPRD
2615	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	Sekretariat DPRD
2616	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Sekretariat DPRD
2617	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Sekretariat DPRD
2618	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2619	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2620	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2621	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2622	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2623	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2624	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2625	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2626	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2627	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2628	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2629	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2630	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2631	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2632	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2633	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2634	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2635	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2636	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2637	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2638	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2639	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2640	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2641	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2642	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2643	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2644	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2645	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2646	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2647	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2648	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2649	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2650	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2651	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2652	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2653	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2654	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2655	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2656	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2657	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2658	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2659	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2660	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2661	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2662	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2663	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2664	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2665	5.02.000027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2666	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2667	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2668	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2669	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2670	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2671	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2672	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2673	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2674	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2675	5.02.000037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2676	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2677	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2678	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2679	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2680	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2681	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2682	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2683	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2684	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2685	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2686	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2687	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2688	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2689	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2690	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2691	5.02.000053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2692	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2693	5.02.000055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2694	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2695	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2696	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2697	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2698	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2699	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2700	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2701	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2702	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2703	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2704	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2705	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2706	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2707	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2708	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2709	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2710	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2711	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2712	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2713	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2714	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2715	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2716	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Badan Pendapatan Daerah
2717	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2718	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2719	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2720	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2721	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2722	5.02.000084	Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	Badan Pendapatan Daerah
2723	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	Badan Pendapatan Daerah
2724	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2725	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2726	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2727	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2728	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2729	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2730	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2731	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2732	5.02.000125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2733	5.02.000126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2734	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2735	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2736	5.02.000153	Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2737	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Badan Pendapatan Daerah
2738	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	Badan Pendapatan Daerah
2739	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Badan Pendapatan Daerah
2740	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2741	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2742	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2743	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
2744	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2745	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2746	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	Badan Kepegawaian Daerah
2747	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2748	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2749	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2750	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	Badan Kepegawaian Daerah
2751	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2752	5.03.000016	ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2753	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2754	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2755	5.03.000019	Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2756	5.03.000021	ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2757	5.03.000023	ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2758	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan	Badan Kepegawaian Daerah
2759	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2760	5.03.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2761	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2762	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2763	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2764	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	Badan Kepegawaian Daerah
2765	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2766	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2767	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
2768	5.03.000070	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	Badan Kepegawaian Daerah
2769	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2770	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2771	5.04.000006	Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2772	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Berita Acara	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2773	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2774	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2775	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2776	5.05.000001	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2777	5.05.000002	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2778	5.05.000004	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2779	5.05.000005	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2780	5.05.000011	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2781	5.05.000012	Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2782	5.05.000013	Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2783	5.05.000016	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2784	5.05.000017	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2785	5.05.000018	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2786	5.05.000021	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2787	5.05.000024	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2788	5.05.000025	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2789	5.05.000027	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2790	5.05.000028	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2791	5.05.000029	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2792	5.05.000030	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2793	5.05.000031	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2794	5.05.000032	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2795	5.05.000033	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2796	5.05.000034	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2797	5.05.000035	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2798	5.05.000036	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2799	5.05.000037	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2800	5.05.000038	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2801	5.05.000039	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2802	5.05.000040	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2803	5.05.000041	Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2804	5.05.000042	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2805	5.05.000043	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2806	5.05.000044	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2807	5.05.000063	Riset Kebijakan	naskah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2808	5.05.000064	Publikasi Ilmiah	naskah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2809	5.05.000067	Repositori Ilmiah	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2810	5.05.000068	Rencana Induk dan Peta Jalan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2811	5.05.000069	Naskah Kebijakan	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2812	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2813	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2814	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2815	5.05.000074	Perjanjian Kerja Sama	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2816	5.05.000075	Sosialisasi dan Diseminasi	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2817	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2818	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2819	5.05.000084	Pakta Kerja Sama Internasional	naskah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2820	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2821	5.05.000086	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2822	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2823	5.05.000089	Daftar Kerja Sama	Dokumen	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2824	5.05.000090	Laporan Kinerja	naskah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
2825	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	Badan Penghubung
2826	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan	Badan Penghubung
2827	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan	Badan Penghubung
2828	5.07.000004	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	Badan Penghubung
2829	5.07.000005	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan	Badan Penghubung

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2830	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Inspektorat
2831	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Inspektorat
2832	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Inspektorat
2833	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Inspektorat
2834	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	Inspektorat
2835	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Inspektorat
2836	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Inspektorat
2837	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Inspektorat
2838	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Inspektorat
2839	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	Inspektorat
2840	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	Inspektorat
2841	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	Inspektorat
2842	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2843	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2844	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2845	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2846	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2847	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2848	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2849	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2850	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2851	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2852	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2853	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2854	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2855	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2856	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2857	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2858	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2859	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2860	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2861	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2862	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2863	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2864	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2865	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2866	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2867	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2868	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2869	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2870	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2871	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2872	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2873	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2874	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2875	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2876	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2877	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2878	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2879	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2880	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2881	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

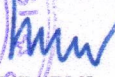
No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2882	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2883	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2884	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2885	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2886	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2887	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2888	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2889	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2890	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2891	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2892	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2893	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2894	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2895	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Produsen Data
2896	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2897	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2898	X.XX.000010	Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	Dinas Komunikasi dan Informatika

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 196905121989032009

